



**OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH (OPAH) SEBAGAI UPAYA
ZERO WASTE DI WILAYAH KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOYOLALI**

**LAPORAN AKHIR PKL MBKM
SKM PENGGERAK**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program PKL MBKM SKM Penggerak

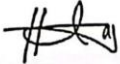

Disusun oleh:

Putri Aulia Rahman NIM 6411421093 Peminatan Kesehatan Lingkungan

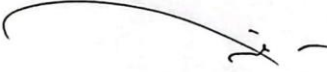
**PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
OKTOBER, 2024**

PENGESAHAN

Laporan Akhir PKL MBKM SKM Penggerak yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Sampah (OPAH) sebagai Upaya Zero Waste di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali* karya Putri Aulia Rahman, NIM 6411421093 telah dipertahankan dalam Ujian Praktik Kerja Lapangan Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang pada tanggal 21 Oktober 2024 dan disahkan oleh Dewan Penguji.



	Penguji	Tanggal
Pembimbing Lapangan	 Hanung Aprianto, S.K.M. NIP 198004112005011009	25 Oktober 2024
Pembimbing Akademik	 Arum Siwiendrayanti, S.K.M., M. Kes. NIP 198009092005012002	25 Oktober 2024

Mengetahui,
Koordinator Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat,
Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang


Muhammad Azinar, S.K.M., M.Kes.
NIP 198205182012121002

PERSETUJUAN

Laporan Akhir PKL MBKM SKM Penggerak yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Sampah (OPAH) sebagai Upaya Zero Waste di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali* karya Putri Aulia Rahman, NIM 6411421093 telah disetujui untuk diujikan dalam Ujian Praktik Kerja Lapangan Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

	Pembimbing	Tanggal
Pembimbing Lapangan	 Hanung Aprianto, S.K.M. NIP 198004112005011009	20 Oktober 2024
Pembimbing Akademik	 Arum Siwiendrayanti, S.K.M., M. Kes. NIP 198009092005012002	20 Oktober 2024

ABSTRAK

Pendahuluan: Permasalahan sampah kini menjadi salah satu masalah lingkungan hidup yang menjadi perhatian dunia, khususnya negara Indonesia. Indonesia merupakan negara nomor 4 di dunia dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2024 mencapai 281.603.800 jiwa. Pada kenyataannya, produksi sampah sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan sampah di Indonesia mencapai 38,5 juta ton per tahun pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 62,25% yang berhasil dikelola. Dalam upaya menanggulangi permasalahan mengenai sampah, maka pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang hingga saat ini belum mampu terlepas dari jurang kemiskinan dan keterbelakangan. Bentuk pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan kesehatan. Laporan ini disusun untuk menjabarkan sebelas siklus pemecahan masalah yang telah diselesaikan pada ketiga institusi yang dipilih, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sebagai lokus institusi, Desa Jembungan sebagai lokus masyarakat, dan SD Negeri 2 Jembungan sebagai lokus sekolah.

Metode: Identifikasi prioritas permasalahan kesehatan menggunakan metode hanlon kuantitatif, sedangkan penentuan penyebab masalah kesehatan ditentukan menggunakan diagram Fishbone yang mengorganisasi penyebab masalah yang muncul. Dalam menentukan prioritas penyebab masalah kesehatan menggunakan metode hanlon kuantitatif. Kemudian, penentuan alternatif pemecahan masalah kesehatan ditentukan menggunakan brainstorming yang diikuti dengan diskusi bersama stakeholder, pada penentuan prioritas pemecahan masalah Kesehatan menggunakan CARL, serta advokasi menggunakan analisis SWOT.

Hasil: Pelaksanaan program yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Wilayah Desa Jembungan, dan SD Negeri 2 Jembungan mendapatkan hasil bahwa terjadi perubahan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi terkait pengelolaan sampah.

Simpulan: Peningkatan pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil dari kegiatan intervensi mengenai pengelolaan sampah melalui program kesehatan dalam upaya menurunkan jumlah timbulan sampah di lokus institusi, masyarakat maupun sekolah.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, pendidikan kesehatan.

ABSTRACT

Background: *The waste problem has now become an environmental problem that is of concern to the world, especially Indonesia. Indonesia is the number 4 country in the world with an estimated population in 2024 reaching 281,603,800 people. In reality, waste production is proportional to the increase in population from year to year. Based on data from the National Waste Management Information System, waste generation in Indonesia will reach 38.5 million tons per year in 2023. Of this amount, only around 62.25% has been successfully managed. In an effort to overcome the problem of waste, community empowerment is one solution that can be implemented to improve the level of public health which until now has not been able to escape the gap of poverty and underdevelopment. This form of community empowerment can be carried out through several activities including training, counseling and health education. In an effort to overcome problems regarding waste, community empowerment is one solution that can be implemented to improve the level of public health which until now has not been able to escape the gap of poverty and underdevelopment. This form of community empowerment can be carried out through several activities including training, counseling and health education. This report is prepared to describe eleven problem-solving cycles that have been completed at the three selected institutions, namely the Boyolali Regency Environmental Service as the locus of the institution, Jembungan Village as the locus of the community, and SD Negeri 2 Jembungan as the locus of the school.*

Method: *Identification of priority health problems uses the quantitative Hanlon method, while the determination of the causes of health problems is determined using a Fishbone diagram that organizes the causes of the problems that arise. In determining the priority causes of health problems using the quantitative Hanlon method. Then, the determination of alternative solutions to health problems is determined using brainstorming followed by discussion with stakeholders, in determining the priority of solving health problems using CARL, and advocacy using SWOT analysis.*

Result: *The implementation of the program carried out at the Boyolali Regency Environmental Service, Jembungan Urban Village, and SD Negeri 2 Jembungan resulted in changes in knowledge levels before and after the waste management intervention.*

Conclusion: *Increased knowledge can be interpreted as the result of intervention activities regarding waste management through health programs in an effort to reduce the amount of waste generated in institutions, communities and schools.*

Keywords: *Waste management, community empowerment, health education.*

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan PKL SKM Penggerak yang berjudul **“OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH (OPAH) SEBAGAI UPAYA ZERO WASTE DI WILAYAH KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI”** dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Laporan PKL SKM Penggerak ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan Institusi Prodi Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Desa Jembungan, dan SD Negeri 2 Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Sehubungan dengan penyelesaian Laporan PKL ini, dengan rendah hati disampaikan terima kasih kepada:

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti, Kemendikbud
2. Prof. Dr. S. Martono, M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES)
3. Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang (UNNES)
4. Muhammad Azinar, S.K.M., M.Kes. selaku Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang (UNNES)
5. Arum Siwiendrayanti, S.K.M., M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Suraji, S.T., M.Si. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
7. Sarju Dwi Ratmoko, S.Sos. selaku Kepala Bidang Persampahan
8. Hanung Aprianto, S.K.M. selaku Pembimbing Lapangan
9. Seluruh staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
10. Budi Arif Dwi Nugroho, S.H., M.H. selaku Kepala Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali
11. Seluruh staf Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali

12. Seluruh anggota PKK RW 03 Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali
13. Slamet Mulyono, S.Pd. SD selaku Kepala SD Negeri 2 Jembungan
14. Seluruh guru SD Negeri 2 Jembungan yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program
15. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dari pelaksanaan Program SKM Penggerak hingga tersusunnya laporan ini

Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak di atas. Penulis menyadari bahwa laporan PKL ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga laporan PKL ini dapat berguna dan bermanfaat.

Semarang, 20 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN	6
1.4 MANFAAT	7
1.4.1 Bagi Institusi	7
1.4.2 Bagi Sekolah	7
1.4.3 Bagi Masyarakat	7
1.4.4 Bagi Mahasiswa	7
1.4.5 Bagi Prodi Kesehatan Masyarakat	8
1.5 RUANG LINGKUP	8
1.5.1 Ruang Lingkup Tempat	8
1.5.2 Ruang Lingkup Waktu	8
1.5.3 Ruang Lingkup Materi	8
BAB II METODE PELAKSANAAN	9
2.1 ANALISIS SITUASI	9
2.2 IDENTIFIKASI MASALAH	10
2.3 PENYUSUNAN PRIORITAS MASALAH KESEHATAN	10
2.4 IDENTIFIKASI PENYEBAB MASALAH KESEHATAN	12

2.5 PENYUSUNAN PRIORITAS PENYEBAB MASALAH KESEHATAN	12
2.6 IDENTIFIKASI ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN	13
2.7 PENYUSUNAN PRIORITAS PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN...	13
2.8 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (PLAN OF ACTION) INTERVENSI BERSAMA REPRESENTASI STAKEHOLDERS	14
2.9 PELAKSANAAN INTERVENSI SEBAGAI UPAYA PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN	14
2.10 MONITORING DAN EVALUASI.....	15
2.11 ADVOKASI KEPADA <i>STAKEHOLDERS</i>	16
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
3.1 HASIL	17
3.1.1 ANALISIS SITUASI.....	17
3.1.2 IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN	25
3.1.3 PENYUSUNAN PRIORITAS MASALAH KESEHATAN	31
3.1.4 IDENTIFIKASI PENYEBAB MASALAH KESEHATAN	55
3.1.5 PENYUSUNAN PRIORITAS PENYEBAB MASALAH.....	60
3.1.6 IDENTIFIKASI ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN	71
3.1.7 PENYUSUNAN PRIORITAS PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN	73
3.1.8 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (PLAN OF ACTION).....	74
3.1.9 PELAKSANAAN INTERVENSI SEBAGAI UPAYA PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN.....	80
3.1.10 MONITORING DAN EVALUASI.....	83
3.1.11 ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDER	87
3.2 PEMBAHASAN	91
3.2.1 PELAKSANAAN INTERVENSI	91
3.2.2 EVALUASI	95
BAB IV PENUTUP	98
4.1 KESIMPULAN	98
4.2 SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. 1 Komponen A Lokus Institusi	32
Tabel 3.1. 2 Responden 1 Komponen B Lokus Institusi.....	36
Tabel 3.1. 3 Responden 2 Komponen B Lokus Institusi.....	37
Tabel 3.1. 4 Responden 3 Komponen B Lokus Institusi.....	37
Tabel 3.1. 5 Responden 5 Komponen B Lokus Institusi.....	37
Tabel 3.1. 6 Responden 5 Komponen B Lokus Institusi.....	38
Tabel 3.1. 7 Hasil Total Skor Komponen B Lokus Institusi	38
Tabel 3.1. 8 Komponen C Lokus Institusi	39
Tabel 3.1. 9 Responden 1 Komponen D Lokus Institusi	39
Tabel 3.1. 10 Responden 2 Komponen D Lokus Institusi	39
Tabel 3.1. 11 Responden 3 Komponen D Lokus Institusi	40
Tabel 3.1. 12 Responden 4 Komponen D Lokus Institusi	40
Tabel 3.1. 13 Responden 5 Komponen D Lokus Institusi	41
Tabel 3.1. 14 Hasil Total Skor Komponen D Lokus Institusi.....	42
Tabel 3.1. 15 Hasil Total Skoring Analisis Prioritas Masalah Lokus Institusi	42
Tabel 3.1. 16 Komponen A Lokus Komunitas	44
Tabel 3.1. 17 Responden 1 Komponen B Lokus Komunitas.....	44
Tabel 3.1. 18 Responden 2 Komponen B Lokus Komunitas.....	44
Tabel 3.1. 19 Responden 3 Komponen B Lokus Komunitas.....	45
Tabel 3.1. 20 Hasil Total Skor Komponen B Lokus Komunitas	45
Tabel 3.1. 21 Komponen C Lokus Komunitas.....	45
Tabel 3.1. 22 Responden 1 Komponen D Lokus Komunitas.....	46
Tabel 3.1. 23 Responden 2 Komponen D Lokus Komunitas.....	46
Tabel 3.1. 24 Responden 3 Komponen D Lokus Komunitas.....	47
Tabel 3.1. 25 Hasil Total Skor Komponen D Lokus Komunitas	47
Tabel 3.1. 26 Hasil Total Skoring Prioritas Masalah Lokus Komunitas	48
Tabel 3.1. 27 Komponen A Lokus Sekolah	49
Tabel 3.1. 28 Responden 1 Komponen B Lokus Sekolah.....	50
Tabel 3.1. 29 Responden 2 Komponen B Lokus Sekolah.....	50
Tabel 3.1. 30 Responden 3 Komponen B Lokus Sekolah.....	51
Tabel 3.1. 31 Hasil Total Skor Komponen B Lokus Sekolah.....	51
Tabel 3.1. 32 Komponen C Lokus Sekolah	51
Tabel 3.1. 33 Responden 1 Komponen D Lokus Sekolah	52
Tabel 3.1. 34 Responden 2 Komponen D Lokus Sekolah	52
Tabel 3.1. 35 Responden 3 Komponen D Lokus Sekolah	53
Tabel 3.1. 36 Hasil Total Skor Komponen D Lokus Sekolah.....	53
Tabel 3.1. 37 Hasil Total Skoring Analisis Prioritas Masalah Lokus Sekolah	53
Tabel 3.1. 38 Responden 1 Lokus Institusi	60
Tabel 3.1. 39 Responden 2 Lokus Institusi	61

Tabel 3.1. 40 Responden 3 Lokus Institusi	61
Tabel 3.1. 41 Responden 4 Lokus Institusi	62
Tabel 3.1. 42 Responden 5 Lokus Institusi	63
Tabel 3.1. 43 Rekap Hasil Penyebab Masalah Lokus Institusi	64
3.1. 44 Responden 1 Lokus Komunitas	65
Tabel 3.1. 45 Responden 2 Lokus Komunitas	66
Tabel 3.1. 46 Responden 3 Lokus Komunitas	66
Tabel 3.1. 47 Rekap Hasil Penyebab Masalah Lokus Komunitas	67
Tabel 3.1. 48 Responden 1 Lokus Sekolah	68
Tabel 3.1. 49 Responden 2 Lokus Sekolah	69
Tabel 3.1. 50 Responden 3 Lokus Sekolah	70
Tabel 3.1. 51 Rekap Hasil Penyebab Masalah Lokus Sekolah	70
Tabel 3.1. 52 Pemecahan Masalah Lokus Institusi	73
Tabel 3.1. 53 Pemecahan Masalah Lokus Komunitas	73
Tabel 3.1. 54 Pemecahan Masalah Lokus Sekolah	74
Tabel 3.1. 55 PoA Lokus Institusi.....	74
Tabel 3.1. 56 PoA Lokus Komunitas	77
Tabel 3.1. 57 PoA Lokus Sekolah.....	78
Tabel 3.1. 58 Pelaksanaan Intervensi Lokus Institusi	80
Tabel 3.1. 59 Pelaksanaan Intervensi Lokus Komunitas	81
Tabel 3.1. 60 Pelaksanaan Intervensi Lokus Sekolah	82
Tabel 3.1. 61 Monev Lokus Institusi	83
Tabel 3.1. 62 Monev Lokus Komunitas.....	85
Tabel 3.1. 63 Monev Lokus Sekolah	86
Tabel 3.1. 64 Analisis SWOT Lokus Institusi	87
Tabel 3.1. 65 Analisis SWOT Lokus Komunitas.....	89
Tabel 3.1. 66 Analisis SWOT Lokus Sekolah	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. 1 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	17
Gambar 3.1. 2 Peta Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	17
Gambar 3.1. 3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali ...	19
Gambar 3.1. 4 Kantor Desa Jembungan.....	20
Gambar 3.1. 5 Peta Lokasi Desa Jembungan.....	20
Gambar 3.1. 6 SD Negeri 2 Jembungan.....	22
Gambar 3.1. 7 Peta Lokasi SD Negeri 2 Jembungan.....	23
Gambar 3.1. 8 Diagram Fishbone Institusi	55
Gambar 3.1. 9 Diagram Fishbone Komunitas.....	57
Gambar 3.1. 10 Diagram Fishbone Sekolah	58

DAFTAR SINGKATAN

WHO : *World Health Organization*

DLH : Dinas Lingkungan Hidup

TPA : Tempat Pemrosesan Akhir

TPS : Tempat Penampungan Sementara

TPS 3R : Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle

SIPSN : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

B3 : Bahan Berbahaya Beracun

SDGs : *Sustainable Development Goals*

BPS : Badan Pusat Statistik

SDM : Sumber Daya Manusia

SWOT : Strength, Weakness, Opportunities, Threat

PEARL : *Proprietary, Economic Feasibility, Acceptability, Resources, Legality*

CARL : *Capability, Accessibility, Readiness, Leverage*

SDI : Satu Data Indonesia

GIS : *Geographic Information System*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pelaksanaan PKL	105
Lampiran 2. Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir.....	106
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan	109
Lampiran 4. Instrumen	113
Lampiran 5. Luaran Wajib (IA Lokus Institusi, Masyarakat, dan Sekolah)	114
Lampiran 6. Luaran Wajib (Video Dokumentasi Diupload Youtube & Instagram).	120
Lampiran 7. Luaran Wajib (Policy Brief Lokus Institusi, Masyarakat, dan Sekolah)	121
Lampiran 8. Luaran Tambahan (Surat Pencatatan Ciptaan dari Ditjen HAKI Kemenkumham RI)	124
Lampiran 9. Luaran Tambahan (Poster HAKI)	125
Lampiran 10. Logbook Kegiatan	126
Lampiran 11. Lembar Konsultasi.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan sampah merupakan hal yang perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah dilakukan karena sampah menjadi salah satu permasalahan terutama di Indonesia yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat, kebersihan dan kesehatan lingkungan, perubahan perilaku masyarakat dan perekonomian. Sampah adalah salah satu konsekuensi dari adanya pertumbuhan dan semakin beragamnya kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kenaikan jumlah sampah yang terus meningkat dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi belum diimbangi pengelolaannya tentu menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai. Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah dapat berdampak buruk dan merugikan masyarakat seperti kontaminasi, penyebaran penyakit, atau perubahan iklim apabila tidak dilakukan dengan benar.

Permasalahan sampah kini menjadi salah satu masalah lingkungan hidup yang menjadi perhatian dunia, khususnya negara Indonesia. Indonesia merupakan negara nomor 4 di dunia dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2024 mencapai 281.603.800 jiwa yang menghadapi masalah kesehatan terutama sanitasi lingkungan akibat pencemaran udara, air, dan tanah. Salah satu faktor penyebabnya adalah keberadaan sampah. Sampah dimana-mana menjadi faktor pemicu pencemaran yang tidak terhindarkan. Pada kenyataannya, produksi sampah sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Berdasarkan data SIPSN, timbulan sampah di Indonesia mencapai 38,5 juta ton per tahun pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 62,25% yang berhasil dikelola.

Kabupaten Boyolali adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 1.015,10 km² yang termasuk dalam wilayah Solo raya dan tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Boyolali berada pada letak yang strategis dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Timur : Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta (Solo).
- Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali merupakan salah satu institusi yang bertugas membantu dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup yang berada di bawah kewenangan daerah. Menurut data DLH Kabupaten Boyolali dalam Badan Pusat Statistik (2021), jumlah timbulan sampah mencapai 100 ton per hari, tetapi hanya 40% dari sampah rumah tangga yang masuk ke TPA. Sisanya dibuang sembarangan, termasuk ke sungai atau pekarangan kosong. Pada tahun 2020, produksi sampah per hari di Kabupaten Boyolali sebanyak 287,3 ton per hari atau setara dengan 105.094,61 ton per tahun. Namun, hanya sekitar 27,38% dari sampah ini yang berhasil dikelola di TPA. Pada tahun 2024, produksi sampah Kabupaten Boyolali diperkirakan mencapai sekitar 300 ton per hari tetapi yang masuk ke TPA hanya sekitar 100 ton per hari. Berdasarkan data SIPSN, jumlah sampah yang terkelola saat ini sekitar 58% dan untuk jumlah sampah yang belum terkelola atau belum teridentifikasi sekitar 42%. DLH Kabupaten Boyolali bertugas untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008, ini termasuk pengembangan infrastruktur yang memadai untuk pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan akhir sampah (BPK RI, 2008). Oleh karena itu, implementasi strategi dan kebijakan oleh DLH Kabupaten Boyolali tidak hanya

berfokus pada penanganan sampah yang sudah terjadi, tetapi juga pada pencegahan produksi sampah berlebihan melalui edukasi dan inovasi dalam pengelolaan sampah yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Nomor Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sampah dibagi tiga jenis yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sumber sampah Kabupaten Boyolali berasal dari berbagai kegiatan seperti sampah pemukiman dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, dan sampah non permukiman yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas kesehatan serta fasilitas komersial. Dalam komposisinya, sampah Kabupaten Boyolali terdiri dari sampah organik, sampah plastik, kertas, logam, kain, kaca dan sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun). Untuk persentase masing-masing jenis komponen sampah pada tahun 2019, yaitu untuk sampah organik memiliki persentase terbanyak yaitu 53,84%, kemudian paling banyak kedua yaitu sampah plastik sebanyak 20,89%, selanjutnya sampah kertas sebanyak 13,30%. Persentase paling rendah adalah sampah kaca dengan persentase sebesar 0,98%. Dari hasil sampling selama 8 hari pada tahun 2018 didapatkan timbulan sampah permukiman di Kabupaten Boyolali sebesar 3,06 L/org/hari. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa volume timbulan sampah di Kabupaten Boyolali termasuk dalam klasifikasi sedang. Pada tahun 2023, persentase sampah terbanyak yaitu sampah plastik sebesar 37,5%, kemudian terbanyak kedua sampah organik sebesar 32,2%, selanjutnya sampah kayu/ranting/daun sebesar 11,8% (SIPSN, 2023).

Adanya dukungan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang baik mendorong perkembangan jenis kegiatan di bidang komersial menjadi lebih pesat. Namun dengan perkembangan tersebut, terdapat dampak yang ditimbulkan yaitu peningkatan jumlah sampah dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan dengan pembagian wilayah pedesaan dan perkotaan, dengan 1 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali. TPA Winong melayani wilayah Kecamatan Boyolali, Kecamatan

Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Banyudono, dan Kecamatan Ngemplak. Untuk cakupan pelayanan pengelolaan sampah masih terfokus pada Kecamatan Boyolali dengan tingkat pelayanan total mencapai 7,78%. TPA Winong memiliki luas sebesar 6 hektar dengan tingkat pelayanan relatif rendah dan masih terbatas dalam melayani wilayah yang berada dekat kota namun kondisi eksisting TPA telah mengalami *overload*. Rendahnya tingkat pelayanan sampah Kabupaten Boyolali menandakan bahwa prasarana dan sarana persampahan dari pewadahan hingga pemrosesan akhir masih minim dan terbatas. Sedangkan pada keberadaan TPS di Kabupaten Boyolali tersebar di 5 kecamatan, diantaranya Kecamatan Boyolali, Kecamatan Andong, Kecamatan Sambu, Kecamatan Banyudono, dan Kecamatan Mojosongo. Jumlah TPS terbesar di titik keramaian seperti objek wisata, puskesmas atau rumah sakit, dan pasar.

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Boyolali guna membantu pemerintah dalam pengelolaan persampahan dan peningkatan kualitas lingkungan memiliki beberapa hal yang meliputi studi perencanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan di Kabupaten Boyolali dari teknis pewadahan hingga pemrosesan akhir, melakukan analisis persampahan di Kabupaten Boyolali, merencanakan program dan kebijakan pembangunan daerah bidang lingkungan khususnya persampahan, dan memberikan masukan bagi pemerintah pusat Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana persampahan di Kabupaten Boyolali melalui program yang terpadu, berkelanjutan, dan terarah.

Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono merupakan salah satu wilayah di bagian selatan Kabupaten Boyolali. Wilayahnya yang berada di daerah perkotaan dengan topografi yang relatif datar, menyebabkan Desa Jembungan mengalami peningkatan volume sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas komersial. Ditinjau dari laman resmi Jawa Pos, pada Desa Jembungan memiliki permasalahan yaitu adanya penumpukan sampah di kawasan jembatan meskipun sudah terdapat larangan untuk tidak membuang sampah di sungai. Pada tahun 2021, tercatat

rata-rata timbulan sampah domestik di Kecamatan Banyudono sekitar 163.599 m³ per hari (SDI, 2021). Dengan jumlah tersebut, menunjukkan semakin besarnya tantangan yang dihadapi oleh Desa Jembungan dalam mengelola sampah dan pentingnya implementasi strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, karena ketersediaan lahan di Kabupaten Boyolali yang semakin lama semakin terkikis, ditambah adanya penumpukan sampah di area padat penduduk mengakibatkan pemerintah berinisiatif untuk menghilangkan keberadaan TPS liar pada setiap kecamatan termasuk Kecamatan Banyudono (Fokus Jateng, 2018).

SD Negeri 2 Jembungan merupakan salah satu sekolah yang berada di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, angka kejadian diare di Kecamatan Banyudono sebanyak 1.440 kasus. Ditinjau dari banyaknya kasus di daerah ini, tidak menutup kemungkinan penyebaran diare terjadi di SDN 2 Jembungan karena anak-anak memiliki sistem imun yang masih berkembang sehingga dapat lebih rawan untuk terinfeksi oleh virus atau bakteri yang menyebabkan diare. Penyakit diare dapat diakibatkan oleh sanitasi lingkungan yang buruk, termasuk pengelolaan sampah yang belum memadai. Kondisi kebersihan yang kurang, seperti sampah yang menumpuk dan dibuang sembarangan dapat menjadi tempat perkembangbiakan serangga dan mikroorganisme patogen yang juga berpotensi meningkatkan kontaminasi dan penyebaran berbagai macam penyakit. Sehingga peningkatan edukasi tentang kebersihan diri dan lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk mencegah kasus diare di sekolah ini.

Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah di masyarakat dapat dilakukan dengan penyuluhan dan pelatihan. Pemberdayaan masyarakat dapat melibatkan UKBM di dalam pelaksanaannya seperti Posyandu, Karang Taruna, dan PKK. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan dengan lintas sektor seperti pada sektor pendidikan yakni Pos PAUD ataupun institusi pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini berarti bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat ini dapat diterapkan pada lokus

masyarakat dan lokus sekolah yang akan dijadikan lokasi intervensi yakni wilayah Desa Jembungan dan SD Negeri 2 Jembungan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis situasi yang dilakukan di tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak baik institusi, masyarakat dan sekolah?
2. Bagaimana identifikasi masalah kesehatan yang dilakukan di tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak?
3. Bagaimana penyusunan prioritas masalah yang dilakukan di tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak?
4. Apakah penyebab masalah kesehatan yang terjadi di tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak?
5. Bagaimana alternatif pemecahan masalah kesehatan yang dilakukan di tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak?

1.3 TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka dapat disusun tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengetahui situasi di tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak baik dalam lokus institusi, masyarakat, maupun komunitas.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak.
3. Mahasiswa mampu melakukan penyusunan prioritas masalah yang ada di tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak.
4. Mahasiswa mengetahui penyebab masalah kesehatan yang terjadi di tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak.

5. Mahasiswa dapat melakukan upaya yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah kesehatan yang ada di tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak.

1.4 MANFAAT

Manfaat yang ingin dicapai dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan ini antara lain:

1.4.1 Bagi Institusi

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan evaluasi pengelolaan sampah.

1.4.2 Bagi Sekolah

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seluruh warga SD Negeri 2 Jembungan mengenai pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah yang baik dan benar.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu menjadi masukan di dalam meningkatkan aspek pengetahuan dan sikap khususnya pada masyarakat dan para pemangku kepentingan di wilayah Desa Jembungan mengenai pentingnya pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

1.4.4 Bagi Mahasiswa

1. Sebagai bentuk penerapan dari ilmu-ilmu yang sudah didapatkan semasa waktu perkuliahan.
2. Mengetahui peran seorang Ahli Kesehatan Masyarakat pada saat di dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Sebagai sarana dalam melatih kemampuan, sikap, mental, serta keterampilan dalam menghadapi sebuah permasalahan di dunia industri yang sesungguhnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak.

1.4.5 Bagi Prodi Kesehatan Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai masalah kesehatan yang terdapat di 3 lokus, serta dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi pengembangan Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat kedepannya

1.5 RUANG LINGKUP

1.5.1 Ruang Lingkup Tempat

Praktik Kerja Lapangan (PKL) SKM Penggerak ini dilaksanakan pada 3 lokus, yakni:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, yang berada di Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Kebo Kenongo, Kemiri, Mojosongo, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah.
2. Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
3. SD Negeri 2 Jembungan, yang berada di Bantulan, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

1.5.2 Ruang Lingkup Waktu

Kegiatan yang dilakukan dalam Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak dimulai tanggal 1 Juli 2024 dan berakhir tanggal 20 Oktober 2024.

1.5.3 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak terfokus pada identifikasi masalah yang berada di tempat Praktik Kerja Lapangan pada bidang Kesehatan Masyarakat terutama Kesehatan Lingkungan.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 ANALISIS SITUASI

Analisis situasi bertujuan untuk mengetahui gambaran umum masyarakat serta permasalahan yang muncul di masyarakat. Pada ketiga lokus yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Desa Jembungan, dan SD Negeri 2 Jembungan, metode analisis yang digunakan serupa. Proses penelusuran informasi atau data sekunder diperoleh dari website resmi serta akun official social media dari masing-masing lokus. Informasi terkait situasi saat ini juga diperoleh dengan metode observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.

Pada lokus institusi yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali informasi terkait situasi terkini yang telah dilaksanakan oleh institusi diperoleh dari website resmi milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada laman <https://dlh.boyolali.go.id/>. Pada laman tersebut terlampir apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Hal ini juga diperoleh dengan dilakukannya wawancara dengan kepala bidang dan staf bagian Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Kemudian pada lokus masyarakat yakni Desa Jembungan Kecamatan Banyudono, informasi atau data sekunder diperoleh dari hasil wawancara bersama dengan kepala urusan pemerintahan Desa Jembungan, bidan, dan kader di Desa Jembungan. Informasi yang didapatkan berupa kondisi lingkungan serta situasi dari masyarakat di Desa Jembungan dan beberapa masalah kesehatan yang pernah terjadi atau sedang marak di desa tersebut. Selanjutnya, pada lokus sekolah data diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan bersama dengan kepala sekolah, bapak/ibu guru, serta siswa SD Negeri 2 Jembungan. Adapun informasi yang didapatkan berupa kondisi lingkungan sekolah, jumlah siswa dan siswi, serta masalah kesehatan yang ada di lingkup sekolah.

2.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah kesehatan merupakan bagian utama dari siklus pemecahan masalah, metode yang digunakan pada lokus institusi, masyarakat, dan sekolah yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Desa Jembungan, dan SD Negeri 2 Jembungan dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung ke lokus.

Pada lokus institusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sumber masalah kesehatan diperoleh dari data sekunder yang berasal dari laman resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali serta data primer yang diperoleh dari wawancara dengan salah satu staf di institusi tersebut. Informasi mengenai masalah juga diperoleh melalui kegiatan terjun lapangan, seperti monitoring dan evaluasi yang dilengkapi dengan data atau bukti sehingga dapat memberikan keyakinan. Di lokus masyarakat identifikasi masalah dilakukan dengan melihat data puskesmas, profil kesehatan, dan Satu Data Indonesia (SDI) serta observasi secara langsung di lokus dan wawancara bersama beberapa tokoh masyarakat seperti bidan dan para kader di Desa Jembungan. Kemudian di lokus sekolah yakni SD Negeri 2 Jembungan identifikasi masalah dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara dengan kepala sekolah, beberapa guru, dan murid di sekolah tersebut.

Identifikasi masalah kesehatan dilakukan dengan perencanaan dan melibatkan seluruh unsur terkait dari ketiga lokus yang menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak. Informasi yang diperoleh dengan data akurat sehingga dapat memberikan keyakinan. Hasil identifikasi masalah dikumpulkan kemudian akan dilakukan penentuan prioritas masalah kesehatan dengan metode Hanlon Kuantitatif.

2.3 PENYUSUNAN PRIORITAS MASALAH KESEHATAN

Penentuan prioritas masalah menjadi bagian penting dalam proses pemecahan masalah. Terbatasnya sumber daya yang tersedia pada ketiga lokus menyebabkan tidak semua masalah kesehatan dapat terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan prioritas masalah kesehatan dari beberapa masalah kesehatan yang telah teridentifikasi.

Diharapkan setelah dilakukannya penyusunan prioritas maka masalah kesehatan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Penyusunan prioritas masalah kesehatan di lokus masyarakat dan sekolah menggunakan metode Hanlon Kuantitatif. Metode Hanlon Kuantitatif merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk menentukan masalah yang harus diselesaikan dengan nilai dan bobot. Dalam metode ini, dilakukan skoring dengan nilai maksimum 1-10 atas serangkaian kriteria atau komponen yang ada yakni kriteria A, B, C, dan D (PEARL Faktor). Isu atau masalah kesehatan yang menjadi prioritas pertama adalah yang mempunyai nilai NPT (Nilai Prioritas Total) tertinggi. Berikut penjelasannya:

1. Kriteria/komponen A (Besaran Masalah), yaitu jumlah atau persentase (%) jumlah atau kelompok penduduk yang terdampak masalah, serta dapat juga berupa keterlibatan dan peran serta masyarakat atau instansi terkait. dengan skala 0-10 (kecil-besar).
2. Kriteria/Komponen B (Kegawatan Masalah), yaitu tingginya angka kesakitan dan kematian serta kecenderungan (*trend*) dari waktu ke waktu. Dengan skor 0-10 (tidak gawat-gawat).
3. Kriteria/Komponen C (Efektivitas/kemudahan dalam penanggulangan masalah), yakni dilihat dari perbandingan antara perkiraan hasil atau manfaat penyelesaian masalah yang akan diperoleh dengan sumber daya yang ada (tenaga, sarana/prasarana cara, dan metode) untuk menyelesaikan masalah. Dengan skor 0-10 (sulit-mudah).
4. Kriteria/Komponen D (PEARL Faktor), yaitu berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan dalam kemungkinan pelaksanaannya. Skor 0 = Tidak, dan 1 = Ya.

P (*Appropriateness*) : Kesesuaian masalah/alternatif dengan prioritas kebijakan program pemerintah/kegiatan instansi terkait.

E (*Economic Feasibility*) : Kelayakan dari segi pembiayaan, yaitu ada tidaknya biaya yang tersedia.

A (*Acceptability*) : Situasi penerimaan masyarakat dan instansi terkait/instansi di atasnya Kesesuaian dengan tata nilai yang ada di lingkungan.

R (*Resources Availability*) : Ketersediaan sumber daya untuk memecahkan masalah (tenaga, sarana-prasarana, peralatan dan waktu).

L (*Legality*) : Dukungan aspek-aspek hukum dan perundangan yang berlaku dan terkait. Kesesuaian dengan berbagai peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

2.4 IDENTIFIKASI PENYEBAB MASALAH KESEHATAN

Metode dalam mengidentifikasi penyebab masalah kesehatan dilakukan dengan metode curah pendapat (*brainstorming*) dan *fishbone* diagram atau *cause and effect* yang dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah, mengelompokkannya ke dalam berbagai kategori, dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari masalahnya. Kemudian dilakukan konsultasi untuk memeriksa kebenaran penyebab masalah.

2.5 PENYUSUNAN PRIORITAS PENYEBAB MASALAH KESEHATAN

Penentuan prioritas masalah digunakan untuk mengetahui sejauh mana masalah itu penting dan dapat teratasi. Tujuan dilakukannya penyusunan prioritas masalah adalah untuk melakukan pemecahan masalah yang relevan dan dapat dilakukan di institusi, masyarakat maupun di sekolah agar pelaksanaan kegiatan *inline* dengan program yang sudah ada. Penyusunan prioritas masalah kesehatan di institusi, masyarakat, dan sekolah dilakukan dengan menggunakan metode Hanlon Kuantitatif. Metode ini adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu-isu yang harus diselesaikan. Hal ini dilakukan dengan memberikan skor penilaian pada tiap masalah yang telah disusun dengan tabel. Pemberian skor dilakukan dengan melibatkan Penanggung Jawab setiap lokus. Pada metode ini diprioritaskan untuk membandingkan pentingnya suatu masalah dengan masalah lain melalui cara *matching* untuk tiap-tiap masalah, dengan 4 kriteria:

Kelompok A = Besarnya masalah

Kelompok B = Kegawatan Masalah

Kelompok C = Kemudahan dalam penanggulangan

Kelompok D = PEARL faktor (Dengan pemberian skor 1 = Ya dan skor 0 = Tidak)

P : *Proprietary*/Kewajaran

E : *Economic Feasibility*/Kelayakan ekonomis

A : *Acceptability*/Dapat diterima oleh masyarakat atau sasaran

R : *Resources*/Sumber daya

L : *Legality*/Apakah sumber hukum yang ada memungkinkan masalah untuk diatasi

2.6 IDENTIFIKASI ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN

Identifikasi alternatif pemecahan masalah kesehatan ditentukan setelah melakukan penyusunan prioritas penyebab masalah kesehatan. Alternatif pemecahan masalah kesehatan berisi mengenai beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi masalah kesehatan yang ada pada ketiga lokus. Identifikasi alternatif pemecahan masalah kesehatan ditentukan dengan metode diskusi kelompok kecil. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, antara lain terkait manfaat, keefektifan solusi, waktu, biaya, dan dukungan dari institusi maupun masyarakat.

2.7 PENYUSUNAN PRIORITAS PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN

Sebelum melakukan intervensi terhadap suatu masalah, perlu adanya penyusunan prioritas pemecahan masalah kesehatan dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Hal ini dilakukan untuk menentukan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program intervensi. Metode yang digunakan dalam penyusunan prioritas pemecahan masalah kesehatan pada Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak yakni dengan menggunakan metode CARL.

CARL adalah singkatan dari beberapa kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas masalah yang terdiri dari:

C = *Capability* yaitu ketersediaan sumber daya (dana, sarana dan peralatan)

A = *Accessibility* yaitu kemudahan, masalah yang ada mudah diatasi atau tidak.

Kemudahan dapat didasarkan pada ketersediaan metode/cara/teknologi serta penunjang pelaksanaan seperti peraturan atau juklak.

R = *Readiness* yaitu kesiapan dari tenaga pelaksana maupun kesiapan sasaran, seperti keahlian atau kemampuan dan motivasi.

L = *Leverage* yaitu seberapa besar pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain dalam pemecahan masalah yang dibahas.

Untuk mendapatkan nilai prioritas yaitu dengan cara mengalikan nilai masing-masing kriteria. Semakin tinggi nilai hasil perkalian maka semakin efektif pemecahan masalah tersebut.

2.8 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (PLAN OF ACTION) INTERVENSI BERSAMA REPRESENTASI STAKEHOLDERS

Plan of Action (PoA) adalah strategi jangka pendek untuk menyelesaikan masalah berdasarkan alternatif yang layak dan terpilih. Solusi yang dipilih kemudian dibuat menjadi program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk membuat rencana kegiatan. Hal ini harus dilakukan dengan melihat program yang sudah ada ketika melakukan dan menganalisis kegiatan dan sumber daya saat ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih program dengan tetap menjaga konsistensi dengan inisiatif kesehatan lembaga atau masyarakat saat ini. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan jika dilakukan secara partisipatif (dengan kerjasama dari para pemangku kepentingan). Penyusunan PoA menggunakan metode PoA matriks. Pada PoA matriks akan diuraikan kegiatannya, volume kegiatan, dana dan sumbernya, penanggung jawab kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

2.9 PELAKSANAAN INTERVENSI SEBAGAI UPAYA PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN

Setelah berakhirnya rangkaian kegiatan pada proses perencanaan, perlu adanya tindak lanjut yakni dengan dilakukannya intervensi untuk mengatasi masalah kesehatan yang mungkin ada dan terjadi di masyarakat sekitar, baik kelompok institusi maupun masyarakat umum.

Setelah kegiatan yang direncanakan berakhir, perlu dilakukan intervensi untuk mengatasi masalah kesehatan mendasar yang mungkin ada di masyarakat sekitar, baik

kelompok institusi maupun masyarakat umum. Intervensi yang dilakukan di ketiga lokus tentunya berbeda.

2.10 MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi atau biasa disebut dengan monev bertujuan untuk mempermudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Sedangkan, evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggali informasi dari sebuah program yang dilaksanakan untuk dianalisis, dinilai, diukur dan diambil kesimpulan atau keputusan. Dari hasil kesimpulan tersebut dapat terlihat bagaimana kelebihan dan kekurangan serta kendala dalam program yang telah dilaksanakan. Selain itu dengan dilaksanakannya monev diharapkan program yang berjalan dapat dikontrol dan dapat mengetahui kesesuaian prosedur, pengarahan, pedoman, kesulitan, tantangan, peluang, dan potensi untuk keberhasilan pencapaian tujuan.

Adapun metode yang digunakan dalam proses monev adalah melalui observasi langsung (*on the spot observation*). Langkah-langkah pelaksanaan monev tersusun dari monitoring dan evaluasi pada tahap awal program, tahap pelaksanaan program, dan tahap akhir program. kemudian, pada tahap evaluasi, menggunakan model model CIPP (*Context, Input, Process and Product*) yang pertama kali ditawarkan oleh Stufflebeam.

Adapun jenisnya dijelaskan oleh Stufflebeam beberapa tingkatan evaluasi CIPP sebagai berikut:

1. Evaluasi *context*, bertujuan untuk menilai apakah tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran program.
2. Evaluasi *input*, untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan dengan mencari hambatan dan potensi pada sumber daya yang tersedia.
3. Evaluasi *process*, bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi *product*, bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi indikator capaian program.

2.11 ADVOKASI KEPADA *STAKEHOLDERS*

Advokasi merupakan upaya atau proses terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal) dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencapai tujuan terlaksananya program.

Kegiatan advokasi dilaksanakan pembuatan policy brief yang ditujukan kepada institusi maupun masyarakat. Policy brief berisi tentang penyajian masalah kesehatan yang ada di wilayah kerja, lengkap dengan rencana program, dan pemecahannya. Kemudian permasalahan serta rekomendasi solusi dibahas bersama pemangku kebijakan, yang akhirnya diharapkan akan memperoleh perencanaan strategis, komitmen, dan dukungan terhadap program yang akan dilaksanakan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

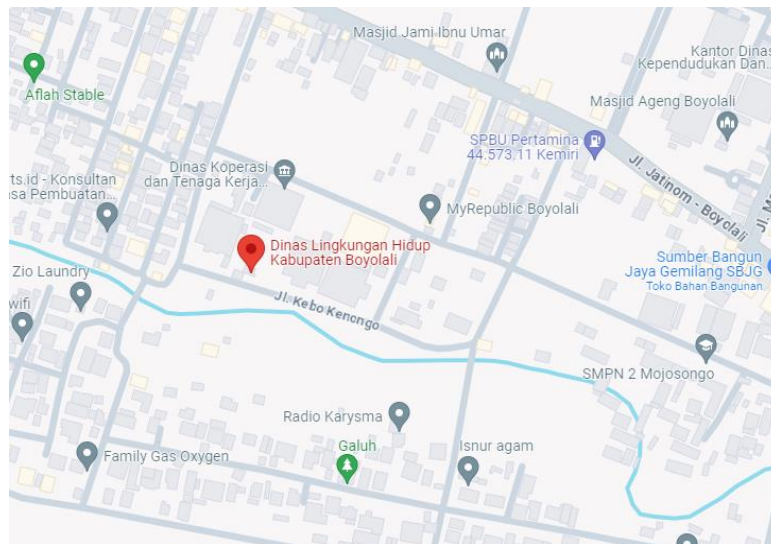
3.1 HASIL

3.1.1 ANALISIS SITUASI

3.1.1.1 Lokus Institusi



Gambar 3.1. 1 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali



Gambar 3.1. 2 Peta Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali merupakan *leading* sektor dalam menjalankan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali beralamat di Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Kebo Kenongo, Kemiri, Mojosongo, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tidak memiliki visi dan misi tersendiri, akan tetapi turut mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Boyolali sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 Kabupaten Boyolali.

Visi :

Dalam menjalankan urusannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terus berusaha untuk mendukung pencapaian visi: "Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi, Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (Metal)".

Misi :

Dalam rangka untuk mencapai visi pembangunan daerah dibutuhkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki 5 (lima) misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan yaitu :

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berpedoman pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Selain itu dalam menjalankan urusannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali juga berpedoman pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan

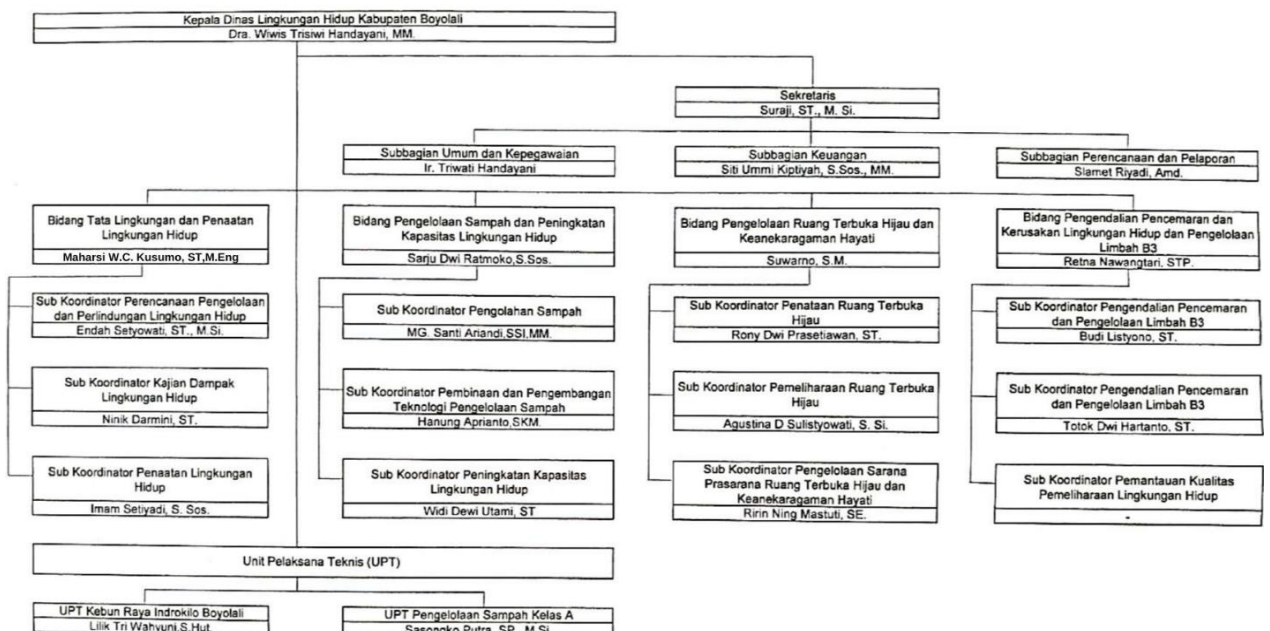
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali mempunyai tugas “Membantu Bupati Boyolali dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup”.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan Hidup.
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
5. Bidang Pengelolaan Ruang Keanekaragaman Hayati;
6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. UPT.

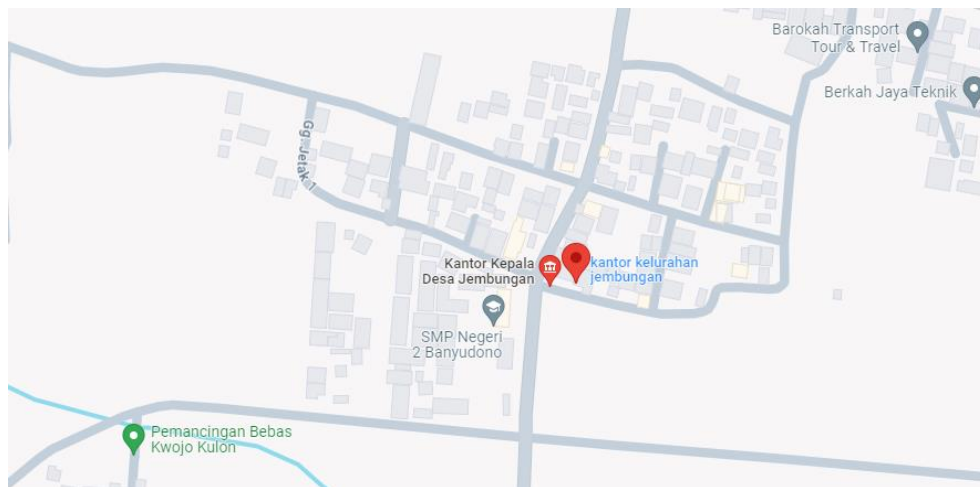
Gambar 3.1. 3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali



3.1.1.2 Lokus Komunitas



Gambar 3.1. 4 Kantor Desa Jembungan



Gambar 3.1. 5 Peta Lokasi Desa Jembungan

Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono merupakan salah satu wilayah di bagian selatan Kabupaten Boyolali. Tidak diketahui secara pasti kapan lahirnya Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali ini. Namun dari cerita

narasumber yaitu Bapak Sardiyoko mengatakan, dahulu pada waktu jaman penjajahan Belanda ada seorang utusan Keraton Surakarta yang bertugas menjadi kurir. Nama utusan tersebut adalah Kyai Jembung, dikarenakan Kyai Jembung masih mempunyai darah ningrat maka beliau memiliki kekuasaan untuk membangun rumah dimanapun dengan seizin Raja. Maka dibangunlah rumah di sebidang lahan kosong yang tepatnya berada di timur kraton pengging. Singkat waktu semulanya disana hanya ada rumah milik Kyai Jembung, lama-kelamaan banyak orang yang ikut membangun rumah dengan izin dari Kyai Jembung, di daerah yang dahulunya adalah ladang tanaman tebu. Karena jasanya Kyai Jembung yang pertama kali membuka lahan pertanian tersebut menjadi pemukiman, disetujui lah nama desa tersebut adalah Desa Jembungan yang diambil dari nama Kyai Jembung. Untuk sejarah berdirinya Kelurahan Jembungan menurut Bapak Lurah yaitu Bapak H. Sadiman, Dahulunya terdapat 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Jembungan dan Kelurahan Tempel, tetapi dikarenakan faktor wilayah yang berdekatan maka dijadikan satu pemerintahan yaitu Kelurahan Jembungan. Di sebelah utara Desa Jembungan berbatasan dengan Desa Kuwiran, di sebelah timur Desa Jembungan berbatasan dengan Desa Sambon, di sebelah selatan Desa Jembungan berbatasan dengan Desa Jipangan, sedangkan di sebelah barat Desa Jembungan berbatasan dengan Desa Bendan. Desa Jembungan memiliki 14 dusun.

Desa Jembungan menjalankan visi dan misi yaitu sebagai berikut :

Visi :

Terciptanya sistem Pemerintahan yang efektif, kreatif, transparan, demokratis dan berwibawa sehingga tercipta dan mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa serta menumbuh kembangkan jiwa kebersamaan persatuan rasa solidaritas antar masyarakat.

Misi :

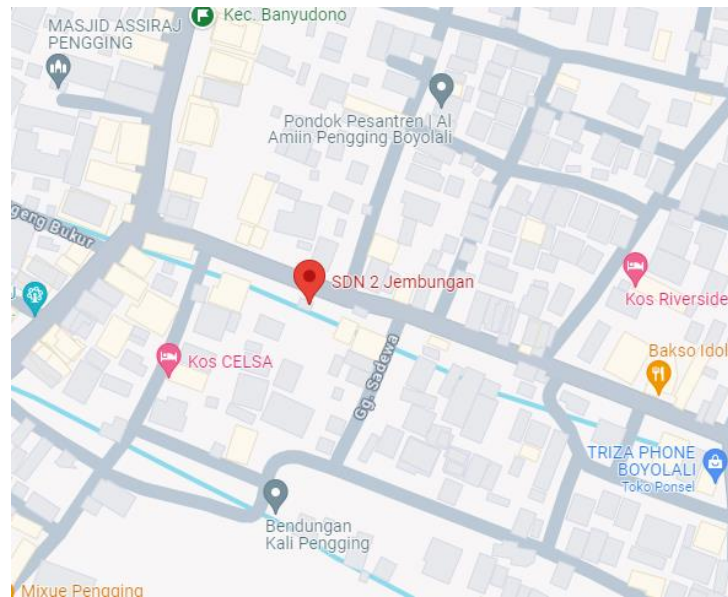
1. Menyelenggarakan sistem Pemerintahan yang bersih demokratis dan berwibawa
2. Pengembangan kemampuan administrasi, komunikasi dan informasi pembangunan desa

3. Penumbuhkembangkan kepemimpinan berbasis masyarakat, baik generasi muda wanita/penyetaraan gender
4. Peningkatan sumber daya manusia yang cerdas sehat berkualitas dan sejahtera, baik formal informal nonformal dan kesehatan
5. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar dan inter umat beragama sehingga terciptanya ketentraman, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama
6. Menitikberatkan pembangunan pada skala prioritas dalam kepentingan masyarakat umum
7. Peningkatan penghasilan ekonomi sehingga terciptanya kemakmuran masyarakat

3.1.1.3 Lokus Sekolah



Gambar 3.1. 6 SD Negeri 2 Jembungan



Gambar 3.1. 7 Peta Lokasi SD Negeri 2 Jembungan

Sekolah Dasar Negeri 2 Jembungan yang berlokasi di Dukuh Bantulan RT 04/RW 01 Desa Jembungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Sekolah ini merupakan satu dari 333 sekolah dasar yang berada di wilayah Kecamatan Banyudono. Sekolah ini berdiri pada tahun 1982 dengan jumlah peserta didik sebanyak 154 orang yang terdiri dari kelas I hingga kelas VI. Dengan jumlah peserta didik yang banyak tersebut, sekolah ini menjadi cukup diminati oleh masyarakat. Keadaan geografis SD Negeri 2 Jembungan berada di dataran rendah dengan letak berada di sebelah timur Kota Boyolali. Sekolah ini berada di dekat pasar dengan mayoritas dari wali murid juga bekerja sebagai pedagang. Selain itu, sebagian wali murid yang lain juga berprofesi sebagai karyawan perusahaan karena di wilayah Banyudono berdekatan dengan kawasan industri.

Karakteristik peserta didik SD Negeri 2 Jembungan memiliki keunikan masing-masing. Mereka memiliki kemampuan dan pengalaman belajar yang tidak sama. Sebagian siswa memiliki potensi di akademik, namun tidak sedikit juga siswa yang masih perlu dikembangkan kemampuan sosial dan emosional mereka. Setiap siswa juga memiliki potensi dan minat yang berbeda. Sebagian siswa memiliki minat di

bidang seni, olahraga, matematika, dan sains. Sekolah telah memfasilitasi kebutuhan mereka dengan menyiapkan program pengembangan potensi dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut antara lain pantomim, seni menggambar, seni musik, olahraga, dan pramuka. Selain kegiatan ekstrakurikuler tersebut, sekolah ini melakukan pembiasaan baik dan mengembangkan budaya positif untuk membentuk karakter siswa dengan profil Pancasila. Pembiasaan ini meliputi pembiasaan sapa, senyum dan salam, pembiasaan sholat dhuha, pembiasaan tadarus minimal 3 ayat sehari, pembiasaan membuang dan memilah sampah, pembiasaan mengucapkan pancasila dan menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran dimulai. Peserta didik juga dibiasakan untuk melaksanakan kegiatan literasi dengan membaca atau melakukan hafalan operasi bilangan (literasi numerik). Sekolah ini menerima siswa berkebutuhan khusus setelah melalui analisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Sekolah merancang program khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya.

SD Negeri 2 Jembungan memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Sekolah Yang Berkarakter, Terpuji, Unggul Dalam Prestasi, Berjiwa Mandiri.

Dengan indikator :

1. Terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia
3. Terwujudnya lulusan yang berkebhinekaan global
4. Terwujudnya lulusan yang bergotong royong
5. Terwujudnya lulusan yang mandiri
6. Terwujudnya lulusan yang bernalar kritis
7. Terwujudnya lulusan yang kreatif
8. Terwujudnya lulusan yang memiliki kompetensi literasi
9. Terwujudnya lulusan yang memiliki kompetensi numerasi

Misi :

1. Mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia
3. Mewujudkan lulusan yang berkebhinekaan global
4. Mewujudkan lulusan yang bergotong royong
5. Mewujudkan lulusan yang mandiri
6. Mewujudkan lulusan yang bernalar kritis
7. Mewujudkan lulusan yang kreatif
8. Mewujudkan lulusan yang memiliki kompetensi literasi
9. Mewujudkan lulusan yang memiliki kompetensi numerasi

3.1.2 IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN

Identifikasi masalah adalah proses dan hasil analisis dari mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang ada di setiap lokus. Identifikasi masalah kesehatan ini bertujuan untuk dapat mencegah gangguan kesehatan yang lebih serius. Dengan demikian, maka dapat segera dilakukan tindakan antisipasi dan penanganan yang sesuai untuk masalah kesehatan yang telah diidentifikasi.

3.1.2.1 Lokus Institusi

Lingkungan hidup merupakan sumber daya yang harus dilestarikan dan dikembangkan kualitasnya agar dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam pengembangannya agar selaras dan seimbang, diperlukan pembangunan untuk mengolah sumber daya yang ada. Namun, kenyataannya berbagai permasalahan lingkungan hidup terjadi di Kabupaten Boyolali beberapa tahun terakhir ini. Kualitas air sungai melebihi ambang batas dari baku mutu air yang ditetapkan dan mayoritas sungai bersifat periodik yang tidak kontinu ketersediaan airnya sepanjang tahun, sehingga sumber air baku banyak memanfaatkan air tanah. Hal lain adalah penurunan indeks kualitas udara, peningkatan jumlah timbunan sampah, peningkatan alih fungsi lahan, salah satunya diakibatkan oleh pembangunan jalan tol serta berbagai fenomena

alam akibat perubahan iklim yang semakin sering terjadi seperti cuaca ekstrim, banjir, dan kekeringan. Semua permasalahan lingkungan hidup tersebut memerlukan tindakanantisipasi dan penanganan secara komprehensif dan tepat sasaran.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan, timbulan sampah Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 mencapai sekitar 108.373,66 ton per tahun. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1,1 juta jiwa, dengan jumlah yang terus naik selama 16 tahun terakhir. Ditinjau dari data SIPSN, persentase jenis sampah terbanyak yaitu sampah plastik mencapai 37,5% dan persentase ini meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan volume sampah plastik ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya kebutuhan dan gaya hidup. Pembangunan ekonomi yang ada mempengaruhi gaya hidup masyarakat Boyolali, termasuk kurangnya kesadaran dalam peduli terhadap sampah. Hal tersebut dapat ditemukan dari kebiasaan masyarakat yang masih sering menggunakan kantong plastik ataupun botol minuman berbahan plastik.

Fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Boyolali meliputi TPA, TPS 3R, Bank Sampah, Komposting, dan Sektor Informal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali saat ini berencana untuk menghidupkan kembali TPS 3R yang tersebar di setiap kecamatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah yang dibawa ke TPA dan mendukung konsep ekonomi sirkular yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, dari hasil monitoring dan evaluasi didapatkan bahwa ada beberapa TPS 3R yang tidak aktif dikarenakan berbagai alasan seperti tidak adanya kepengurusan, kurangnya dana anggaran, sarana yang sudah rusak, serta kurangnya komitmen dari masyarakat.

Pada tahun 2023, Kabupaten Boyolali menghadapi berbagai tantangan pada sektor tata kelola lahan. Alih fungsi lahan persawahan menjadi jalan tol dan perluasan bandara Adi Soemarmo di Solo mengakibatkan pengurangan luas lahan sebesar 250 hektar. Kebakaran di Taman Nasional Gunung Merbabu menyebabkan kerusakan lahan seluas ±0,98 hektar. Di sekitar kawasan pemukiman Tegalrejo, Winong,

Kecamatan Boyolali, juga terjadi pembuangan limbah tanpa diolah seluas ± 1 hektar. Lahan sangat kritis ditemukan di kawasan hutan seluas 1000,53 hektar dan kawasan non hutan seluas 821,57 hektar. Selain itu, ditemukan 5 aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dengan total luas mencapai 8,1 hektar di wilayah Kecamatan Tamansari, Kecamatan Sambu, Kecamatan Klego, dan Kecamatan Cepogo.

Kualitas air menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi Kabupaten Boyolali. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari Indeks Kualitas Air (IKA) Boyolali pada tahun 2023 di angka 50 dari targetnya 58,92 dan termasuk dalam kategori kurang baik. Angka target yang harus dicapai untuk berada dalam kategori baik yaitu 70. Pada tahun 2023 hampir separuh wilayah Kabupaten Boyolali mengalami krisis air bersih akibat kekeringan dan musim kemarau. Sebanyak 10 dari total 22 kecamatan terdampak serta 4 kecamatan yaitu Kecamatan Wonosamodro, Wonosegoro, Kemusu, dan Tamansari, telah meminta bantuan air bersih karena kesulitan air bersih setiap tahunnya ketika musim kemarau. Kekeringan ini menyebabkan kualitas air sungai menurun secara signifikan, terutama di sungai-sungai seperti Sungai Gandul, Sungai Pepe, dan Sungai Cemoro. Pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan industri, peternakan, pertanian, dan aktivitas domestik juga semakin memperburuk kondisi sungai. Hasil pemantauan kualitas air menunjukkan peningkatan parameter-parameter pencemaran seperti COD, DO, dan Fecal Coliform, yang berdampak pada kualitas air yang tidak memenuhi standar. Peningkatan parameter pencemaran air sungai meningkatkan risiko penyebaran *waterborne diseases* di masyarakat, seperti diare, kolera, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri dan virus yang terkandung dalam air sungai. Berdasarkan data dari Dinkes Kabupaten Boyolali tahun 2022 penemuan kasus diare pada balita berusia 6 bulan hingga 5 tahun berjumlah 1.422 kasus.

Penurunan indeks kualitas udara juga merupakan isu lingkungan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Boyolali. Meskipun nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 82,55 masih dalam kategori "Baik", namun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 84,18. Hal ini dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah penduduk seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadi 20.881 unit pada Tahun 2023, peningkatan jumlah pengunjung pariwisata dan penurunan jumlah angkutan umum serta masih adanya perusahaan yang menggunakan bahan bakar batu bara, cangkang sawit, kayu solar, dan gas. Selain itu, terjadi penurunan signifikan pada jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR, dari 17.075 unit pada tahun 2019 menjadi hanya 8.486 unit pada tahun 2023. Dampak dari penurunan kualitas udara ini dapat dilihat dari adanya 442 kasus ISPA di Kabupaten Boyolali pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa perlunya upaya penanganan yang lebih intensif untuk memperbaiki kualitas udara.

Masalah lain yang dihadapi Kabupaten Boyolali adalah perubahan iklim dan kerawanan bencana. Perubahan iklim ini diperkuat dengan adanya beberapa peristiwa yang memicu perubahan iklim seperti kebakaran hutan dan lahan sebanyak 13 kali di delapan kecamatan meliputi Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Simo, Juwangi, dan Gladagsari. Bencana tanah longsor juga melanda 17 kecamatan dengan total 71 kejadian. Musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan parah di enam kecamatan yaitu Juwangi, Wonosegoro, Wonosamudro, Kemusu, Musuk, dan Tamansari, hingga ditetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Sementara itu, meskipun penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk aktivitas pertanian di Kabupaten Boyolali telah menunjukkan penurunan, angkanya masih tergolong tinggi, mencapai 36.516,93 ton pada tahun 2023.

3.1.2.2 Lokus Komunitas

Lingkungan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Teori H.L. Blum yang menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan dan 10% faktor genetika. Dengan kata lain, faktor lingkungan dalam hal ini seperti menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun yang terjadi saat ini banyak masyarakat yang melakukan pengobatan di fasilitas

kesehatan tetapi kebersihan lingkungan kurang diperhatikan. Sehingga di tengah-tengah kemajuan teknologi, masyarakat masih banyak menghadapi tantangan yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Berbagai permasalahan dapat ditemukan di masyarakat seperti keberadaan sampah, kurangnya ketersediaan lahan dan penyakit banyak muncul karena kebiasaan atau perilaku masyarakat yang kurang baik dalam memperhatikan lingkungan.

Salah satu desa yang berada di Kabupaten Boyolali, yaitu Desa Jembungan terdapat permasalahan sampah masih menjadi isu yang mendesak. Pengelolaan sampah yang belum optimal menjadi tantangan utama, tercermin dari tingginya timbulan sampah di Kabupaten Boyolali yang mencapai 298 ton per hari pada semester 1 tahun 2024, dengan hanya 105,74 ton per hari yang masuk ke TPA. Sementara itu di Kecamatan Banyudono, timbulan sampah domestik mencapai 163.599 m³ per hari pada tahun 2021 yang menunjukkan beban pengelolaan sampah yang signifikan.

Permasalahan sampah di masyarakat semakin kompleks dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi. Banyak ditemukan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, mengakibatkan penumpukan sampah di lingkungan sekitar seperti di jalan maupun sungai. Keberadaan TPS yang ada juga mengganggu kenyamanan warga karena menimbulkan bau tak sedap dan berdampak pada pencemaran lingkungan, akibatnya warga melakukan aksi penutupan TPS karena mulai mencemari sungai. Tidak hanya bau tak sedap, tumpukan sampah dapat mengurangi luas lahan serta berpotensi menimbulkan berbagai penyakit seperti DBD dan diare. Pengurangan luas lahan pertanian yang ada diakibatkan juga oleh pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta. Kecamatan Banyudono kehilangan lahan sawah seluas 67,7 Ha, dengan Desa Jembungan menjadi wilayah yang paling terdampak kehilangan lahan seluas 26,9 Ha. Hal ini berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Selain itu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah juga menjadi masalah. Masyarakat masih belum membiasakan melakukan pilah sampah. Pembakaran sampah juga masih ditemukan di desa. Menurut mereka dengan

membakar sampah akan mengurangi timbulan sampah yang ada, tetapi hal tersebut justru menimbulkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan.

Dari sisi kesehatan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang menonjol. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi ancaman dengan 19 kasus pada tahun 2022 dan 16 kasus ditemukan di Kecamatan Banyudono hingga September 2024. Diare juga menjadi masalah kesehatan yang signifikan, dengan 1.766 kasus pada tahun 2021 (termasuk 937 kasus pada balita) dan 663 kasus pada tahun 2023. Permasalahan stunting juga masih membutuhkan perhatian khusus. Pada tahun 2023, tercatat 5.019 balita atau 8,54 persen dari 58.765 balita yang ditimbang dan diukur mengalami stunting. Di Desa Jembungan sendiri, pada tahun 2024 terdapat 2 anak yang teridentifikasi mengalami stunting. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penanganan terpadu untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

3.1.2.3 Lokus Sekolah

SD Negeri 2 Jembungan yang berlokasi di Kecamatan Banyudono beresiko untuk menghadapi beberapa tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu permasalahan utama adalah pengelolaan sampah yang belum optimal, tercermin dari tingginya timbulan sampah di Kabupaten Boyolali yang mencapai 298 ton per hari pada semester 1 tahun 2024, dengan hanya 105,74 ton yang terkelola di TPA. Khusus di Kecamatan Banyudono sendiri, tercatat timbulan sampah domestik mencapai 163.599 m³ per hari pada tahun 2021, menunjukkan besarnya tantangan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Tantangan kesehatan lainnya adalah masih tingginya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah tersebut, dengan 19 kasus pada tahun 2022 dan 16 kasus hingga September 2024. Permasalahan gizi juga menjadi sorotan, mengingat di tingkat provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat 2.783 kasus gizi kurang dan gizi buruk, serta 522 kasus yang merupakan irisan antara stunting dan wasting. Di Kabupaten Boyolali sendiri, terjadi peningkatan kasus gizi buruk dari 13 kasus pada 2021 menjadi 16 kasus pada 2022.

Kasus diare juga masih menjadi perhatian serius dengan 1.766 kasus pada tahun 2021 di Kecamatan Banyudono, dimana 937 kasus di antaranya terjadi pada balita. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 663 kasus, angka ini masih cukup tinggi. Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah adanya ancaman NAPZA di kalangan remaja, dimana data tingkat provinsi Jawa Tengah menunjukkan 1,3% penduduk Jawa Tengah (sekitar 197.000 orang) terpapar narkoba, dengan mayoritas berusia 15-26 tahun. Hal ini diperkuat dengan data BNN Jawa Tengah yang mengungkap 25 tindak pidana narkotika dengan 28 tersangka pada tahun 2023.

3.1.3 PENYUSUNAN PRIORITAS MASALAH KESEHATAN

Metode Hanlon merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengurutkan atau menentukan prioritas masalah yang harus ditangani. Metode Hanlon ini digunakan dalam penentuan prioritas dengan dilakukannya teknik pemberian skoring (yang merupakan nilai maksimum dan berkisar antara 0 - 10) dengan kriteria A (Besaran masalah), B (Tingkat keseriusan masalah), C (Efektivitas intervensi/kemudahtindakan penanggulangan), dan PEARL (Kesesuaian, kelayakan ekonomi, dan penerimaan masyarakat, sumber daya, adanya aturan). Berikut tabel Hanlon pada tiap lokus:

3.1.3.1 Lokus Institusi

Beberapa permasalahan yang terdapat di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali di antaranya:

I. Komponen A: Ukuran/Besarnya Permasalahan Kesehatan

Tabel 3.1. 1 Komponen A Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Responden					Rata-rata
		1	2	3	4	5	
1	<p><i>Belum optimalnya pengelolaan sampah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ●Timbulan sampah Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 semester 1 mencapai sekitar 298 ton per hari, dengan rata-rata jumlah yang masuk ke TPA sebesar 105,74 ton per hari. ●Dari luas total blok aktif TPA sekitar 4,8 hektar, tersisa sebesar 1,2 hektar (25%) dan terdapat kenaikan jumlah sampah yang ditangani oleh TPA sebesar 1.505.625 kg pada tahun 2023. ●Pada tahun 2024 semester 1, persentase penanganan sampah di Kabupaten Boyolali masih di bawah target 69% yaitu sebesar 29,49%. ●Persentase sampah yang belum terkelola pada tahun 2024 semester 1 sebesar 67,68%. ●Pada tahun 2023, jumlah jenis timbulan sampah terbanyak adalah sampah plastik sebesar 37,5% lalu diikuti sisa makanan sebesar 32,2%. 	8	2	8	6	5	5.8

2	<p><i>Penurunan indeks kualitas lahan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ●Pengurangan luas lahan sebesar 897,471 hektar akibat alih fungsi lahan persawahan menjadi jalan tol Kulonprogo - Yogyakarta - Solo dan Tol Solo - Kertosono pada tahun 2023. ●Pada tahun 2023, kebakaran di Taman Nasional Gunung Merbabu yang mengakibatkan kerusakan lahan seluas ±0,98 hektar. ●Pada tahun 2023, terdapat pembuangan limbah tanpa diolah seluas ±1 hektar di sekitar kawasan pemukiman Tegalrejo, Winong, Kecamatan Boyolali. ●Terdapat lahan sangat kritis di kawasan hutan seluas 1000,53 hektar dan kawasan non hutan seluas 821,57 hektar pada tahun 2023. ●Pada tahun 2023 didapati 5 aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dengan total luas mencapai 8,1 hektar di wilayah Kecamatan Tamansari, Kecamatan Sambi, Kecamatan Klego dan Kecamatan Cepogo. ●Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 41,82 pada tahun 2023, nilai ini sudah meningkat dari tahun 2022 sebesar 38,71 namun masih termasuk dalam kategori kurang. 	8	3	6	5	7	5.8
---	--	---	---	---	---	---	------------

3	<p><i>Penurunan indeks kualitas air</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Angka Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 berada pada angka 50 dari target 58,92 dan dinilai kategorinya kurang baik. ● Angka rata-rata akses aman sanitasi Kabupaten Boyolali masih rendah yakni 3% di tahun 2023. Hal ini diakibatkan oleh tangki septik yang tidak terpelihara dengan baik. ● Hingga tahun 2023, tercatat dari 194 industri yang memiliki IPAL baru 85 industri. ● Pada tahun 2023, tercatat IPAL biogas peternakan meningkat menjadi 1.386 unit, tetapi hal ini tidak sebanding dengan jumlah sapi potong sebanyak 83.225 ekor yang menghasilkan limbah cair dari aktivitas peternakan. ● Penurunan luas Keramba Jaring Apung (KJA) menjadi 21.024 m² di Waduk Cengklik dan 22.230 m² di Waduk Kedung Ombo pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh limbah hasil aktivitas perikanan yang kebanyakan dihasilkan oleh penggunaan KJA. ● Pada tahun 2023, timbulan air limbah yang dihasilkan di Kabupaten Boyolali mencapai sekitar 104.654,384 m³/hari dari jumlah penduduk sebesar 1.090.129 jiwa. 	8	4	8	5	6	6.2
---	--	---	---	---	---	---	------------

4	<p><i>Penurunan indeks kualitas udara</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nilai IKU Tahun 2023 sebesar 82,55 atau masuk kategori “Baik” akan tetapi nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 84,18. Berdasarkan RENSTRA, nilai tersebut masih dibawah target yaitu sebesar 87,43. ● Peningkatan permukiman akibat penambahan jumlah penduduk sebesar 1.090.129 jiwa di tahun 2023 menimbulkan emisi gas buang yang menurunkan kualitas udara ambien. ● Peningkatan jumlah pengunjung akibat meningkatnya sektor pariwisata berpengaruh dalam peningkatan polutan gas buang kendaraan bermotor. Pengunjung objek wisata pada tahun 2023 mencapai 416.188 jiwa. ● Pada tahun 2023, terdapat 16 perusahaan dengan 27 sumber emisi berasal dari penggunaan bahan bakar batu bara, cangkang sawit, kayu solar, dan gas. ● Pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Boyolali tercatat sebesar 20.881 unit yang menggunakan bahan bakar bensin dan solar sehingga dapat menyebabkan emisi polutan udara. ● Kendaraan yang mengikuti uji KIR kendaraan pada tahun 2019 sebanyak 17.075 unit dan mengalami penurunan menjadi 8.486 unit pada tahun 2023. ● Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah angkutan umum seperti Angkudes hanya menjadi 58 unit, yang mana pada tahun 2019 berjumlah 210 unit. Bus AKDP pada tahun 2019 berjumlah 390 unit berkurang jumlahnya menjadi 62 unit. ● Pada tahun 2023 kasus ISPA di Kabupaten Boyolali berjumlah 18.186 kasus dan kasus TBC mengalami peningkatan menjadi 1.285 kasus dari tahun 2022 sebesar 663 kasus. 	7	4	8	4	7	6
---	--	---	---	---	---	---	----------

5	<p><i>Perubahan iklim dan kerawanan bencana</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pada tahun 2023, bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 13 kali di Kecamatan Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Simo, Juwangi, dan Gladagsari. ● Pada tahun 2023, terjadi bencana tanah longsor sebanyak 71 kali pada 17 Kecamatan. ● Pada tahun 2023 terdapat musim kemarau yang berdampak kekeringan pada 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Boyolali seperti Kecamatan Juwangi, Wonosegoro, Wonosamudro, Kemusu, Musuk, dan Tamansari hingga ditetapkan sebagai status siaga darurat bencana kekeringan. ● Penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk aktivitas pertanian di Kabupaten Boyolali tiap tahun sudah menunjukkan penurunan namun angkanya masih tinggi, mencapai 36.516,93 ton pada tahun 2023. 	8	4	7	5	8	6.4
---	--	---	---	---	---	---	------------

II. Komponen B : Tingkat Keseriusan Masalah

a. Responden 1

Tabel 3.1. 2 Responden 1 Komponen B Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesaan	Tingkat Keganasan/Keperahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata-rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	4	4	3	4	15	3.75
2	Penurunan indeks kualitas lahan	3	3	3	4	13	3.25
3	Penurunan indeks kualitas air	4	3	3	3	13	3.25
4	Penurunan indeks kualitas udara	3	2	2	2	9	2.25

5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	5	2	2	2	11	2.75
---	---------------------------------------	---	---	---	---	----	-------------

b. Responden 2

Tabel 3.1. 3 Responden 2 Komponen B Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesaan	Tingkat Keganasan/Keperahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata-rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	2	2	2	2	8	2
2	Penurunan indeks kualitas lahan	3	3	3	3	12	3
3	Penurunan indeks kualitas air	3	3	3	3	12	3
4	Penurunan indeks kualitas udara	2	2	2	2	8	2
5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	2	2	2	2	8	2

c. Responden 3

Tabel 3.1. 4 Responden 3 Komponen B Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesaan	Tingkat Keganasan/Keperahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata-rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	3	2	3	4	12	3
2	Penurunan indeks kualitas lahan	2	2	3	3	10	2.5
3	Penurunan indeks kualitas air	2	2	3	4	11	2.75
4	Penurunan indeks kualitas udara	2	2	3	3	10	2.5
5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	2	2	3	4	11	2.75

d. Responden 4

Tabel 3.1. 5 Responden 5 Komponen B Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesa kan	Tingkat Keganasan/ Keparahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata-rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	4	4	2	3	13	3.25
2	Penurunan indeks kualitas lahan	3	3	3	4	13	3.25
3	Penurunan indeks kualitas air	4	4	4	4	16	4
4	Penurunan indeks kualitas udara	3	3	3	3	12	3
5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	3	3	3	3	12	3

e. Responden 5

Tabel 3.1. 6 Responden 5 Komponen B Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesa kan	Tingkat Keganasan/ Keparahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata-rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	3	3	3	3	12	3
2	Penurunan indeks kualitas lahan	2	2	2	2	8	2
3	Penurunan indeks kualitas air	3	3	3	3	12	3
4	Penurunan indeks kualitas udara	4	4	4	4	16	4
5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	3	3	3	3	12	3

Hasil Total Skor Komponen B

Tabel 3.1. 7 Hasil Total Skor Komponen B Lokus Institusi

Identifikasi Masalah	Total
Belum optimalnya pengelolaan sampah	3
Penurunan indeks kualitas lahan	2.8
Penurunan indeks kualitas air	3.2

Penurunan indeks kualitas udara	2.75
Perubahan iklim dan kerawanan bencana	2.7

III. Komponen C: Efektivitas intervensi/kemudahtindakan penanggulangan

Tabel 3.1. 8 Komponen C Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Responden					Rata-rata
		1	2	3	4	5	
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	8	3	6	3	3	4.6
2	Penurunan indeks kualitas lahan	2	4	6	3	5	4
3	Penurunan indeks kualitas air	1	4	6	3	4	3.6
4	Penurunan indeks kualitas udara	5	4	6	3	7	5
5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	5	4	8	3	4	4.8

IV. Komponen D: Kriteria : PEARL

a. Responden 1

Tabel 3.1. 9 Responden 1 Komponen D Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1	1	1	1	1	1
2	Penurunan indeks kualitas lahan	1	1	1	1	1	1
3	Penurunan indeks kualitas air	1	0	1	0	0	0
4	Penurunan indeks kualitas udara	1	0	1	1	0	0
5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	1	0	0	1	0	0

b. Responden 2

Tabel 3.1. 10 Responden 2 Komponen D Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1	1	1	1	1	1
2	Penurunan indeks kualitas lahan	1	1	1	1	1	1
3	Penurunan indeks kualitas air	1	1	1	1	1	1
4	Penurunan indeks kualitas udara	1	1	1	1	1	1
5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	1	1	1	1	1	1

c. Responden 3

Tabel 3.1. 11 Responden 3 Komponen D Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1	1	1	1	1	1
2	Penurunan indeks kualitas lahan	1	1	0	1	1	0
3	Penurunan indeks kualitas air	1	1	1	1	1	1
4	Penurunan indeks kualitas udara	1	1	1	1	1	1
5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	1	1	1	1	1	1

d. Responden 4

Tabel 3.1. 12 Responden 4 Komponen D Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1	1	1	1	1	1
2	Penurunan indeks kualitas lahan	1	1	1	1	1	1
3	Penurunan indeks kualitas air	1	1	1	1	1	1
4	Penurunan indeks kualitas udara	1	1	1	0	1	0
5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	1	0	1	1	1	0

e. Responden 5

Tabel 3.1. 13 Responden 5 Komponen D Lokus Institusi

Identifikasi Masalah		Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1	1	1	1	1	1
2	Penurunan indeks kualitas lahan	0	1	1	1	1	0
3	Penurunan indeks kualitas air	1	1	1	1	1	1
4	Penurunan indeks kualitas udara	1	1	1	1	1	1
5	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	0	1	1	0	0	0

Hasil Total Skor Komponen D

Tabel 3.1. 14 Hasil Total Skor Komponen D Lokus Institusi

Identifikasi Masalah	Total
Belum optimalnya pengelolaan sampah	1
Penurunan indeks kualitas lahan	0
Penurunan indeks kualitas air	0
Penurunan indeks kualitas udara	0
Perubahan iklim dan kerawanan bencana	0

Hasil Total Skoring Analisis Prioritas Masalah

Tabel 3.1. 15 Hasil Total Skoring Analisis Prioritas Masalah Lokus Institusi

Identifikasi Masalah	Komponen				Skor Total	Urutan
	Besar Masalah	Kegawatan Masalah	Efektivitas	PEARL		
Belum optimalnya pengelolaan sampah	5.8	3	4.6	1	3.6	I
Penurunan indeks kualitas lahan	5.8	2.8	4	0	0	V
Penurunan indeks kualitas air	6.2	3.2	3.6	0	0	IV
Penurunan indeks kualitas udara	6	2.75	5	0	0	III
Perubahan iklim dan kerawanan bencana	6.4	2.7	4.8	0	0	II

Dari tabel prioritas masalah melalui metode hanlon yang telah diisi oleh 5 responden di lokus institusi, dapat dilihat bahwa yang menjadi prioritas masalah

kesehatan yang terdapat di lokus institusi yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali adalah belum optimalnya pengelolaan sampah. Maka, kelompok kami memutuskan untuk memilih masalah belum optimalnya pengelolaan sampah sebagai prioritas masalah yang ada di institusi.

3.1.3.2 Lokus Komunitas

Beberapa permasalahan yang terdapat di lingkup Desa Jembungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali di antaranya:

I. Komponen A: Ukuran/Besarnya Permasalahan Kesehatan

Identifikasi Masalah		Responden			Rata-rata
		1	2	3	
1	<p><i>Belum optimalnya pengelolaan sampah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ●Timbulan sampah Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 semester 1 mencapai sekitar 298 ton per hari, dengan rata-rata jumlah yang masuk ke TPA sebesar 105,74 ton per hari ●Pada tahun 2021, tercatat rata-rata timbulan sampah domestik di Kecamatan Banyudono sekitar 163.599 m³ per hari 	7	8	7	7.33
2	<p><i>Pengurangan luas lahan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ●Adanya pengurangan luas lahan sawah pada Kecamatan Banyudono seluas 67,7 Ha akibat dampak dari proyek pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta ●Luas terdampak terbesar dari pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta, yakni Desa Jembungan seluas 26,9 Ha 	9	6	6	7
3	<p><i>Tingginya kasus DBD</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ●Pada tahun 2022, penemuan kasus DBD pada Kecamatan Banyudono sebanyak 19 kasus ●Hingga bulan September 2024, penemuan kasus DBD pada Kecamatan Banyudono sebanyak 16 kasus 	7	8	6	7
4	<p><i>Tingginya kasus diare</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ●Pada tahun 2021, penemuan kasus diare pada Kecamatan Banyudono sebanyak 1.766 kasus semua kelompok umur dan 937 kasus balita ●Pada tahun 2023, penemuan kasus diare pada Kecamatan Banyudono sebanyak 663 kasus 	4	8	5	5.66

5	<p>Tingginya kasus stunting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan laporan pada 2023, jumlah balita dengan stunting sebanyak 5.019 balita atau 8,54 persen dari 58.765 balita yang ditimbang dan diukur • Dalam kurun tahun 2024, terdapat 2 anak yang terkena stunting di Desa Jembungan 	2	8	8	6
---	--	---	---	---	---

Tabel 3.1. 16 Komponen A Lokus Komunitas

II. Komponen B : Tingkat Keseriusan Masalah

a. Responden 1

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesa-kan	Tingkat Keganasan/ Keparahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata-rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	4	4	4	4	16	4
2	Pengurangan luas lahan	3	3	4	3	13	3.25
3	Tingginya kasus DBD	3	3	3	2	11	2.75
4	Tingginya kasus diare	2	2	2	2	8	2
5	Tingginya kasus stunting	2	2	2	2	8	2

Tabel 3.1. 17 Responden 1 Komponen B Lokus Komunitas

b. Responden 2

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesa-kan	Tingkat Keganasan/ Keparahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata-rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	4	4	3	4	15	3.75
2	Pengurangan luas lahan	3	3	4	3	13	3.25
3	Tingginya kasus DBD	4	3	4	4	15	3.75
4	Tingginya kasus diare	4	3	3	3	13	3.25
5	Tingginya kasus stunting	4	4	3	4	15	3.75

Tabel 3.1. 18 Responden 2 Komponen B Lokus Komunitas

c. Responden 3

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesa-kan	Tingkat Keganasan/Keperahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata-rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	4	4	3	4	15	3.75
2	Pengurangan luas lahan	3	3	4	3	13	3.25
3	Tingginya kasus DBD	4	3	4	4	15	3.75
4	Tingginya kasus diare	4	3	3	3	13	3.25
5	Tingginya kasus stunting	4	4	3	4	15	3.75

Tabel 3.1. 19 Responden 3 Komponen B Lokus Komunitas

Hasil Total Skor Komponen B

Identifikasi Masalah	Total
Belum optimalnya pengelolaan sampah	3.83
Pengurangan luas lahan	3.25
Tingginya kasus DBD	3.41
Tingginya kasus diare	2.83
Tingginya kasus stunting	3.16

Tabel 3.1. 20 Hasil Total Skor Komponen B Lokus Komunitas

III. Komponen C: Efektivitas intervensi/kemudahtidakan penanggulangan

Identifikasi Masalah		Responden			Rata-rata
		1	2	3	
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	2	6	6	4.66
2	Pengurangan luas lahan	5	8	8	7
3	Tingginya kasus DBD	7	6	6	6.33
4	Tingginya kasus diare	8	6	6	5.66
5	Tingginya kasus stunting	7	6	6	6.33

Tabel 3.1. 21 Komponen C Lokus Komunitas

IV. Komponen D: Kriteria : PEARL

a. Responden 1

Identifikasi Masalah		Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1	1	1	1	1	1
2	Pengurangan luas lahan	1	1	1	1	1	1
3	Tingginya kasus DBD	1	1	1	1	1	1
4	Tingginya kasus diare	1	1	0	1	1	0
5	Tingginya kasus stunting	1	1	1	1	1	1

Tabel 3.1. 22 Responden 1 Komponen D Lokus Komunitas

b. Responden 2

Identifikasi Masalah		Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	0	0	1	0	0	0
2	Pengurangan luas lahan	0	0	0	0	0	0
3	Tingginya kasus DBD	1	1	1	1	0	0
4	Tingginya kasus diare	0	0	0	1	0	0
5	Tingginya kasus stunting	1	0	0	1	0	0

Tabel 3.1. 23 Responden 2 Komponen D Lokus Komunitas

c. Responden 3

Identifikasi Masalah		Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	0	1	1	1	1	0
2	Pengurangan luas lahan	0	1	1	1	1	0
3	Tingginya kasus DBD	1	1	1	1	0	0
4	Tingginya kasus diare	0	1	0	1	0	0
5	Tingginya kasus stunting	1	1	1	1	0	0

Tabel 3.1. 24 Responden 3 Komponen D Lokus Komunitas

Hasil Total Skor Komponen D

Identifikasi Masalah	Total
Belum optimalnya pengelolaan sampah	0
Pengurangan luas lahan	0
Tingginya kasus DBD	0
Tingginya kasus diare	0
Tingginya kasus stunting	0

Tabel 3.1. 25 Hasil Total Skor Komponen D Lokus Komunitas

Hasil Total Skoring Analisis Prioritas Masalah

Identifikasi Masalah	Komponen				Skor Total	Urutan
	Besar	Kegawatan	Efektivitas	PEARL		

	Masalah	Masalah				
Belum optimalnya pengelolaan sampah	7.33	3.83	4.66	0	0	III
Pengurangan luas lahan	7	3.25	7	0	0	I
Tingginya kasus DBD	7	3.41	6.33	0	0	II
Tingginya kasus diare	5.66	2.83	5.66	0	0	V
Tingginya kasus stunting	6	3.16	6.33	0	0	IV

Tabel 3.1. 26 Hasil Total Skoring Prioritas Masalah Lokus Komunitas

Dari tabel prioritas masalah melalui metode hanlon yang telah diisi oleh 3 responden di lokus komunitas, dapat dilihat bahwa yang menjadi prioritas masalah kesehatan yang terdapat di lokus komunitas yakni Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali adalah pengurangan luas lahan. Namun, kelompok kami memutuskan untuk memilih masalah belum optimalnya pengelolaan sampah sebagai prioritas masalah yang ada di komunitas.

3.1.3.3 Lokus Sekolah

Beberapa permasalahan yang terdapat di lingkup SD Negeri 2 Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali di antaranya:

I. Komponen A: Ukuran/Besarnya Permasalahan Kesehatan

Identifikasi Masalah		Responden			Rata-rata
		1	2	3	
1	<p><i>Belum optimalnya pengelolaan sampah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Timbulan sampah Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 semester 1 mencapai sekitar 298 ton per hari, dengan rata-rata jumlah yang masuk ke TPA sebesar 105,74 ton per hari ● Pada tahun 2021, tercatat rata-rata timbulan sampah domestik di Kecamatan Banyudono sekitar 163.599 m³ per hari 	4	9	5	6

2	<p>Tingginya kasus DBD</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pada tahun 2022, penemuan kasus DBD pada Kecamatan Banyudono sebanyak 19 kasus ● Hingga bulan September 2024, penemuan kasus DBD pada Kecamatan Banyudono sebanyak 16 kasus 	3	9	5	5.66
3	<p>Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pada tahun 2023, jumlah kasus gizi kurang dan gizi buruk (wasting) di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.783, serta komposit data stunting dan wasting (irisasi) sejumlah 522 kasus ● Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Boyolali pada tahun 2022 sebanyak 16 kasus, jika dibandingkan dengan tahun 2021 (13 kasus), mengalami peningkatan sebanyak 3 kasus 	2	9	6	5.66
4	<p>Tingginya kasus diare</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pada tahun 2021, penemuan kasus diare pada Kecamatan Banyudono sebanyak 1.766 kasus semua kelompok umur dan 937 kasus balita ● Pada tahun 2023, penemuan kasus diare pada Kecamatan Banyudono sebanyak 663 kasus 	3	8	4	5
5	<p>Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pada tahun 2022, data menunjukkan 1,3% dari penduduk Jawa Tengah atau sekitar 197.000 orang terpapar narkoba, rata-rata berusia 15-26 tahun usia produktif (BNNP Jateng, 2022) ● Pada tahun 2023, BNN Jawa Tengah mengungkap 25 tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka 28 orang 	2	9	5	5.33

Tabel 3.1. 27 Komponen A Lokus Sekolah

II. Komponen B : Tingkat Keseriusan Masalah

a. Responden 1

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesa kan	Tingkat Keganasan/ Keparahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata-rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	3	2	2	2	9	2.25
2	Tingginya kasus DBD	4	3	1	1	9	2.25

3	Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih	3	2	1	1	7	1.75
4	Tingginya kasus diare	3	2	2	1	8	2
5	Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja	4	3	3	1	11	2.75

Tabel 3.1. 28 Responden 1 Komponen B Lokus Sekolah

b. Responden 2

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesa- kan	Tingkat Keganasan/ Keparahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata- rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1	1	1	2	5	1.25
2	Tingginya kasus DBD	3	3	2	3	11	2.75
3	Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih	2	1	2	2	7	1.75
4	Tingginya kasus diare	2	2	2	1	7	1.75
5	Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja	1	1	1	1	4	1

Tabel 3.1. 29 Responden 2 Komponen B Lokus Sekolah

c. Responden 3

Identifikasi Masalah		Tingkat Kemendesa- kan	Tingkat Keganasan/ Keparahan	Tingkat Kerugian Ekonomi	Potensi Peningkatan Insidensi	Jumlah Skor	Rata- rata
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	3	3	3	3	12	3
2	Tingginya kasus DBD	3	3	3	3	12	3
3	Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih	2	3	3	3	11	2.75

4	Tingginya kasus diare	3	3	3	3	12	3
5	Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja	4	3	4	3	14	3.5

Tabel 3.1. 30 Responden 3 Komponen B Lokus Sekolah

Hasil Total Skor Komponen B

Identifikasi Masalah	Total
Belum optimalnya pengelolaan sampah	2.16
Tingginya kasus DBD	2.66
Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih	2.08
Tingginya kasus diare	2.25
Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja	2.41

Tabel 3.1. 31 Hasil Total Skor Komponen B Lokus Sekolah

III. Komponen C: Efektivitas intervensi/kemudahtidakan penanggulangan

Identifikasi Masalah		Responden			Rata-rata
		1	2	3	
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	7	9	6	7.33
2	Tingginya kasus DBD	5	7	5	5.66
3	Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih	3	9	5	5.66
4	Tingginya kasus diare	7	9	5	7
5	Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja	3	10	6	6.33

Tabel 3.1. 32 Komponen C Lokus Sekolah

IV. Komponen D: Kriteria : PEARL

a. Responden 1

Identifikasi Masalah	Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------

1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1	0	1	1	1	0
2	Tingginya kasus DBD	1	0	1	1	1	0
3	Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih	1	0	1	1	1	0
4	Tingginya kasus diare	1	0	1	1	1	0
5	Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja	1	0	1	1	1	0

Tabel 3.1. 33 Responden 1 Komponen D Lokus Sekolah

a. Responden 2

Identifikasi Masalah		Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	0	0	1	1	1	0
2	Tingginya kasus DBD	1	1	1	1	1	1
3	Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih	0	0	1	1	1	0
4	Tingginya kasus diare	0	0	1	1	1	0
5	Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja	0	0	1	1	1	0

Tabel 3.1. 34 Responden 2 Komponen D Lokus Sekolah

b. Responden 3

Identifikasi Masalah		Termasuk Dalam Misi DLH?	Berdampak Pada Ekonomi?	Menjadi Perhatian Masyarakat?	Tersedia Sumber Daya?	Tersedia Aturan/UU untuk mengatasi?	Nilai
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1	1	1	1	1	1
2	Tingginya kasus DBD	0	1	1	1	1	0
3	Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih	0	1	1	1	1	0
4	Tingginya kasus diare	0	1	1	1	1	0
5	Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja	1	1	1	1	1	1

Tabel 3.1. 35 Responden 3 Komponen D Lokus Sekolah

Hasil Total Skor Komponen D

Tabel 3.1. 36 Hasil Total Skor Komponen D Lokus Sekolah

Identifikasi Masalah	Total
Belum optimalnya pengelolaan sampah	0
Tingginya kasus DBD	0
Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih	0
Tingginya kasus diare	0
Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja	0

Hasil Total Skoring Analisis Prioritas Masalah

Tabel 3.1. 37 Hasil Total Skoring Analisis Prioritas Masalah Lokus Sekolah

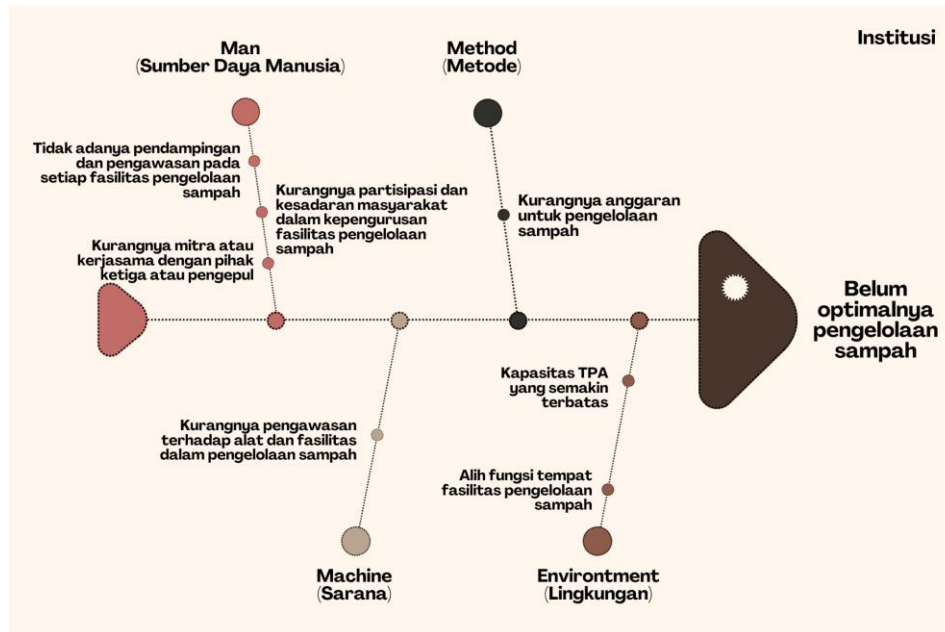
Identifikasi Masalah	Komponen	Skor	Urutan
----------------------	----------	------	--------

	Besar Masalah	Kegawatan Masalah	Efektivitas	PEARL	Total	
Belum optimalnya pengelolaan sampah	6	2.16	7.33	0	0	I
Tingginya kasus DBD	5.66	2.66	5.66	0	0	IV
Adanya kejadian gizi kurang dan gizi lebih	5.66	2.08	5.66	0	0	V
Tingginya kasus diare	5	2.25	7	0	0	II
Adanya kasus kejadian NAPZA di kalangan anak remaja	5.33	2.41	6.33	0	0	III

Dari tabel prioritas masalah melalui metode hanlon yang telah diisi oleh 3 responden di lokus sekolah, dapat dilihat bahwa yang menjadi prioritas masalah kesehatan yang terdapat di lokus sekolah yakni SD Negeri 2 Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali adalah belum optimalnya pengelolaan sampah. Maka, kelompok kami memutuskan bahwa masalah belum optimalnya pengelolaan sampah sebagai prioritas masalah yang ada di sekolah.

3.1.4 IDENTIFIKASI PENYEBAB MASALAH KESEHATAN

3.1.4.1 Lokus Institusi



Gambar 3.1. 8 Diagram Fishbone Institusi

1. Man (Sumber Daya Manusia)

Man merupakan faktor penyebab masalah yang berupa orang atau manusia. Penyebab masalah kesehatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berupa tidak adanya pendampingan pada setiap TPS 3R karena kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam kepengurusan TPS 3R. Kemudian, juga kurangnya mitra atau kerjasama dengan pihak ketiga atau pengepul, sehingga sampah yang terkumpul di TPS 3R menjadi menumpuk dan tidak segera terkelola terutama sampah anorganik. Oleh karena itu, faktor *man* ini sangat berkaitan dengan dukungan dari berbagai pihak, kurangnya peran aktif masyarakat akan berpengaruh pada kualitas SDM serta lancar tidaknya pelaksanaan suatu program.

2. Method (Metode)

Method atau metode merupakan salah satu faktor penyebab ketidakefektifan metode atau proses dalam pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari kurang maksimalnya pengawasan dalam cara mengelola sampah di setiap TPS 3R yang dapat

memungkinkan kekeliruan seperti membakar sampah dan sampah yang hanya dibiarkan tanpa dipilah. Selain itu, kurangnya anggaran dapat menghambat dalam optimalisasi pengelolaan sampah. Sehingga faktor *method/metode* ini berkaitan dengan teknis mengelola sampah yang dilakukan oleh masyarakat pada masing-masing daerah.

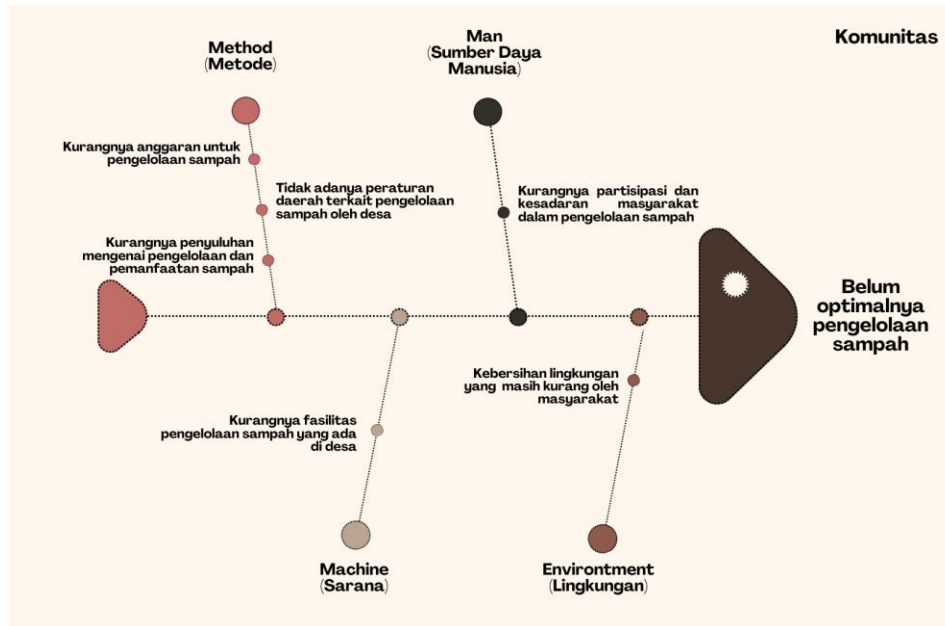
3. *Machine* (Sarana)

Faktor *machine* atau sarana di dalam program yang dilakukan untuk menangani permasalahan pengelolaan sampah yakni, kurangnya monitoring alat dan fasilitas dalam pengolahan sampah sehingga menyebabkan alat tersebut tidak berfungsi dengan baik dan alih fungsi fasilitas yang dapat mengakibatkan proses pengolahan sampah tidak terlaksana secara maksimal.

4. *Environment* (Lingkungan)

Environment adalah faktor yang disebabkan langsung dari lingkungan baik lingkungan tempat tinggal, maupun hal-hal lain yang mempengaruhi permasalahan kesehatan. Faktor lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang menyebabkan terjadinya masalah kesehatan adalah adanya alih fungsi tempat TPS 3R oleh masyarakat setempat serta keadaan TPA yang hampir melebihi kapasitas daya tampung sampah (tersisa 25% dari total luas blok sampah aktif TPA).

3.1.4.2 Lokus Masyarakat



Gambar 3.1. 9 Diagram Fishbone Komunitas

1. *Man* (Sumber Daya Manusia)

Man merupakan faktor penyebab masalah yang berupa orang atau manusia. Penyebab masalah kesehatan di Desa Jembungan berupa kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat ditinjau dari pelaksanaan fasilitas pengelolaan sampah seperti kepengurusan Bank Sampah yang tidak berjalan. Oleh karena itu, faktor *man* ini sangat berkaitan dengan dukungan dari berbagai pihak, kurangnya peran aktif masyarakat akan berpengaruh pada kualitas SDM serta kelancaran pelaksanaan suatu program.

2. *Method* (Metode)

Method atau metode merupakan salah satu faktor penyebab ketidakefektifan metode atau proses dalam pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari tidak adanya peraturan desa terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar sehingga dapat memungkinkan kekeliruan seperti membakar sampah dan membuang sampah tanpa dipilah. Selain itu, kurangnya anggaran serta pengadaan penyuluhan dan pelatihan dapat menghambat dalam optimalisasi pengelolaan sampah. Sehingga faktor

method/metode ini berkaitan dengan teknis mengelola sampah yang dilakukan oleh masyarakat pada masing-masing daerah.

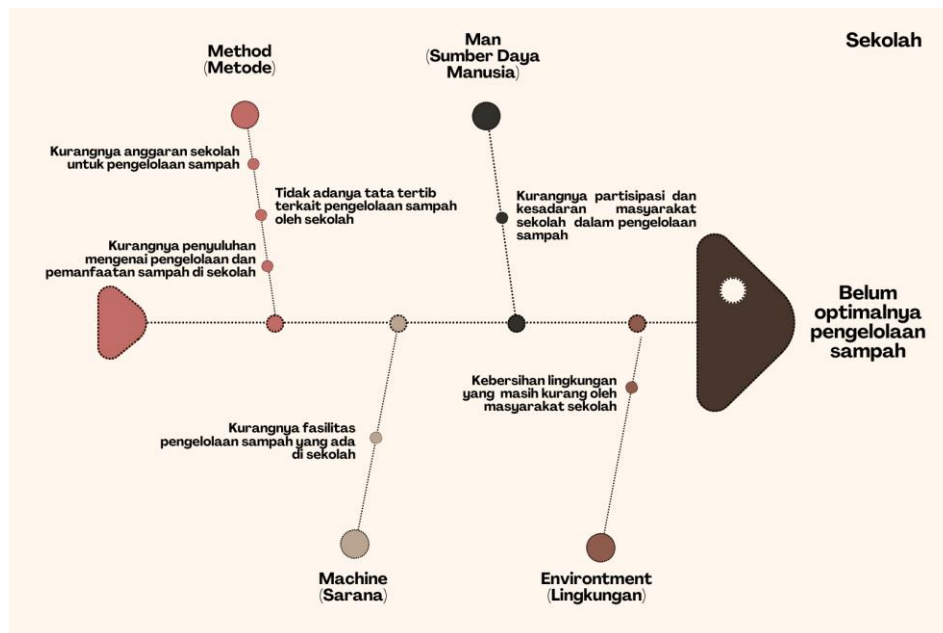
3. *Machine* (Sarana)

Faktor *machine* atau sarana di dalam program yang dilakukan untuk menangani permasalahan pengelolaan sampah yakni, kurangnya fasilitas dalam pengelolaan sampah seperti tidak adanya TPS 3R dan tidak berjalannya Bank Sampah sehingga proses pengelolaan sampah tidak terlaksana secara maksimal.

4. *Environment* (Lingkungan)

Environment adalah faktor yang disebabkan langsung dari lingkungan baik lingkungan tempat tinggal, maupun hal-hal lain yang mempengaruhi permasalahan kesehatan. Faktor lingkungan di Desa Jembungan Kecamatan Banyudono yang menyebabkan terjadinya masalah kesehatan adalah kebersihan lingkungan yang masih kurang oleh masyarakat setempat. Terlihat dari lingkungan sekitar persawahan, di bawah jembatan, dan pemukiman rumah warga yang masih banyak ditemukan sampah menumpuk dan berserakan.

3.1.4.3 Lokus Sekolah



Gambar 3.1. 10 Diagram Fishbone Sekolah

1. *Man* (Sumber Daya Manusia)

Man merupakan faktor penyebab masalah yang berupa orang atau manusia. Penyebab masalah kesehatan di SDN 2 Jembungan berupa kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat sekolah dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat ditinjau dari perilaku siswa yang membuang sampah tanpa dipilah meskipun sudah disediakan tempat sampah sesuai jenisnya. Oleh karena itu, faktor *man* ini sangat berkaitan dengan dukungan dari berbagai pihak, kurangnya peran aktif masyarakat sekolah akan berpengaruh pada kualitas SDM serta kelancaran pelaksanaan suatu program.

2. *Method* (Metode)

Method atau metode merupakan salah satu faktor penyebab ketidakefektifan metode atau proses dalam pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari tidak adanya tata tertib pengelolaan sampah sekolah yang baik dan benar sehingga dapat memungkinkan kekeliruan seperti membuang sampah tanpa dipilah. Selain itu, kurangnya anggaran serta pengadaan penyuluhan dan pelatihan di sekolah dapat menghambat dalam optimalisasi pengelolaan sampah. Sehingga faktor *method/metode* ini berkaitan dengan teknis mengelola sampah yang dilakukan oleh masing-masing sekolah.

3. *Machine* (Sarana)

Faktor *machine* atau sarana di dalam program yang dilakukan untuk menangani permasalahan pengelolaan sampah yakni, kurangnya fasilitas dalam pengelolaan sampah seperti tidak adanya komposter sebagai bentuk pemanfaatan sampah di sekolah sehingga proses pengelolaan sampah tidak terlaksana secara maksimal.

4. *Environment* (Lingkungan)

Environment adalah faktor yang disebabkan langsung dari lingkungan baik lingkungan tempat tinggal, maupun hal-hal lain yang mempengaruhi permasalahan kesehatan. Faktor lingkungan di SDN 2 Jembungan yang menyebabkan terjadinya masalah adalah kebersihan lingkungan yang masih kurang diperhatikan oleh masyarakat sekolah. Terlihat dari lingkungan sekitar tempat sampah, ruang kelas, dan kantin sekolah yang masih banyak ditemukan sampah berserakan.

3.1.5 PENYUSUNAN PRIORITAS PENYEBAB MASALAH

Penyusunan prioritas penyebab masalah yang digunakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Desa Jembungan, dan SD Negeri 2 jembungan menggunakan metode Hanlon Kuantitatif.

3.1.5.1 Lokus Institusi

a. Responden 1

Tabel 3.1. 38 Responden 1 Lokus Institusi

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Tidak adanya pendampingan dan pengawasan pada setiap fasilitas pengelolaan sampah	3	7	7	70	1	1	1	1	1	70	III
2.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan fasilitas pengelolaan sampah	8	7	7	105	1	1	0	1	1	0	V
3.	Kurangnya mitra atau kerjasama dengan pihak ketiga atau pengepul	8	7	7	105	1	1	1	1	1	105	II
4.	Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah	8	8	8	128	1	1	1	1	1	128	I
5.	Kurangnya pengawasan terhadap alat dan fasilitas dalam pengelolaan sampah	3	3	3	18	0	1	1	1	1	0	VI
6.	Alih fungsi tempat fasilitas pengelolaan sampah	3	3	3	18	0	0	0	0	0	0	VII
7.	Kapasitas TPA yang	8	8	8	128	1	0	1	1	1	0	IV

	semakin terbatas											
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Responden 2

Tabel 3.1. 39 Responden 2 Lokus Institusi

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Tidak adanya pendampingan dan pengawasan pada setiap fasilitas pengelolaan sampah	2	5	7	49	0	1	0	0	1	0	V
2.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan fasilitas pengelolaan sampah	8	8	8	128	1	1	1	1	1	128	I
3.	Kurangnya mitra atau kerjasama dengan pihak ketiga atau pengepul	5	6	7	77	1	1	1	1	1	77	IV
4.	Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah	8	8	8	128	1	1	1	1	1	128	II
5.	Kurangnya pengawasan terhadap alat dan fasilitas dalam pengelolaan sampah	3	3	3	18	0	0	0	0	0	0	VI
6.	Alih fungsi tempat fasilitas pengelolaan sampah	3	3	3	18	0	0	0	0	0	0	VII
7.	Kapasitas TPA yang semakin terbatas	8	8	8	128	1	1	1	1	1	128	III

c. Responden 3

Tabel 3.1. 40 Responden 3 Lokus Institusi

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Tidak adanya pendampingan dan pengawasan pada setiap fasilitas pengelolaan sampah	3	3	7	42	0	1	1	1	1	0	V
2.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan fasilitas pengelolaan sampah	8	8	7	112	1	1	1	1	1	112	I
3.	Kurangnya mitra atau kerjasama dengan pihak ketiga atau pengepul	7	6	6	78	0	1	1	1	1	0	IV
4.	Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah	8	8	8	128	1	0	1	1	1	0	III
5.	Kurangnya pengawasan terhadap alat dan fasilitas dalam pengelolaan sampah	5	3	3	24	0	1	1	1	1	0	VI
6.	Alih fungsi tempat fasilitas pengelolaan sampah	3	3	2	12	0	0	0	0	0	0	VII
7.	Kapasitas TPA yang semakin terbatas	9	8	8	136	1	0	1	1	1	0	II

d. Responden 4

Tabel 3.1. 41 Responden 4 Lokus Institusi

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Tidak adanya	2	5	7	49	1	1	1	1	1	49	IV

	kesadaran masyarakat dalam kepengurusan fasilitas pengelolaan sampah											
3.	Kurangnya mitra atau kerjasama dengan pihak ketiga atau pengepul	8	7	7	105	1	1	1	1	1	105	III
4.	Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah	8	8	8	128	1	1	1	1	1	128	I
5.	Kurangnya pengawasan terhadap alat dan fasilitas dalam pengelolaan sampah	3	4	3	21	0	1	1	1	1	0	VII
6.	Alih fungsi tempat fasilitas pengelolaan sampah	3	3	5	30	0	0	0	1	0	0	VI
7.	Kapasitas TPA yang semakin terbatas	8	9	8	136	1	0	1	1	1	0	IV

Rekap Hasil

Tabel 3.1. 43 Rekap Hasil Penyebab Masalah Lokus Institusi

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Tidak adanya pendampingan dan pengawasan pada setiap fasilitas pengelolaan sampah	2.6	5.4	7	56	0	1	0	0	1	0	V
2.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan fasilitas pengelolaan sampah	8	7.6	7.2	112.32	1	1	0	1	1	0	III
3.	Kurangnya mitra atau	6.8	6.6	6.8	91.1	0	1	1	1	1	0	IV

	kerjasama dengan pihak ketiga atau pengepul				2							
4.	Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah	8	8	8	128	1	1	0	1	1	0	II
5.	Kurangnya pengawasan terhadap alat dan fasilitas dalam pengelolaan sampah	3.8	3.2	3.6	25.2	0	0	0	0	0	0	VI
6.	Alih fungsi tempat fasilitas pengelolaan sampah	3	3	3.6	21.6	0	0	0	0	0	0	VII
7.	Kapasitas TPA yang semakin terbatas	8.2	8.2	8	131.2	1	0	1	1	1	0	I

3.1.5.2 Lokus Komunitas

a. Responden 1

3.1.44 Responden 1 Lokus Komunitas

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di desa	5	5	5	50	0	1	1	1	1	0	IV
2.	Tidak adanya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah oleh desa	3	3	5	30	0	1	1	1	1	0	VI
3.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	5	5	5	50	1	1	1	1	1	50	I
4.	Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah	5	5	5	50	0	1	1	1	1	0	V
5.	Kurangnya penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah	5	5	5	50	1	1	1	1	1	50	II

6.	Kebersihan lingkungan yang masih kurang oleh masyarakat	5	5	5	50	1	1	1	1	1	50	III
----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	-----

b. Responden 2

Tabel 3.1. 45 Responden 2 Lokus Komunitas

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di desa	8	8	4	64	0	1	1	1	1	0	IV
2.	Tidak adanya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah oleh desa	5	6	5	55	0	0	1	1	1	0	V
3.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	8	7	5	75	1	1	1	1	1	75	I
4.	Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah	8	5	4	52	0	1	1	1	1	0	VI
5.	Kurangnya penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah	5	4	5	45	1	1	1	1	1	45	II
6.	Kebersihan lingkungan yang masih kurang oleh masyarakat	5	5	4	40	1	1	1	1	1	40	III

c. Responden 3

Tabel 3.1. 46 Responden 3 Lokus Komunitas

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di desa	8	8	4	64	1	1	1	1	1	64	I
2.	Tidak adanya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah oleh desa	5	5	5	50	0	0	1	1	1	0	VI
3.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	7	7	3	42	1	1	1	1	1	42	V
4.	Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah	5	6	4	44	1	1	1	1	1	44	IV
5.	Kurangnya penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah	5	5	5	50	1	1	1	1	1	50	II
6.	Kebersihan lingkungan yang masih kurang oleh masyarakat	5	5	5	50	1	1	1	1	1	50	III

Rekap Hasil

Tabel 3.1. 47 Rekap Hasil Penyebab Masalah Lokus Komunitas

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di desa	7	7	4.3	60.2	0	1	1	1	1	0	IV
2.	Tidak adanya peraturan daerah terkait pengelolaan	4.3	4.6	5	44.5	0	0	1	1	1	0	VI

	sampah oleh desa												
3.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	6.6	6.3	4.3	55.47	1	1	1	1	1	55.47	I	
4.	Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah	6	5.3	4.3	48.59	0	1	1	1	1	0	V	
5.	Kurangnya penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah	5	4.6	5	48	1	1	1	1	1	48	II	
6.	Kebersihan lingkungan yang masih kurang oleh masyarakat	5	5	4.6	46	1	1	1	1	1	46	III	

3.1.5.3 Lokus Sekolah

a. Responden 1

Tabel 3.1. 48 Responden 1 Lokus Sekolah

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di sekolah	3	3	2	12	0	0	0	0	0	0	III
2.	Tidak adanya tata tertib terkait pengelolaan sampah oleh sekolah	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0	IV
3.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat sekolah dalam pengelolaan sampah	7	7	7	98	1	1	1	1	0	0	I
4.	Kurangnya anggaran sekolah untuk pengelolaan sampah	3	3	3	18	0	0	0	0	0	0	II

5.	Kurangnya penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah di sekolah	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0	V
6.	Kebersihan lingkungan yang masih kurang oleh masyarakat sekolah	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0	VI

b. Responden 2

Tabel 3.1. 49 Responden 2 Lokus Sekolah

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di sekolah	2	3	9	45	1	1	1	1	1	45	III
2.	Tidak adanya tata tertib terkait pengelolaan sampah oleh sekolah	2	2	8	32	1	0	1	1	1	0	VI
3.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat sekolah dalam pengelolaan sampah	2	3	8	40	1	1	1	1	1	40	IV
4.	Kurangnya anggaran sekolah untuk pengelolaan sampah	3	4	7	49	1	1	1	1	1	49	II
5.	Kurangnya penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah di sekolah	4	4	8	64	1	1	1	1	1	64	I
6.	Kebersihan lingkungan yang masih kurang oleh masyarakat sekolah	4	3	7	49	1	0	1	1	1	0	V

c. Responden 3

Tabel 3.1. 50 Responden 3 Lokus Sekolah

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		
1.	Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di sekolah	10	6	5	80	1	1	1	1	1	80	I
2.	Tidak adanya tata tertib terkait pengelolaan sampah oleh sekolah	6	6	6	72	0	1	1	1	1	0	IV
3.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat sekolah dalam pengelolaan sampah	6	6	6	72	1	0	1	1	1	0	V
4.	Kurangnya anggaran sekolah untuk pengelolaan sampah	5	5	5	50	1	1	1	1	1	50	III
5.	Kurangnya penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah di sekolah	6	6	6	72	1	1	1	1	1	72	II
6.	Kebersihan lingkungan yang masih kurang oleh masyarakat sekolah	5	5	5	50	0	0	1	1	1	0	VI

Rekap Hasil

Tabel 3.1. 51 Rekap Hasil Penyebab Masalah Lokus Sekolah

No	Daftar Masalah	Kriteria dan Bobot Maksimum				D (PEARL)					NPT	Prioritas Masalah
		A	B	C	NPD	P	E	A	R	L		

1.	Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di sekolah	5	4	5.3 3	47.9 7	0	0	0	0	0	0	II
2.	Tidak adanya tata tertib terkait pengelolaan sampah oleh sekolah	3.3 3	3.3 3	5.3 3	35.4 9	0	0	0	0	0	0	V
3.	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat sekolah dalam pengelolaan sampah	5	5.3 3	7	72.3 1	1	0	1	1	0	0	I
4.	Kurangnya anggaran sekolah untuk pengelolaan sampah	3.6 6	4	5	38.3	0	0	0	0	0	0	IV
5.	Kurangnya penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah di sekolah	4	4	5.3 3	42.6 4	0	0	0	0	0	0	III
6.	Kebersihan lingkungan yang masih kurang oleh masyarakat sekolah	3.6 6	3.3 3	4.6 6	32.5 7	0	0	0	0	0	0	VI

3.1.6 IDENTIFIKASI ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN

Identifikasi alternatif pemecahan masalah kesehatan ditentukan dengan metode diskusi kelompok kecil yang dilakukan oleh anggota Tim PKL dan dibantu oleh pembimbing lapangan dan beberapa staf dari masing-masing lokus. Metode ini merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka mengumpulkan gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua pihak yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, antara lain manfaat, keefektifan solusi, waktu, biaya, dan dukungan dari institusi maupun masyarakat.

3.1.6.1 Lokus Institusi

1. Membuat peta spasial yang berisi informasi tentang letak dan kondisi dari fasilitas TPA Winong pada tahun 2024 melalui aplikasi Arcgis.
2. Membuat publikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, terutama dari Bidang Persampahan.
3. Membantu menyusun laporan atau notulensi berbagai hasil kegiatan di Bidang Persampahan, antara lain yakni rapat internal dan sosialisasi.
4. Membuat peta spasial yang berisi informasi tentang letak fasilitas pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali seperti TPA, TPS 3R, Bank Sampah Unit, Bank Sampah Induk, Ruang Terbuka Hijau, Komposting, BSF, Biodigester, Sektor Informal (Pengepul), dan Lokasi Mudik.
5. Membantu mengolah dan menginput data pengurangan timbulan sampah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kabupaten Boyolali (SIPSN).
6. Membantu pelaksanaan program monitoring termasuk notulensi evaluasi TPS 3R di Kabupaten Boyolali.

3.1.6.2 Lokus Komunitas

1. Edukasi pembuatan eco-enzyme dengan media leaflet dan pengelolaan sampah rumah tangga dengan media poster yang ditujukan pada masyarakat Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.
2. Edukasi pengelolaan sampah rumah tangga melalui metode ceramah pada masyarakat Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.
3. Pelatihan pembuatan eco-enzyme bersama masyarakat Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.

3.1.6.3. Lokus Sekolah

1. Edukasi pentingnya pengelolaan sampah melalui metode ceramah pada siswa SD Negeri 2 Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.
2. Pelatihan pembuatan kerajinan sederhana dari sisa limbah yang memanfaatkan kreativitas para siswa SD Negeri 2 Jembungan.

3. Membuat poster dan aksesoris edukatif mengenai pengelolaan sampah di sekolah.

3.1.7 PENYUSUNAN PRIORITAS PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN

Penyusunan prioritas pemecahan masalah pada ketiga lokus dilakukan dengan menggunakan metode CARL, yakni *capability, accessibility, readiness, leverage*. Metode ini dilakukan dengan memilih alternatif jalan keluar yang disesuaikan dengan kemampuan setiap lokus serta tetap mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi alternatif jalan keluar.

3.1.7.1 Lokus Institusi

Tabel 3.1. 52 Pemecahan Masalah Lokus Institusi

No	Pemecahan Masalah	C	A	R	L	Nilai	Rank
1.	Membuat peta spasial yang berisi informasi tentang letak dan kondisi dari fasilitas TPA Winong pada tahun 2024	8	6	7	8	2688	IV
2.	Membantu menyusun laporan atau notulensi berbagai hasil kegiatan di bidang persampahan, antara lain rapat internal dan sosialisasi.	8	8	7	7	3136	I
3.	Membuat publikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, terutama dari Bidang Persampahan	8	7	7	7	2744	II
4.	Membantu pelaksanaan program monitoring termasuk notulensi evaluasi TPS 3R di Kabupaten Boyolali	8	7	7	7	2744	III
5.	Membuat peta spasial yang berisi informasi tentang letak fasilitas pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	8	6	7	8	2688	V
6.	Membantu mengolah dan menginput data pengurangan timbulan sampah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kabupaten Boyolali (SIPSN)	8	7	6	8	2688	VI

3.1.7.2 Lokus Komunitas

Tabel 3.1. 53 Pemecahan Masalah Lokus Komunitas

No	Pemecahan Masalah	C	A	R	L	Nilai	Rank
1.	Edukasi pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuatan eco-enzyme dengan media poster dan leaflet	8	8	7	7	3136	I
2.	Pelatihan pembuatan eco-enzyme bersama masyarakat	7	8	6	8	2688	III
3.	Edukasi pengelolaan limbah rumah tangga melalui metode ceramah	8	7	7	7	2744	II

3.1.7.3 Lokus Sekolah

Tabel 3.1. 54 Pemecahan Masalah Lokus Sekolah

No	Pemecahan Masalah	C	A	R	L	Nilai	Rank
1.	Edukasi pentingnya pengelolaan sampah melalui metode ceramah	8	7	7	8	3136	II
2.	Pelatihan pembuatan kerajinan sederhana dari sisa limbah yang memanfaatkan kreativitas para siswa	7	7	7	8	2744	III
3.	Membuat poster dan aksesoris edukatif mengenai pengelolaan sampah	9	7	8	7	3528	I

3.1.8 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (PLAN OF ACTION)

Penyusunan rencana kegiatan bertujuan agar pemecahan masalah kesehatan yang ada pada ketiga lokus dapat terlaksana secara sistematis dan terarah.

3.1.8.1 Lokus Institusi

Penyusunan rencana di lokus institusi sebagai upaya pemecahan masalah secara rinci ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. 55 PoA Lokus Institusi

Program	Kegiatan	Volume Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dan Sumber Dana	Waktu	Penanggung jawab	Indikator Kegiatan
Membuat peta spasial yang berisi informasi tentang letak	Koordinasi dengan anggota kelompok, identifikasi masalah, dan pembuatan	3 kali	-	Minggu 1	Putri	Koordinasi tim berjalan lancar, menemukan prioritas masalah

dan kondisi dari fasilitas TPA Winong pada tahun 2024.	rancangan program					dan suatu program sebagai solusi masalah.
	Penyusunan proposal	2 kali	-	Minggu 1	Putri	Latar belakang, tujuan, manfaat, dan rancangan program jelas.
	Perizinan, advokasi, dan diskusi menjalin kesepakatan atas program yang dibuat	1 kali	-	Minggu 2	Putri	Izin pelaksanaan kegiatan di lokus institusi, advokasi dan diskusi dengan stakeholder berjalan lancar, tercipta kesepakatan atas penyelenggaraan program.
	Menyusun jadwal kegiatan	1 kali	-	Minggu 2	Putri	Jadwal kegiatan sudah disusun oleh lokus institusi.
	Mempersiapkan intervensi	2 kali	-	Minggu 3	Putri	Persiapan dan penyiapan alat bahan terpenuhi dan tanpa kendala.
	Menyiapkan media intervensi	1 kali	-	Minggu 3	Putri	Menyiapkan media berupa <i>microsoft word</i> atau <i>google docs</i>
	Kegiatan intervensi	1 kali	-	Minggu 4-5	Putri	Kegiatan intervensi terlaksana dengan lancar sehingga semoga dapat bermanfaat dan memberikan perubahan yang lebih baik.
	Evaluasi intervensi	1 kali	-	Minggu 5	Putri	Evaluasi dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk pelaksanaan intervensi selanjutnya.

Membantu menyusun laporan atau notulensi berbagai hasil kegiatan di bidang persampahan, antara lain rapat internal dan sosialisasi.	Koordinasi dengan anggota kelompok, identifikasi masalah, dan pembuatan rancangan program	3 kali	-	Minggu 6	Putri	Koordinasi tim berjalan lancar, menemukan prioritas masalah dan suatu program sebagai solusi masalah.
	Penyusunan proposal	2 kali	-	Minggu 6	Putri	Latar belakang, tujuan, manfaat, dan rancangan program jelas.
	Perizinan, advokasi, dan diskusi menjalin kesepakatan atas program yang dibuat	2 kali	-	Minggu 6	Putri	Izin pelaksanaan kegiatan di lokus institusi, advokasi dan diskusi dengan stakeholder berjalan lancar, tercipta kesepakatan atas penyelenggaraan program
	Menyusun jadwal kegiatan	1 kali	-	Minggu 7	Putri	Jadwal kegiatan sudah disusun oleh lokus institusi.
	Mempersiapkan intervensi	2 kali	-	Minggu 7	Putri	Persiapan dan penyiapan alat bahan terpenuhi dan tanpa kendala.
	Menyiapkan media intervensi	1 kali	-	Minggu 7	Putri	Menyiapkan media berupa aplikasi arcgis
	Kegiatan intervensi	1 kali	-	Minggu 8-10	Putri	Kegiatan intervensi terlaksana dengan lancar sehingga semoga dapat bermanfaat dan memberikan perubahan yang lebih baik.
	Evaluasi intervensi	1 kali	-	Minggu 11	Putri	Evaluasi dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk pelaksanaan

						intervensi selanjutnya.
--	--	--	--	--	--	-------------------------

3.1.8.2 Lokus Komunitas

Penyusunan rencana di lokus komunitas sebagai upaya pemecahan masalah secara rinci ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. 56 PoA Lokus Komunitas

Program	Kegiatan	Volume Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dan Sumber Dana	Waktu	Penanggung jawab	Indikator Kegiatan
Edukasi pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuatan eco-enzyme dengan media poster dan leaflet	Koordinasi dengan anggota kelompok, identifikasi masalah, dan pembuatan rancangan program	3 kali	-	Minggu 12	Putri	Koordinasi tim berjalan lancar, menemukan prioritas masalah dan suatu program sebagai solusi masalah.
	Penyusunan proposal	2 kali	-	Minggu 12	Putri	Latar belakang, tujuan, manfaat, dan rancangan program jelas.
	Perizinan, advokasi, dan diskusi menjalin kesepakatan atas program yang dibuat	1 kali	-	Minggu 12	Putri	Izin pelaksanaan kegiatan di lokus masyarakat, advokasi dan diskusi dengan stakeholder berjalan lancar, tercipta kesepakatan atas penyelenggaraan program.
	Menyusun jadwal kegiatan	1 kali	-	Minggu 12	Putri	Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan intervensi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
	Mempersiapkan intervensi	1 kali	-	Minggu 13	Putri	Persiapan dan penyediaan alat

						bahan terpenuhi dan tanpa kendala.
	Menyiapkan media intervensi	1 kali	Rp 30.000 dari iuran tim	Minggu 13	Putri	Menyiapkan media berupa leaflet dan poster yang akan dibagikan kepada sasaran.
	Kegiatan intervensi	1 kali	-	Minggu 13		Kegiatan intervensi terlaksana dengan lancar dengan antusiasme yang tinggi dari sasaran. sehingga dapat bermanfaat dan memberikan perubahan baik pada sasaran itu sendiri.
	Evaluasi intervensi	1 kali	-	Minggu 13		Evaluasi dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk pelaksanaan intervensi selanjutnya.

3.1.8.3 Lokus Sekolah

Penyusunan rencana di lokus sekolah sebagai upaya pemecahan masalah secara rinci ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. 57 PoA Lokus Sekolah

Program	Kegiatan	Volume Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dan Sumber Dana	Waktu	Penanggung jawab	Indikator Kegiatan
Edukasi pentingnya pengelolaan sampah melalui metode	Koordinasi dengan anggota kelompok, identifikasi masalah, dan pembuatan rancangan program	3 kali	-	Minggu 13	Putri	Koordinasi tim berjalan lancar, menemukan prioritas masalah dan suatu program

ceramah						sebagai solusi masalah.
	Penyusunan proposal	2 kali	-	Minggu 13	Putri	Latar belakang, tujuan, manfaat, dan rancangan program jelas.
	Perizinan, advokasi, dan diskusi menjalin kesepakatan atas program yang dibuat	1 kali	-	Minggu 13	Putri	Izin pelaksanaan kegiatan di lokus sekolah, advokasi dan diskusi dengan stakeholder berjalan lancar, tercipta kesepakatan atas penyelenggaraan program.
	Menyusun jadwal kegiatan	1 kali	-	Minggu 13	Putri	Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan intervensi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
	Mempersiapkan intervensi	2 kali	-	Minggu 14	Putri	Persiapan dan penyediaan alat bahan terpenuhi dan tanpa kendala.
	Menyiapkan media intervensi	1 kali	-	Minggu 14	Putri	Menyiapkan media berupa <i>Microsoft Powerpoint</i>
	Kegiatan intervensi	1 kali		Minggu 14	Putri	Kegiatan intervensi terlaksana dengan lancar dengan antusiasme yang tinggi dari sasaran. sehingga dapat bermanfaat dan memberikan

						perubahan baik pada sasaran itu sendiri.
	Evaluasi intervensi	1 kali	-	Minggu 14-15	Putri	Evaluasi dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk pelaksanaan intervensi selanjutnya.

3.1.9 PELAKSANAAN INTERVENSI SEBAGAI UPAYA PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN

3.1.9.1 Lokus Institusi

Tabel 3.1. 58 Pelaksanaan Intervensi Lokus Institusi

No	Kegiatan	Bulan											
		Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi dengan anggota kelompok, identifikasi masalah, dan pembuatan rancangan program												
2	Penyusunan proposal												
3	Perizinan, advokasi, dan diskusi menjalin kesepakatan atas program yang dibuat												
4	Menyusun jadwal kegiatan												
5	Mempersiapkan intervensi												
6	Menyiapkan media intervensi												
7	Kegiatan intervensi												

8	Evaluasi intervensi											
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume Pelaksanaan	Sasaran	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Membuat peta spasial yang berisi informasi tentang letak dan kondisi dari fasilitas TPA Winong pada tahun 2024.	24 Juli-2 Agustus 2024	1 kali	Visitasi atau pengunjung TPA Winong	Putri	Tercapai
2	Membantu menyusun laporan atau notulensi berbagai hasil kegiatan di bidang persampahan, antara lain rapat internal dan sosialisasi.	28 Agustus-8 September 2024	1 kali	Staf Bidang Persampahan	Putri	Tercapai

3.1.9.2 Lokus Komunitas

Tabel 3.1. 59 Pelaksanaan Intervensi Lokus Komunitas

No	Kegiatan	September	Oktober			
		12	13	14	15	16
1	Koordinasi dengan anggota kelompok, identifikasi masalah, dan pembuatan rancangan program					
2	Penyusunan proposal					
3	Perizinan, advokasi, dan diskusi menjalin kesepakatan atas program yang dibuat					

4	Menyusun jadwal kegiatan					
5	Mempersiapkan intervensi					
6	Menyiapkan media intervensi					
7	Kegiatan intervensi					
8	Evaluasi intervensi					

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume Pelaksanaan	Sasaran	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Edukasi pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuatan eco-enzyme dengan media poster dan leaflet	6 Oktober 2024	1 kali	Ibu-Ibu Kader PKK RW 03 Desa Jembungan	Putri	Tercapai

3.1.9.3 Lokus Sekolah

Tabel 3.1. 60 Pelaksanaan Intervensi Lokus Sekolah

No	Kegiatan	Bulan Oktober			
		13	14	15	16
1	Koordinasi dengan anggota kelompok, identifikasi masalah, dan pembuatan rancangan program				
2	Penyusunan proposal				
3	Perizinan, advokasi, dan diskusi menjalin kesepakatan atas program yang dibuat				
4	Menyusun jadwal kegiatan				

5	Mempersiapkan intervensi					
6	Menyiapkan media intervensi					
7	Kegiatan intervensi					
8	Evaluasi intervensi					
No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume Pelaksanaan	Sasaran	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Edukasi pentingnya pengelolaan sampah melalui metode ceramah	11 Oktober 2024	1 kali	Para siswa kelas 5 SD Negeri 2 Jembungan	Putri	Tercapai

3.1.10 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam tahap evaluasi, menggunakan model evaluasi Context, Input, Process, dan Product (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

3.1.10.1 Lokus Institusi

Tabel 3.1. 61 Monev Lokus Institusi

Ruang Lingkup Evaluasi	Indikator	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
Context	SDM	Mahasiswa dan Pihak DLH	Terpenuhi
	Anggaran	Print out laporan dan notulensi	Terpenuhi
	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • Buku • Bolpoin 	Terpenuhi
Input	Perencanaan	Penyusunan perencanaan intervensi dari mahasiswa PKL	Terlaksana

	Persiapan	Koordinasi dengan pembimbing lapangan dan penentuan jadwal kegiatan	Terlaksana
	Pelaksanaan	Membantu menyusun laporan atau notulensi berbagai hasil kegiatan di bidang persampahan	Terlaksana
Process	Pengisian lembar notulensi dan laporan	Lembar notulensi dan laporan yang telah diisi atau diketik	Tercapai
Product	Menambah arsip internal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	Memudahkan dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali	Tercapai

Ruang Lingkup Evaluasi	Indikator	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
Context	SDM	Mahasiswa dan Pihak DLH	Terpenuhi
	Anggaran	Cetak peta TPA Winong Tahun 2024	Terpenuhi
	Sarana Prasarana	Laptop	Terpenuhi
Input	Perencanaan	Penyusunan perencanaan intervensi dari mahasiswa PKL	Terlaksana
	Persiapan	Koordinasi dengan pembimbing lapangan dan penentuan jadwal	Terlaksana

		kegiatan	
	Pelaksanaan	Membuat peta spasial TPA Winong pada tahun 2024	Terlaksana
Process	Pembuatan peta TPA Winong tahun 2024 melalui arcgis	Peta TPA Winong tahun 2024 yang telah siap dipasang di kantor UPT Pengelolaan Sampah	Tercapai
Product	Menambah arsip internal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	Memudahkan dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali	Tercapai

3.1.10.2 Lokus Komunitas

Tabel 3.1. 62 Monev Lokus Komunitas

Ruang Lingkup Evaluasi	Indikator	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
Context	SDM	Mahasiswa	Terpenuhi
	Anggaran	Rp 30.000 (Cetak leaflet dan poster)	Terpenuhi
	Sarana Prasarana	Leaflet dan poster	Terpenuhi
Input	Perencanaan	Penyusunan perencanaan intervensi dari mahasiswa PKL	Terlaksana
	Persiapan	Koordinasi dengan pembimbing lapangan dan penentuan jadwal	Terlaksana

		kegiatan	
	Pelaksanaan	Edukasi pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuatan eco-enzyme dengan media poster dan leaflet	Terlaksana
Process	Pemberian leaflet dan poster	Penyebaran informasi melalui leaflet dan poster	Tercapai
Product	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga dari 35% menjadi 85%.	Tercapai

3.1.10.3 Lokus Sekolah

Tabel 3.1. 63 Money Lokus Sekolah

Ruang Lingkup Evaluasi	Indikator	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
Context	SDM	Mahasiswa	Terpenuhi
	Anggaran	Doorprize	Terpenuhi
	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • Proyektor • Ruang kelas • Kursi dan meja • Kuis terkait pengelolaan sampah 	Terpenuhi
Input	Perencanaan	Penyusunan perencanaan intervensi dari mahasiswa PKL	Terlaksana

	Persiapan	Koordinasi dengan pembimbing lapangan dan penentuan jadwal kegiatan	Terlaksana
	Pelaksanaan	Edukasi pentingnya pengelolaan sampah melalui metode ceramah	Terlaksana
Process	Pemaparan materi, tanya jawab, dan sesi kuis berhadiah	Kuis tentang pengelolaan sampah yang sudah terjawab	Tercapai
Product	Meningkatnya pengetahuan siswa terkait pengelolaan sampah	Peningkatan pengetahuan siswa terkait pengelolaan sampah dari 45% menjadi 90%.	Tercapai

3.1.11 ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDER

3.1.11.1 Lokus Institusi

Pada lokus institusi telah dilakukan penyusunan notulensi berbagai hasil kegiatan di bidang persampahan mengenai pengelolaan sampah.

Tabel 3.1. 64 Analisis SWOT Lokus Institusi

Analisis SWOT			
Strength (S) Kekuatan	Weakness (W) Kelemahan	Opportunity (O) Peluang	Threat (T) Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam dokumentasi dan pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkonsistensi format pelaporan • Kurangnya koordinasi antara anggota tim • Keterbatasan waktu dalam proses penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pelaporan digital yang lebih terintegrasi • Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dokumentasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan regulasi yang mempengaruhi standar pelaporan • Risiko kehilangan atau kerusakan data akibat sistem yang tidak

<ul style="list-style-type: none"> • Adanya prosedur standar dalam penyusunan laporan • Tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti laptop dan sistem pengarsipan • Memiliki data historis yang dapat dijadikan referensi 	<p>laporan yang komprehensif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya validasi data sebelum dimasukkan ke dalam laporan 	<p>pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi untuk otomatisasi beberapa aspek pelaporan • Standardisasi format pelaporan di tingkat regional atau nasional 	<p>memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan pelaporan yang semakin kompleks dari pemangku kepentingan • Ketergantungan pada individu tertentu dalam proses penyusunan laporan • Kesulitan dalam memverifikasi akurasi data dari berbagai sumber
---	---	---	---

Pada lokus institusi telah dilakukan pembuatan peta TPA Winong Tahun 2024 yang memuat informasi tentang letak dan kondisi dari fasilitas persampahan di TPA.

Analisis SWOT			
Strength (S) Kekuatan	Weakness (W) Kelemahan	Opportunity (O) Peluang	Threat (T) Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan visualisasi yang jelas dan terstruktur mengenai tata letak dan kondisi fasilitas TPA • Memudahkan petugas dan stakeholder dalam memahami kondisi infrastruktur persampahan • Dapat digunakan sebagai acuan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar dalam proses pengumpulan data • Keterbatasan teknologi dan peralatan dalam proses pemetaan • Kemungkinan adanya kesulitan dalam mengakses beberapa area TPA untuk pendataan • Perlu update berkala untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diintegrasikan dengan sistem informasi pengelolaan sampah yang lebih luas • Berpotensi menjadi model percontohan bagi TPA lain dalam pengelolaan data fasilitas • Meningkatkan efisiensi dalam perencanaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kondisi lapangan yang cepat dapat membuat peta menjadi tidak relevan dalam waktu singkat • Resistensi dari petugas terhadap penggunaan sistem pemetaan baru • Risiko kerusakan atau kehilangan data jika tidak dikelola dengan baik

perencanaan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas TPA <ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah proses monitoring dan evaluasi kondisi fasilitas TPA secara berkala 	menjaga keakuratan informasi <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kemampuan teknis petugas dalam membaca dan menginterpretasi peta 	pemeliharaan dan pengembangan TPA <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan TPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi kesulitan dalam maintenance dan pembaruan data secara berkelanjutan
---	--	--	---

3.1.11.2 Lokus Komunitas

Pada lokus komunitas telah dilakukan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuatan eco-enzyme dengan media poster dan leaflet.

Tabel 3.1. 65 Analisis SWOT Lokus Komunitas

Analisis SWOT			
Strength (S) Kekuatan	Weakness (W) Kelemahan	Opportunity (O) Peluang	Threat (T) Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pembuatan dan distribusi yang relatif terjangkau • Dapat menjangkau audiens yang luas secara bersamaan • Informasi dapat ditampilkan secara visual menarik dengan kombinasi gambar dan teks • Materi edukasi bersifat permanen dan dapat dibaca berulang kali • Fleksibel dalam penempatan (dapat dipasang di 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan interaksi dua arah antara pemberi dan penerima informasi • Efektivitas bergantung pada minat baca masyarakat • Keterbatasan dalam memastikan pemahaman audience • Rentan mengalami kerusakan fisik (sobek, luntur, hilang) • Membutuhkan kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan • Dapat ditempatkan di lokasi-lokasi strategis (balai warga, posyandu, tempat umum) • Mendukung program pemerintah dalam pengurangan sampah • Bisa menjadi referensi jangka panjang bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetisi dengan media informasi digital yang lebih interaktif • Resistensi masyarakat terhadap perubahan kebiasaan pengelolaan sampah • Minimnya monitoring dan evaluasi program • Kemungkinan informasi tidak terbaca karena penempatan yang kurang strategis

berbagai lokasi strategis)	literasi yang memadai dari target audience		<ul style="list-style-type: none"> • Potensi informasi menjadi usang jika tidak diperbarui secara berkala
----------------------------	--	--	--

3.1.11.3 Lokus Sekolah

Pada lokus sekolah telah dilakukan edukasi pentingnya pengelolaan sampah melalui metode ceramah

Tabel 3.1. 66 Analisis SWOT Lokus Sekolah

Analisis SWOT			
Strength (S) Kekuatan	Weakness (W) Kelemahan	Opportunity (O) Peluang	Threat (T) Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjangkau banyak siswa sekaligus dalam satu waktu • Materi dapat disampaikan secara sistematis dan terstruktur • Tidak memerlukan banyak peralatan dan media pembelajaran yang kompleks • Waktu penyampaian dapat diatur sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi cenderung satu arah • Siswa menjadi pasif dan kurang terlibat • Tingkat penyerapan materi mungkin tidak maksimal • Sulit memastikan pemahaman individual siswa • Dapat menimbulkan kebosanan jika penyampaian kurang menarik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran yang meningkat tentang isu lingkungan di kalangan siswa • Dukungan dari kebijakan sekolah tentang pendidikan lingkungan hidup • Dapat dikombinasikan dengan metode pembelajaran lain • Materi dapat diperkaya dengan contoh kasus nyata • Dapat memanfaatkan media visual yang menarik 	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi bahwa pengelolaan sampah adalah hal sepele • Tantangan dalam mengubah kebiasaan dan perilaku siswa • Keterbatasan waktu penyampaian • Kompetisi dengan kegiatan sekolah lainnya • Perbedaan tingkat pemahaman dan minat siswa terhadap materi

3.2 PEMBAHASAN

3.2.1 PELAKSANAAN INTERVENSI

3.2.1.1 Lokus Institusi

Pembuatan peta spasial untuk fasilitas TPA Winong menggunakan aplikasi ArcGIS pada tahun 2024 sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menekankan pentingnya sistem informasi pengelolaan sampah yang terintegrasi. Intervensi pemetaan spasial ini merupakan implementasi dari konsep Geographic Information System (GIS) dalam pengelolaan sampah yang dikemukakan oleh Armanuos et al. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Landfill site selection using MCDM methods and GIS in the central part of the Nile Delta, Egypt" dan Al-Fares (2024) dengan penelitiannya berjudul "Optimal landfill site selection through the application of GIS analysis & geotechnical investigation", dimana pemanfaatan teknologi GIS dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam pemilihan lokasi TPA melalui visualisasi spasial yang komprehensif.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemantauan kondisi dan letak fasilitas TPA merupakan komponen krusial dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh studi Novianty et al. (2015) dalam Jurnal Geodesi Undip yang menunjukkan bahwa pemanfaatan GIS dalam pemetaan fasilitas persampahan dapat meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi kesesuaian letak dan kelayakan TPS dan TPA di Kota Semarang.

Berdasarkan panduan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) tentang Pengelolaan TPA Ramah Lingkungan, pemetaan spasial dengan ArcGIS memberikan beberapa keunggulan strategis, termasuk kemampuan untuk: (1) memvisualisasikan distribusi spasial komponen TPA, (2) menganalisis kesesuaian lahan, dan (3) memonitor perubahan kondisi TPA secara temporal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tendean et al. (2023) dalam Jurnal Spasial yang

membuktikan bahwa implementasi pemetaan spasial berbasis GIS dapat mengetahui tingkat kelayakan serta perkiraan kapasitas lahan TPA untuk 10 tahun yang akan datang.

Dalam konteks internasional, Asian Development Bank (2022) melalui "Integrated Solid Waste Management for Local Governments: A Practical Guide" merekomendasikan penggunaan teknologi GIS sebagai instrumen vital dalam pengelolaan sampah modern di Asia. Rekomendasi ini memperkuat urgensi pelaksanaan intervensi pemetaan spasial TPA Winong, yang sejalan dengan praktik terbaik global dalam pengelolaan fasilitas persampahan. Lebih lanjut, pelaksanaan intervensi ini juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, khususnya target terkait pengurangan dampak lingkungan perkotaan.

Pelaksanaan intervensi membantu menyusun laporan dan notulensi berbagai hasil kegiatan di instansi merupakan bagian penting dari manajemen administrasi perkantoran yang mendukung tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, pengelolaan dokumentasi kegiatan melalui laporan dan notulensi yang sistematis dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi et al. (2024) dalam Jurnal Administrasi Publik yang menemukan bahwa kualitas pengarsipan laporan kegiatan berkorelasi positif dengan efektivitas pengambilan keputusan. Proses penyusunan laporan dan notulensi yang terstandar juga berperan dalam *knowledge management* organisasi sebagaimana dikemukakan oleh BPPK Kemenkeu (2022), yang menunjukkan bahwa pendokumentasian kegiatan secara sistematis dapat memfasilitasi transfer pengetahuan antar unit kerja dan membantu proses pembelajaran organisasi.

3.2.1.2 Lokus Komunitas

Pelaksanaan intervensi edukasi pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuatan eco-enzyme dengan media poster dan leaflet sejalan dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari "kumpul-angkut-buang" menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pemilihan metode edukasi melalui media visual seperti poster dan leaflet didukung oleh temuan Angraini dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa penggunaan media edukasi visual meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah dibandingkan sebelum intervensi.

Komponen pembuatan eco-enzyme dalam intervensi ini merefleksikan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) tentang penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh studi Setiawan dkk. (2024), yang membuktikan bahwa pembuatan eco-enzyme dari sampah organik rumah tangga dapat mengurangi volume sampah hingga 30% dan menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Sejalan dengan hal tersebut, WHO dalam "Guidance on solid waste and health" (2024) menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan sampah yang mengintegrasikan aspek edukasi dan praktik langsung.

Pemilihan kombinasi media poster dan leaflet dalam intervensi didukung oleh penelitian Rosadi dkk. (2023), yang menemukan bahwa penggunaan multi-media dalam edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat terjadi peningkatan pengetahuan dengan nilai Sig (0,004)>0,05 dan peningkatan sikap dengan nilai Sig (0,031)>0,05. Aspek praktis dari intervensi ini, khususnya dalam pembuatan eco-enzyme, mendukung implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. Studi evaluasi yang dilakukan oleh Manyullei dkk. (2024) menunjukkan bahwa program edukasi yang mengkombinasikan pemberian informasi dengan praktik langsung meningkatkan keberhasilan adopsi perilaku pengelolaan sampah hingga dibandingkan hanya pemberian informasi saja.

Intervensi ini juga mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 11 dan 12 tentang kota berkelanjutan dan konsumsi-produksi

yang bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh temuan Sonia dkk. (2022) dalam Jurnal Kesehatan Lingkungan yang menunjukkan korelasi positif antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan tingkat partisipasi dalam program bank sampah di tingkat rumah tangga.

3.2.1.3 Lokus Sekolah

Pelaksanaan edukasi pengelolaan sampah melalui metode ceramah di sekolah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemilihan setting sekolah sebagai lokasi intervensi sesuai dengan teori Health Belief Model (HBM) yang dikemukakan oleh Rosenstock (1974), dimana pemberian edukasi pada usia sekolah dapat membentuk *perceived susceptibility* dan *perceived severity* yang baik terkait dampak pengelolaan sampah yang tidak tepat. Hal ini didukung oleh temuan Wisnah et al. (2023) dalam penelitiannya di SDN 9 Beroangin Kabupaten Pangkep yang menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan siswa tentang pengelolaan sampah setelah diberikan edukasi melalui metode ceramah sebesar 70%.

Penggunaan metode ceramah dalam penyampaian materi merujuk pada Pedoman Pengelolaan Sampah di Sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) yang menyebutkan bahwa metode ceramah efektif untuk memberikan pemahaman dasar kepada siswa. Sejalan dengan hal tersebut, studi yang dilakukan Rahmadani & Maghfiroh (2023) membuktikan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam memilah sampah organik dan anorganik. WHO dalam *The Physical School Environment* (2004) juga merekomendasikan pendekatan edukasi berbasis sekolah sebagai salah satu strategi efektif untuk menanamkan perilaku pengelolaan sampah yang baik sejak dini sebagai upaya mencegah masalah kesehatan.

3.2.2 EVALUASI

3.2.2.1 Lokus Institusi

Pembuatan peta spasial TPA Winong menggunakan ArcGIS pada tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam mendukung pengambilan keputusan pengelolaan sampah yang efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Febrianto et al. (2022) di TPA Bantar Gebang Jakarta yang menunjukkan bahwa visualisasi spasial dapat mengidentifikasi area-area kritis yang memerlukan penanganan prioritas serta membantu prediksi kebutuhan perluasan lahan. Pemanfaatan SIG untuk analisis spasial TPA juga terbukti efektif dalam studi Haratua et al. (2021) di TPA Sarimukti Bandung, dimana data spasial berkontribusi dalam optimalisasi rute pengangkutan dan estimasi masa pakai TPA. Pada level internasional, penelitian Malakahmad et al. (2020) di Malaysia memvalidasi bahwa pemetaan berbasis GIS dapat meningkatkan efisiensi operasional TPA hingga 27% melalui analisis data spasial yang komprehensif. Senada dengan hal tersebut, studi Hina et al. (2020) di Pakistan mengungkapkan bahwa ketersediaan data spasial TPA yang akurat membantu stakeholder dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, intervensi pemetaan spasial TPA Winong memiliki signifikansi yang kuat dalam mendukung *evidence-based policy making*, sebagaimana telah dibuktikan melalui berbagai studi empiris baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Pelaksanaan intervensi berupa penyusunan laporan dan notulensi berbagai kegiatan pengelolaan sampah di instansi merupakan langkah penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Hal ini sejalan dengan penelitian Zurbrügg (2013) yang menunjukkan bahwa dokumentasi sistematis terkait pengelolaan sampah dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan sistem. Dalam studinya di beberapa negara berkembang, mereka menemukan bahwa ketersediaan data dan laporan yang terstruktur memungkinkan analisis tren, evaluasi kinerja program, serta penilaian efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Senada dengan hal tersebut, penelitian Rohman et al. (2024) di Kota Bandung mengungkapkan bahwa sistem pencatatan dan

pelaporan yang baik berkontribusi pada peningkatan akurasi pengambilan keputusan dalam aspek teknis operasional persampahan. Notulensi rapat koordinasi antar stakeholder juga terbukti membantu membangun kesepahaman dan konsistensi implementasi kebijakan (Ismiartha dkk, 2022). Praktik serupa di Singapura sebagaimana dilaporkan oleh Zhang et al. (2010) mendemonstrasikan bahwa dokumentasi komprehensif kegiatan pengelolaan sampah memudahkan proses monitoring dan evaluasi program, yang pada gilirannya menghasilkan perbaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, intervensi penyusunan laporan dan notulensi secara sistematis dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif terkait kebijakan pengelolaan sampah.

3.2.2.2 Lokus Komunitas

Keberhasilan intervensi edukasi pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuatan eco-enzyme menggunakan media poster dan leaflet dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Meydina et al. (2021) di Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa edukasi pengelolaan sampah rumah tangga melalui media poster dan video efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat dari 59% menjadi 70%. Hal serupa juga ditemukan dalam studi Nurhayati dkk. (2022) di Kabupaten Tanah Datar dimana penggunaan media leaflet dalam penyuluhan pengelolaan sampah organik berhasil mengubah perilaku warga secara signifikan ($p=0.0005$). Penelitian Idrus et al. (2020) juga membuktikan efektivitas edukasi pembuatan eco-enzyme dari sampah dapur menggunakan media cetak dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat mengelola sampah organik rumah tangga. Keberhasilan intervensi edukasi ini tidak terlepas dari penggunaan media visual berupa poster dan leaflet yang memudahkan transfer pengetahuan. Hal ini didukung oleh teori pembelajaran visual yang dikemukakan oleh Mayer (2009) bahwa informasi yang disajikan dalam bentuk visual lebih mudah dipahami dan diingat dibandingkan informasi verbal semata. Selain itu, materi edukasi yang bersifat praktis dan aplikatif seperti pembuatan eco-enzyme memberikan pengalaman langsung bagi masyarakat sehingga lebih efektif dalam

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan prinsip pembelajaran *experiential learning*.

3.2.2.3 Lokus Sekolah

Pelaksanaan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui metode ceramah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa mengenai pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati et al. (2024) pada siswa SMA Nusantara Indah Sintang yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pengetahuan siswa tentang pengelolaan sampah setelah diberikan edukasi melalui metode ceramah (Asymp sig (2-tailed) $0,000 < 0,005$). Metode ceramah dipilih karena memungkinkan penyampaian informasi secara terstruktur dan dapat menjangkau banyak peserta dalam waktu bersamaan. Hasil serupa juga ditemukan dalam studi internasional oleh Boonchieng et al. (2023) di sekolah dasar Thailand, dimana intervensi kampanye berbasis ceramah berhasil meningkatkan pengetahuan siswa tentang pengelolaan limbah dari skor rata-rata pre-test 11,58 menjadi 12,23 pada post-test. Keberhasilan metode ceramah dalam meningkatkan pengetahuan didukung oleh penelitian Kristianato (2020) yang mengungkapkan bahwa penyampaian materi secara verbal yang disertai dengan contoh konkret dan diskusi interaktif dapat membantu peserta didik memahami konsep pengelolaan sampah dengan lebih baik. Peningkatan pengetahuan ini menjadi modal penting dalam membentuk perilaku positif siswa terhadap pengelolaan sampah, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Yuniarti et al. (2021) yang menemukan bahwa tingkat pengetahuan yang baik tentang pengelolaan sampah berkorelasi positif dengan perilaku membuang sampah sembarangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu di perkuliahan. Praktik Kerja Lapangan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja secara nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang akan dihadapi mahasiswa kedepannya setelah lulus kuliah.

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada lokus institusi, masyarakat, dan sekolah dapat disimpulkan, bahwa:

1. Dari permasalahan di lokus institusi, masyarakat dan sekolah mempunyai permasalahan yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah. Dengan di lokus institusi yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dilakukan intervensi melalui membuat peta spasial dan membantu menyusun laporan atau notulensi berbagai hasil kegiatan di bidang persampahan, di lokus masyarakat yakni Desa Jembungan dan di lokus sekolah yakni SD Negeri 2 Jembungan dilakukan edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar.
2. Berdasarkan analisis penyebab masalah yang dilakukan pada lokus institusi, masyarakat dan sekolah memiliki penyebab yang berbeda. Namun, masalahnya tetap fokus pada pengelolaan sampah. Pada lokus institusi prioritas penyebab masalah adalah kapasitas TPA yang semakin terbatas, sedangkan pada lokus komunitas dan sekolah prioritas penyebab masalahnya adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Solusi pemecahan masalah pada lokus institusi yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dengan membuat peta spasial TPA Winong pada tahun

2024 dan membantu menyusun laporan atau notulensi berbagai hasil kegiatan di bidang persampahan. Kemudian pada lokus masyarakat yaitu Desa Jembungan dilakukan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga dan pembuatan eco-enzyme dengan media poster dan leaflet dan pada lokus sekolah yaitu SD Negeri 2 Jembungan dilakukan edukasi pentingnya pengelolaan sampah melalui metode ceramah.

Sehingga melalui uraian dalam laporan ini, dapat disimpulkan dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi dalam mengerjakan pekerjaan secara tepat waktu karena telah menjadi tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dan diharapkan dapat terselesaikan dengan baik.

4.2 SARAN

4.2.1 Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas di Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kesehatan yang ada.

4.2.2 Bagi Masyarakat di Desa Jembungan

Diharapkan pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah, serta mengoptimalkan peran kader dalam mengajak masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik.

4.2.3 Bagi SDN 2 Jembungan

Diharapkan seluruh masyarakat sekolah khususnya para siswa dapat menyadari pentingnya pengelolaan sampah di sekolah. Pihak sekolah dapat meningkatkan edukasi mengenai lingkungan kepada para siswa serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fares, R. A. (2024). Optimal landfill site selection through the application of GIS analysis & geotechnical investigation. *Annals of GIS*, 30(3), 383–409. <https://doi.org/10.1080/19475683.2024.2390409>
- ANGRAINI, W., FEBRIAWATI, H., YANUARTI, R., FATMAWATI, T., & RIZAL, A. F. (2024). EFEKTIVITAS MEDIA EDUKASI VIDEO DAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI SMA NEGERI 11 KOTA BENGKULU. *Journal of Nursing and Public Health*, 12(1), 115-121.
- Armanuos, A. M., Elgaafary, K. A., & Gado, T. A. (2023). Landfill site selection using MCDM methods and GIS in the central part of the Nile Delta, Egypt. *Environmental monitoring and assessment*, 195(12), 1407. <https://doi.org/10.1007/s10661-023-11946-8>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2012). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2013). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. (2021). KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021.
- Boonchieng, W., Intawong, K., Wungrath, J., Thongprachum, A., Naksen, W., Settheekul, S., & Songsin, N. (2023). Development of a School-based Intervention Program for Waste Management in a Rural School in Northern Thailand. *The Open Public Health Journal*, 16(1).
- DLH Kabupaten Boyolali. (2021). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Boyolali.
- DLH Kabupaten Boyolali. (2023). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Boyolali.
- DLH Kabupaten Boyolali dan Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro. (2018). Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2028.

- Febrianto, N. D., Suryadinata, E., Amalia, Z., Hidayat, M. F., Yulistiani, R., & Arifin, S. (2022, February). Mapping Garbage Dump and Landfill in DKI Jakarta Using GIS (Geographic Information System) Technology. In 2022 International Conference on Science and Technology (ICOSTECH) (pp. 1-5). IEEE.
- Fokus Jateng. (2018). Warga Jetak Jembungan Banyudono Boyolali Ramai-Ramai Tutup TPS Sampah Liar.
- HARATUA, S. (2021). OPTIMALISASI RUTE PENGANGKUTAN SAMPAH MENGGUNAKAN PEMODELAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PADA WILAYAH OPERASIONAL KOTA BANDUNG. Prosiding FTSP Series.
- Hina, S. M., Szmerekovsky, J., Lee, E., Amin, M., Arooj, S. (2020). Effective municipal solid waste collection using geospatial information systems for transportation: A case study of two metropolitan cities in Pakistan, *Research in Transportation Economics*.
<https://doi.org/10.1016/j.retrec.2020.100950>
- Idrus, I. I., Ramli, M., Mappe, U. U. ., Amandaria, R., & Jusnawati, J. (2023). Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga Menjadi Eco-Enzyme . *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 287-294.
<https://doi.org/10.31960/caradde.v6i2.2163>
- Ismiartha, G. R., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2021). Analisis stakeholders dalam kegiatan pengelolaan sampah program kampung iklim (proklm) sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dusun soka, desa lerep, kecamatan ungaran barat, kabupaten semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 86-103.
- Jawa Pos. (2024). Kepala Batu! Masih Banyak Warga Buang Sampah di Kawasan Jembatan Jembungan Banyudono Boyolali.
- Kristianto, A. (2020). Pendampingan dan pelatihan pengelolaan limbah organik menjadi produk bernilai ekonomi di SMA Negeri 1 Bengkayang. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 190-197.
- Malakahmad, Amirhossein & Bakri, Putri & Mokhtar, Munirah & Khalil, Noordiana. (2013). Solid Waste Collection Routes Optimization via GIS Techniques in Ipoh City, Malaysia. *Procedia Engineering*. 77. 10.1016/j.proeng.2014.07.023.
- Manyullei, S., Handayani, S., Maipadiapati, A., Uais Syahputra, A., Ikram, M., Musdalifah, M., Imeldawaty, I., & Adzymi, I. (2024). Edukasi Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Metode Tatakura dan Eco Enzyme Pada Siswa SD 186 Karangn Kabupten Enrekang. *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 308–322.
<https://doi.org/10.31943/abdi.v6i2.176>
- Meydina, G. J., & Putri, A. T. (2021). Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 1(2), 35-45.

- Novianty, T. C., Sudarsono, B., & Subiyanto, S. (2015). ANALISIS GEOSPASIAL PERSEBARAN TPS DAN TPA DI KOTA SEMARANG MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (Studi Kasus TPS : Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Barat). *Jurnal Geodesi Undip*, 4(1), 235-243. <https://doi.org/10.14710/jgundip.2015.7671>
- Nurhayati, N., Oktavianis, O., Y, C., & Satria, B. (2020). Perbedaan Perilaku Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terhadap Pemberian Penyuluhan. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(2), 97-105. <https://doi.org/10.25077/jsa.6.2.97-105.2020>
- Nurhayati, N., Susilawati, S., & Chitra, F. (2024). EFEKTIFITAS PENYULUHAN DENGAN METODE CERAMAH TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI SMA NUSANTARA INDAH SINTANG KECAMATAN SINTANG TAHUN 2023. *Journal of Environmental Health and Sanitation Technology*, 3(1), 37-40.
- Profil Desa Jembungan. (2006). Pemerintah Desa Jembungan. <https://desajembungan.blogspot.com/>
- Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2023. (2023). Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.
- Rahmadani, H. R., Maghfiroh, H., & Rista, K. (2023). Peningkatan Kesadaran Lingkungan Melalui Pelatihan Pengelolaan Sampah Plastik Dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Siswa Kelas 7 SMPN 3 Wonosalam. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 188-203.
- Rencana Strategis DLH Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. (2021). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.
- Rohman, K. P., Marlina, L., & Awatara, I. G. P. D. (2024, August). ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI TPS 3R SUBANG ANTAPANI BANDUNG. In *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi" SainTek"* (Vol. 1, No. 2, pp. 631-640).
- Rosadi, D., Emelda, Z., Mustawan, E., Febrianita, D., & Adelina, I. D. A. Y. (2021). Pemberian Edukasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan Masyarakat di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar. *Selaparang*, 4(3), 678-683. *Satu Data Indonesia*. (2021). *Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Kab. Boyolali Tahun 2021*.
- Setiawan, M. I., Murdianingsih, A., Najmailya, F. N., Ramadhani, M., Sa'diah, H., Syifa, W., ... & Akbar, S. (2024). Sosialisasi Pembuatan Eco Enzyme Solusi Untuk Atasi Sampah Menjadi Pupuk Organik dan Pembersih Alami. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 3(4), 698-704.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kabupaten Boyolali. (2023). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Sonia, N. K. H., Aryana, I. K. K., & Jana, I. W. W. (2022). HUBUNGAN

- TINGKAT PENGETAHUAN DAN PEKERJAAN KEPALA KELUARGA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANK SAMPAH (Studi Dilaksanakan di Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2022. *Jurnal Kesehatan Lingkungan (JKL)*, 12(1), 7-16.
- Tendean, P. C., Kindangen, J. I., & Egam, P. P. (2023). EVALUASI KELAYAKAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN. *SPASIAL*, 11(1), 27-38.
- Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. (2020). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. <https://dlh.boyolali.go.id/>
- Widhi, Z. H., Riptanti, E. W., & Khairiyakh, R. (2024). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Surakarta – Yogyakarta Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 8 (2), 771-784. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.02.30>
- Wisnah, W., Ismah, A., Arsjad, N. F. A., Maisarah, H., A, A., Syarifuddin, S. N. B., Marzuki, D. S., & Manyullei, S. (2023). Sosialisasi dan Simulasi Pemilahan Sampah di SDN 9 Beroangin, Kelurahan Mangallekana, Kabupaten Pangkep Tahun 2023. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 348–354. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i3.383>
- World Health Organization. (2024). Guidance on solid waste and health.
- Yuniarti, T., Nurhayati, I., Putri, A. P., & Fadhilah, N. (2020). Pengaruh pengetahuan kesehatan lingkungan terhadap pembuangan sampah sembarangan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 78-82.
- Zhang, D., Keat, T, S., Gersberg, R, M. (2010). A comparison of municipal solid waste management in Berlin and Singapore. *Waste Management*. Volume 30, Issue 5, Pages 921-933, <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2009.11.017>.
- Zurbrügg, Christian. (2013). Urban solid waste management in low-income countries of Asia - how to cope with the garbage crisis.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pelaksanaan PKL

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
 Jl. Kebo Kenongo Telp (0276) 321013, 320031, Faks (0276) 321013 Kemiri,
 Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 420/43&4 /4.8/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : SURAJI, ST., MSi.
- b. Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

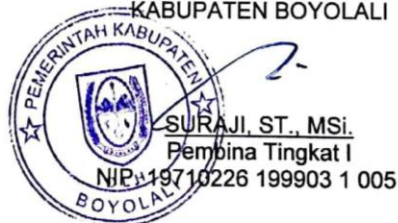
Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : PUTRI AULIA R.
- b. NIM : 6411421093
- c. Prodi : Sarjana Kesehatan Masyarakat
- d. Alamat : Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang (UNNES).
- e. Maksud : Yang bersangkutan telah melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) MBKM "SKM Penggerak" di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada tanggal 01 Juli s.d. 28 September 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Boyolali, 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan kepada Yth.:

1. Kaprodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang (UNNES);
2. Arsip.

Lampiran 2. Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir

a. Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Lokus Institusi

**BERITA ACARA PENYERAHAN
LAPORAN AKHIR PKL MBKM SKM PENGGERAK
PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pada hari Jumat, tanggal 25, bulan Oktober, tahun 2024, bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, telah diserahkan Laporan Akhir PKL MBKM SKM Penggerak Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dalam bentuk cetak sebanyak 1 eksemplar, dengan:

Judul : Optimalisasi Pengelolaan Sampah (OPAH) sebagai Upaya Zero Waste di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
 Nama Mahasiswa : Putri Aulia Rahman
 NIM : 6411421093
 Lokus : 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali 2) Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono 3) SD Negeri 2 Jembungan
 Pembimbing Akademik : Arum Siwicndrayanti, S.KM., M.Kes
 Pembimbing Lapangan : Hanung Aprianto, S.KM

Yang Menerima


Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Boyolali
Suraji, S.T., M.Si
NIP. 197102261999031005

Yang Menyerahkan

Mahasiswa,


Putri Aulia Rahman
NIM 6411421093



b. Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Lokus Komunitas

**BERITA ACARA PENYERAHAN
LAPORAN AKHIR PKL MBKM SKM PENGGERAK
PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pada hari Jumat, tanggal 25, bulan Oktober, tahun 2024, bertempat di Desa Jembungan, telah diserahkan Laporan Akhir PKL MBKM SKM Penggerak Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dalam bentuk cetak sebanyak 1 eksemplar, dengan:

Judul : Optimalisasi Pengelolaan Sampah (OPAH) sebagai Upaya Zero Waste di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
 Nama Mahasiswa : Putri Aulia Rahman
 NIM : 6411421093
 Lokus : 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali 2) Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono 3) SD Negeri 2 Jembungan
 Pembimbing Akademik : Arum Siwicndrayanti, S.KM., M.Kes
 Pembimbing Lapangan : Hanung Aprianto, S.KM

Yang Menerima

Kepala Desa Jembungan,
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali,


 Budi Arif Dwi Nugraho, S.H., M.H

Yang Menyerahkan

Mahasiswa,


 Putri Aulia Rahman
 NIM 6411421093

c. Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Lokus Sekolah

**BERITA ACARA PENYERAHAN
LAPORAN AKHIR PKL MBKM SKM PENGGERAK
PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pada hari Jumat, tanggal 25, bulan Oktober, tahun 2024, bertempat di SD Negeri 2 Jembungan, telah diserahkan Laporan Akhir PKL MBKM SKM Penggerak Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dalam bentuk cetak sebanyak 1 eksemplar, dengan:

Judul : Optimalisasi Pengelolaan Sampah (OPAH) sebagai Upaya Zero Waste di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
 Nama Mahasiswa : Putri Aulia Rahman
 NIM : 6411421093
 Lokus : 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali 2) Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono 3) SD Negeri 2 Jembungan
 Pembimbing Akademik : Arum Siwiendrayanti, S.KM., M.Kcs
 Pembimbing Lapangan : Hanung Aprianto, S.KM

Yang Menerima

Kepala SD Negeri 2 Jembungan

 Slamet Mulyono, S.Pd.SD
 NIP. 196605251988061001

Yang Menyerahkan

Mahasiswa,



Putri Aulia Rahman
 NIM 6411421093

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan



Peta TPA Winong Tahun 2024



Membuat Eco-Enzyme di TPA Winong



Monev TPS 3R Jatirejo



Monev TPS 3R Desa Rembun



Aksi Peduli Sungai Nasional 2024



Sosialisasi di SMA Negeri 1 Cepogo



Sosialisasi di SMK Negeri 1 Musuk



Pemberian Kenang-Kenangan Institusi



Pembagian Leaflet di Lokus Institusi



Penempelan Poster di Kantor Desa



Foto Bersama Ibu-Ibu PKK RW 03



Senam Bersama Ibu-Ibu PKK RW 03



Poskes RT 12



Poskes RT 13



Intervensi Edukasi Sampah di Sekolah



Foto Bersama Intervensi



Pemberian Doorprize Setelah Intervensi



Pemberian Kenang-Kenangan Sekolah



Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Lokus Institusi



Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Lokus Komunitas



Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Lokus Sekolah

Lampiran 4. Instrumen

**KUIS MENGENAI PENGETAHUAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI SEKOLAH**

1. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis sampah...
 - a. Organik
 - b. Anorganik
 - c. Bahan Berbahaya dan Beracun
 - d. Debu
2. Daun termasuk jenis sampah...
 - a. Organik
 - b. Anorganik
 - c. Bahan Berbahaya dan Beracun
 - d. Residu
3. Plastik termasuk jenis sampah...
 - a. Organik
 - b. Anorganik
 - c. Bahan Berbahaya dan Beracun
 - d. Residu
4. Pecahan kaca termasuk jenis sampah...
 - a. Organik
 - b. Anorganik
 - c. Bahan Berbahaya dan Beracun
 - d. Residu
5. Di bawah ini yang bukan termasuk penanggulangan sampah adalah...
 - a. Reduce
 - b. Reuse
 - c. Recycle
 - d. Remodelling
6. Reduce artinya...
 - a. Menambah
 - b. Mengurangi
 - c. Mendaur ulang
 - d. Menggunakan kembali
7. Reuse artinya...
 - a. Menambah
 - b. Mengurangi
 - c. Mendaur ulang
 - d. Menggunakan kembali
8. Recycle artinya...
 - a. Menambah
 - b. Mengurangi
 - c. Mendaur ulang
 - d. Menggunakan kembali
9. Berikut sampah yang sulit terurai adalah...
 - a. Sisa sayuran
 - b. Kotoran hewan
 - c. Kaleng
 - d. Kulit buah
10. Berikut ini bencana yang dapat diakibatkan oleh sampah adalah...
 - a. Gempa bumi
 - b. Banjir
 - c. El nino
 - d. Tanah longsor

Lampiran 5. Luaran Wajib (IA Lokus Institusi, Masyarakat, dan Sekolah)



**PELAKSANAAN KEGIATAN
"IMPLEMENTASI MBKM MELALUI PROGRAM
PRAKTIK KERJA LAPANGAN SKM PENGGERAK"
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI**



Nomor: B/8272/UN37.1.9/HK.07.00/2024
Nomor: 300 / 3626 / 4.3 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran UNNES
Alamat : Kampus Kedokteran UNNES, Jl. Kelud Utara III, Gajahmungkur, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Semarang (UNNES) selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Suraji, ST., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
Alamat : Jl. Kebo Kenongo, Kemiri, Mojosongo, Kabupaten Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan PKL MBKM "SKM Penggerak" Tahun 2024 yang diatur sebagai berikut:

1. PKL MBKM SKM Penggerak adalah program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) melalui magang/ praktik kerja dan membangun desa yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan praktik kerja lapangan mahasiswa melalui pendekatan institusi, masyarakat, dan sekolah melalui tahapan siklus pemecahan dari analisis situasi, intervensi, hingga advokasi.
2. Peserta program ini adalah mahasiswa Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang telah lulus minimal 110 sks.
3. Program ini dilaksanakan selama Semester Genap 2023/2024 dan Gasal 2024/2025.
4. Peserta program bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan program sesuai dengan panduan yang ditetapkan di bawah bimbingan pembimbing akademik dari PIHAK KESATU dan pembimbing lapangan dari PIHAK KEDUA.
5. Peserta program dapat membantu pelaksanaan program kerja PIHAK KEDUA di bawah bimbingan pembimbing lapangan, apabila diperlukan.

Demikian Pelaksanaan Kegiatan "Implementasi MBKM Melalui Program Praktik Kerja Lapangan SKM Penggerak" dibuat dan ditandatangani pada Senin, 12 Agustus 2024 di Kabupaten Boyolali dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes.

PIHAK KEDUA,



Lampiran Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Nomor
B/8272/UN37.1.9/HK.07.00/2024

**Mahasiswa Peserta PKL MBKM SKM Penggerak Tahun 2024 di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali**

No	Nama	NIM	Peminatan
1	Putri Aulia Rahman	6411421093	Kesehatan Lingkungan
2	Diva Anisa Rahmawati	6411421040	Kesehatan Lingkungan
3	Sullindya Deswi Atiza	6411421206	Kesehatan Lingkungan



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
"IMPLEMENTASI MBKM MELALUI PROGRAM
PRAKTIK KERJA LAPANGAN SKM PENGGERAK"
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
DESA JEMBUNGAN,
KABUPATEN BOYOLALI**



Nomor: B/10458/UN37.1.9/HK.07.00/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran UNNES
Alamat : Kampus Kedokteran UNNES, Jl. Kelud Utara III, Gajahmungkur, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Semarang (UNNES) selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Budi Arif Dwi Nugroho S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Desa Jembungan, Kabupaten Boyolali
Alamat : Dukuh Jetak, Desa Jembungan, Kabupaten Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Jembungan, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan PKL MBKM "SKM Penggerak" Tahun 2024 yang diatur sebagai berikut:

1. PKL MBKM SKM Penggerak adalah program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) melalui magang/praktik kerja dan membangun desa yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan praktik kerja lapangan mahasiswa melalui pendekatan institusi, masyarakat, dan sekolah melalui tahapan siklus pemecahan dari analisis situasi, intervensi, hingga advokasi.
2. Peserta program ini adalah mahasiswa Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang telah lulus minimal 110 sks (daftar mahasiswa terlampir).
3. Program ini dilaksanakan selama Semester Genap 2023/2024 dan Gasal 2024/2025.
4. Peserta program bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan program sesuai dengan panduan yang ditetapkan di bawah bimbingan pembimbing akademik dari PIHAK KESATU.
5. PIHAK KEDUA dapat memfasilitasi terlaksananya program yang dirancang peserta program.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada Selasa, 01 Oktober 2024 di Kabupaten Boyolali dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes.

PIHAK KEDUA,



Budi Arif Dwi Nugroho S.H., M.H.

Lampiran Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Nomor
B/10458/UN37.1.9/HK.07.00/2024

**Mahasiswa Peserta PKL MBKM SKM Penggerak Tahun 2024 di
Desa Jembungan, Kabupaten Boyolali**

No	Nama	NIM	Peminatan
1	Putri Aulia Rahman	6411421093	Kesehatan Lingkungan
2	Diva Anisa Rahmawati	6411421040	Kesehatan Lingkungan
3	Sullindya Deswi Atiza	6411421206	Kesehatan Lingkungan
4	Novia Fariqothul Qudsyiah	6411421023	Biostatistik dan Kependudukan
5	Farica Ayu Rizky Agustina	6411421017	Administrasi Kebijakan Kesehatan
6	Novita Tri Nur'aini	6411421028	Biostatistik dan Kependudukan
7	Nurlaili Karomah	6411421041	Administrasi Kebijakan Kesehatan
8	Rossi Itsnaul Haq	6411421043	Biostatistik dan Kependudukan



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
"IMPLEMENTASI MBKM MELALUI PROGRAM
PRAKTIK KERJA LAPANGAN SKM PENGGERAK"
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
SD NEGERI 2 JEMBUNGAN**



Nomor: B/10335/UN37.1.9/HK.07.00/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran UNNES
Alamat : Kampus Kedokteran UNNES, Jl. Kelud Utara III, Gajahmungkur, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Semarang (UNNES) selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Slamet Mulyono, S.Pd.SD.
Jabatan : Kepala SD Negeri 2 Jembungan
Alamat : Dukuh Bantulan RT 04/RW 01 Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Negeri 2 Jembungan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan PKL MBKM "SKM Penggerak" Tahun 2024 yang diatur sebagai berikut:

1. PKL MBKM SKM Penggerak adalah program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) melalui magang/praktik kerja dan membangun desa yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan praktik kerja lapangan mahasiswa melalui pendekatan institusi, masyarakat, dan sekolah melalui tahapan siklus pemecahan dari analisis situasi, intervensi, hingga advokasi.
2. Peserta program ini adalah mahasiswa Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang telah lulus minimal 110 sks (daftar mahasiswa terlampir).
3. Program ini dilaksanakan selama Semester Genap 2023/2024 dan Gasal 2024/2025.
4. Peserta program bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan program sesuai dengan panduan yang ditetapkan di bawah bimbingan pembimbing akademik dari PIHAK KESATU.
5. PIHAK KEDUA dapat memfasilitasi terlaksananya program yang dirancang peserta program.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada Selasa, 01 Oktober 2024 di Kabupaten Boyolali dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes.



Slamet Mulyono, S.Pd.SD.

Lampiran Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Nomor
B/10335/UN37.1.9/HK.07.00/2024

**Mahasiswa Peserta PKL MBKM SKM Penggerak Tahun 2024 di
SD Negeri 2 Jembungan**

No	Nama	NIM	Peminatan
1	Putri Aulia Rahman	6411421093	Kesehatan Lingkungan
2	Diva Anisa Rahmawati	6411421040	Kesehatan Lingkungan
3	Sullindya Deswi Atiza	6411421206	Kesehatan Lingkungan

Lampiran 6. Luaran Wajib (Video Dokumentasi Diupload Youtube & Instagram)



VIDEO DOKUMENTASI DAN TESTIMONI PKL MBKM SKM PENGGERAK TAHUN 2024



Link : <https://youtu.be/Xi1hQSJ97io?si=ocNidI3YGret9MKJ>



Link :

<https://www.instagram.com/reel/DBSVbL8yK0C/?igsh=MXA4ZWE3eGxoYnYzMw>

==

Lampiran 7. Luaran Wajib (Policy Brief Lokus Institusi, Masyarakat, dan Sekolah)

Kesmas UNNES
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

POLICY BRIEF

PKL SKM Penggerak

FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGURANGAN JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MELALUI OPTIMALISASI TPS 3R

PUTRI AULIA RAHMAN
(6411421093)

PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
(KESEHATAN LINGKUNGAN)

RINGKASAN

Jumlah timbulan sampah yang terus meningkat setiap tahun menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum terselesaikan di Indonesia. Dengan meningkatkan infrastruktur dan teknologi di TPS 3R serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, merupakan langkah strategis untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Melalui pendekatan ini, diharapkan juga dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat serta mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di tingkat lokal melalui partisipasi aktif masyarakat dan penerapan teknologi pengolahan sampah yang lebih efektif.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Indonesia mencapai **38,5 juta ton per tahun** pada 2023. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar **62,25%** yang berhasil dikelola, sementara sisanya masih belum tertangani dengan baik. Kondisi ini menuntut adanya upaya yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, salah satunya melalui optimalisasi TPS 3R.

Optimalisasi TPS 3R sejalan dengan upaya untuk mewujudkan program zero waste. Melalui pemilahan sampah yang lebih baik, peningkatan fasilitas pengolahan, serta edukasi berbasis masyarakat dapat menjadikan TPS 3R berfungsi maksimal. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada Tahun 2024, memiliki misi untuk mengaktifkan kembali TPS 3R di seluruh kecamatan. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang usia operasional TPA Winong dan meningkatkan angka penanganan sampah yang masih di bawah target 69%. Dengan demikian, perlu adanya solusi alternatif yang tepat dengan mempertimbangkan kendala tiap TPS 3R yang berbeda-beda.

REKOMENDASI

1. Pendampingan intensif dari pihak pemerintah daerah dalam memonitoring secara berkala setiap TPS 3R.
2. Setiap desa/kelurahan membuat kebijakan yang ditujukan pada warga untuk memilah sampah sebelum membuangnya disertai sanksi berlaku.
3. Kampanye kesadaran masyarakat terhadap program TPS 3R.

REFERENSI

- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2023). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rencana Strategis DLH Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. (2021). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.



POLICY BRIEF

PKL SKM Penggerak

FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



OPTIMALISASI PERAN KADER PKK DALAM UPAYA MENGURANGI SAMPAH RUMAH TANGGA

PUTRI AULIA RAHMAN
(6411421093)

PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
(KESEHATAN LINGKUNGAN)

RINGKASAN

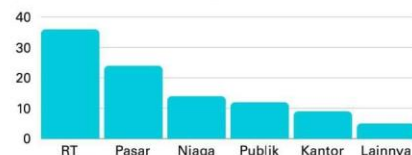
Kabupaten Boyolali saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah rumah tangga, dengan timbulan sampah yang mencapai hampir **300 ton per hari**. Hanya **40%** dari sampah ini yang berhasil masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara sisanya seringkali dibuang sembarangan. Kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki peran strategis untuk mengedukasi masyarakat dalam implementasi program 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dengan demikian, optimalisasi peran kader PKK dapat membantu mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

PENDAHULUAN

Sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Hingga bulan Juni 2024, volume timbulan sampah mencapai sekitar **298 ton per hari**. Sementara itu, persentase sampah yang belum terkelola hingga bulan Juni 2024 sebesar **29,49%**. Sisa sampah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Kader PKK sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial, memiliki peran strategis dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah yang baik dan benar. Melalui program-program yang terstruktur, kader PKK dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah rumah tangga.

Berdasarkan data SIPSN, rumah tangga menyumbang bagian terbesar dari timbulan sampah di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023.



REKOMENDASI

1. Pelatihan rutin bagi kader PKK tentang pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk pemilahan sampah, penerapan program 3R, serta pembuatan kompos atau eco-enzyme.
2. Mendorong pembentukan dan pengelolaan bank sampah di setiap desa/kelurahan.
3. Mengajak kerjasama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah di desa.

REFERENSI

- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Boyolali. (2024). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rencana Strategis DLH Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. (2021). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

POLICY BRIEF

PKL SKM Penggerak

FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENTINGNYA PENGELOLAAN SAMPAH SEJAK DINI MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI SEKOLAH

PUTRI AULIA RAHMAN
(6411421093)

PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
(KESEHATAN LINGKUNGAN)

RINGKASAN

Pengelolaan sampah sejak dini melalui kegiatan sosialisasi di sekolah sangat penting untuk membentuk kebiasaan dan kesadaran lingkungan terhadap anak-anak. Di Kabupaten Boyolali, jumlah timbulan sampah hampir mencapai sekitar **300 ton per hari**. Sekolah memiliki peran penting dalam mengajarkan pengelolaan sampah melalui pendidikan dan praktik langsung. Melalui sosialisasi di sekolah, siswa dapat belajar tentang pentingnya mengimplementasikan prinsip 3R di sekolah. Dengan mengedukasi anak-anak tentang pengelolaan sampah, dapat membantu dalam mengurangi jumlah sampah yang tidak terkelola dan membentuk generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan.

PENDAHULUAN

Kabupaten Boyolali menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, dengan timbulan sampah harian mencapai **300 ton** pada tahun 2024. Hanya **seper tiga** dari jumlah tersebut yang dapat ditangani oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara sisanya sering kali tidak terkelola dengan baik. Salah satu solusi yang efektif adalah melalui pendidikan dan sosialisasi pengelolaan sampah sejak dini di sekolah.

Sekolah memiliki peran penting sebagai tempat pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak. Dengan mengintegrasikan pendidikan pengelolaan sampah dalam kurikulum sekolah, siswa dapat belajar tentang pentingnya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah (3R). Hal ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, tetapi juga membentuk kebiasaan baik pada anak yang akan terbawa hingga dewasa.

Berdasarkan data SIPSN Tahun 2023, plastik merupakan jenis sampah terbanyak di Kabupaten Boyolali dan salah satu sumbernya dari sekolah.



REKOMENDASI

1. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengelolaan sampah, seperti lomba daur ulang sampah, proyek kebersihan lingkungan, dan sebagainya.
2. Memberikan pelatihan pada guru dan siswa tentang cara pengelolaan sampah yang efektif.
3. Kolaborasi antara sekolah dan komunitas lokal untuk mendukung program pengelolaan sampah di sekolah.

REFERENSI

- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Boyolali. (2024). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rencana Strategis DLH Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. (2021). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

**Lampiran 8. Luaran Tambahan (Surat Pencatatan Ciptaan dari Ditjen HAKI
Kemenkumham RI)**


REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024204765, 12 Oktober 2024

Pencipta
Nama : **Putri Aulia Rahman dan Arum Siwiendrayanti S.KM., M.Kes**
Alamat : Universitas Negeri Semarang, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, 50229
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Universitas Negeri Semarang**
Alamat : Universitas Negeri Semarang, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Gerakan Peduli Sampah Kita (Gempita)**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 Oktober 2024, di Semarang
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000777197

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Lampiran 9. Luaran Tambahan (Poster HAKI)

Kesmas UNNES
CENTER OF EXCELLENCE IN PUBLIC HEALTH

GEMPITA

GERAKAN PEDULI SAMPAH KITA

GET TO KNOW GEMPITA?

Gempita adalah gerakan bersama yang bertujuan untuk mengurangi dan mengelola timbulan sampah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

MANFAAT MENERAPKAN

1. Mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA
2. Meningkatkan efisiensi penanganan sampah dari sumbernya
3. Meningkatkan edukasi dan peran aktif masyarakat
4. Mendukung perekonomian sirkular

1. Memilah sampah sesuai jenisnya, mengangkut sampah ke TPS, serta menyalurkan ke bank sampah atau dijual ke pengepul
2. Mengolah sampah menjadi kompos atau eco-enzyme, Memanfaatkan menjadi kerajinan, serta budidaya maggot atau pakan ternak
3. Mengurangi penggunaan produk sekali pakai, menggunakan tumblr, membawa tas belanja sendiri

PUTRI AULIA RAHMAN
ARUM SIMIENDRAYANTI S.K.M., M.KES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS KEDOKTERAN



KESEHATAN MASYARAKAT
KESEHATAN LINGKUNGAN






Lampiran 10. Logbook Kegiatan




**LOGBOOK KEGIATAN PKL MBKM
SKM PENGGERAK
PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nama : Putri Aulia Rahman
 NIM : 6411421093
 Lokus : 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
 2) Desa Jembungan 3) SD N 2 Jembungan
 Pembimbing Akademik : Arum Siwiendrayanti, S.KM., M.Kes.
 Pembimbing Lapangan : Hanung Aprianto, S.KM.




No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
1.	Senin, 1 Juli 2024	Mencari data sekunder dan menganalisis situasi di DLH Kabupaten Boyolali serta mengkaji dokumen teknis pengolahan air limbah PT. Rapiqra	a. Mengetahui teknis & manajemen persampahan di TPA Winong. b. Mengetahui profil DLH Kab Boyolali. c. Masukan/rekomendasi dari teknis pemanfaatan air limbah untuk penyiraman PT. Rapiqra.		8
2.	Selasa, 2 Juli 2024	Menghitung jumlah timbulan sampah per desa/kelurahan di kab. Boyolali tahun 2022 serta membuat postingan	a. Mengetahui rumus dan hasil timbulan sampah tiap desa/kelurahan di kab Boyolali.		8




No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
		Untuk sektor kegiatan di DLH Kab. Boyolali	<p>b. Mengetahui cara input data jumlah timbulan sampah melalui ms. excel.</p> <p>c. Belajar membuat template yang bagus menarik untuk diupload di Instagram DLH Kab. Boyolali.</p>		
3.	Rabu, 3 Juli 2024	Membantu kegiatan rapat Adiwiyata yang diadakan di Aula DLH Kab Boyolali serta ikut survei lapangan ke TPS 3R Kramoyoso	<p>a. Mengetahui isi pembahasan rapat Adiwiyata yang dilakukan antara masing 3 perwakilan sekolah dengan pihak DLH Boyolali & DLH Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Mengetahui Fasilitas & sarana serta kendala yang dihadapi oleh TPS 3R Kramoyoso dalam mengelola sampah.</p>		
4.	Kamis, 4 Juli 2024	Membantu kegiatan rapat asistensi validasi pelaporan kinerja Pengurangan & penanganan sampah Kab. Boyolali melalui SIPN serta membuat angket untuk buku perekam & masyarakat	<p>a. Notulen dari rapat asistensi</p> <p>b. Mengetahui isi pembahasan dari rapat asistensi</p> <p>c. Instrumen angket untuk kegiatan Incentive di sekolah & masyarakat</p>		







No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
5.	Jumat, 5 Juli 2024	Menginput data titik koordinat bank sampah, TPS, TPA, sektor informal, RTH, & lokasi mudik dari SIPSN ke spreadsheet	a. Mengetahui jumlah bank sampah, TPS, TPA, sektor informal, RTH & lokasi mudik di daerah Kab. Boyolali b. Mengetahui isi data yang ada di SIPSN		
6.	Sabtu, 6 Juli 2024	Diskusi program kegiatan di lokasi masyarakat Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kab. Boyolali	Timeline pelaksanaan kegiatan di lokasi masyarakat		
7.	Minggu, 7 Juli 2024	Diskusi program kegiatan di lokasi sekolah yaitu SDN 2 Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kab. Boyolali	Timeline pelaksanaan kegiatan di lokasi sekolah.		
8.	Senin, 8 Juli 2024	Melanjutkan input titik lokasi & membuat layout dari peta fasilitas persampahan di Kab. Boyolali	a. Mengetahui mana saja titik koordinat yang masih perlu / kosong. b. Mengetahui persebaran fasilitas persampahan per desa & kecamatan		
9.	Selasa, 9 Juli 2024	Melanjutkan membuat peta layout fasilitas persampahan & input data pengurangan sampah organik & anorganik melalui spreadsheet.	a. Mengetahui jumlah pengurangan sampah organik & anorganik per desa di Kab. Boyolali b. Mengetahui target pengurangan sampah di Kab. Boyolali		






No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
10.	Rabu, 10 Juli 2024	Ikut serta turun lapangan dalam rangka monitoring & evaluasi di TPS datrejo dan Urutsewu	a. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh TPS datrejo & unursewu b. Mengetahui sarana prasarana yang dimiliki oleh TPS datrejo & Urutsewu c. Evaluasi & saran masukan dari pihak DLH kab Boyolali terhadap TPS teralt		
11.	Kamis, 11 Juli 2024	Ikut serta turun lapangan dalam rangka monitoring & evaluasi di TPS 3R desa Rembun.	a. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh TPS 3R desa Rembun b. Mengetahui sarana prasarana yang dimiliki oleh TPS 3R desa Rembun c. Mengetahui saran masukan dari pihak DLH kab Boyolali terhadap TPS teralt.		
12.	Jumat, 12 Juli 2024	Membuat poster acara Car Free Day untuk diunggah di akun Instagram DLH kab Boyolali	a. Poster Aksi Peduli Sampah yang diunggah pada story Instagram DLH kab Boyolali. b. Mengetahui cara membuat		





No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
			desain yang menarik melalui aplikasi Canva.		
13.	Sabtu, 13 Juli 2024	Melakukan edit poster himbauan acara CAR FREE DAY untuk diunggah pada akun Instagram DLH Kab. Bojonegara.	a. Poster Atri Peduli Sampah yang diunggah pada feed akun Instagram DLH Kab. Bojonegara. b. Mengetahui jangkauan audiens dari postingan poster tersebut setelah diunggah.		8
14.	Minggu, 14 Juli 2024	Mengikuti acara CAR FREE DAY Kab Bojonegara bersama dengan pihak DLH Bidang Pengelolaan Sampah.	a. Mengetahui jumlah timbulan sampah yang di- hasilkan dari acara CAR FREE DAY. b. Mengetahui penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mengelola sampah tersebut seperti tempat sampah & motor roda tiga c. Mengetahui sikap masyarakat terhadap sampah.		8
15.	Senin, 15 Juli 2024	Menginput data pengukur- an timbulan sampah pada Kab. Bojonegara	a. Mengetahui jumlah pengukuran sampah organik		8





No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
			<p>menyusun anggaran melalui desa siskam</p> <p>b. Mengetahui jumlah TPS & kompositing yang aktif di Kab. Boyolali.</p>		
16.	Selasa, 16 Juli 2024	Mengikuti acara focus group discussion (FGD) mengenai penyusunan tata letak Sampah Plastik di Kab. Boyolali dengan pihak UBINUS.	<p>a. Mengetahui permasalahan sampah yang saat ini sedang dihadapi oleh pihak DLH Kab. Boyolali.</p> <p>b. Mengetahui rencana teknologi pemrisis yang diusulkan oleh pihak UBINUS.</p> <p>c. Seran & masukan dari pihak DLH, Kades maupun Camat mengenai teknologi tsb.</p>		
17.	Rabu, 17 Juli 2024	Ikut serta turun lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi TPS yang tersebar di masyarakat.	<p>a. Mengetahui letak & kondisi TPS di kabupaten Boyolali.</p> <p>b. Mengetahui kendala serta sarana prasarana dari TPS terkait.</p>		
18.	Kamis, 18 Juli 2024	Mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan sampah pada UKM Desa Kedunglirong	<p>a. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh</p>		






No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
			masyarakat desa kedunglirong dalam mengelola limbah b. Mengetahui saran & masukan dari pihak DLH terkait masalah tersebut.		
19.	Jumat, 19 Juli 2024	Membantu kegiatan rutin Bank Sampah di DLH Feb. Boyolali	a. Mengetahui jenis sampah organik apa saja yang dihasilkan di DLH kab. Boyolali b. Mengetahui jumlah / berat sampah yang dikeluarkan.		
20.	Sabtu, 20 Juli 2024	Observasi & survei ke kelas sekolah yaitu di SD Negeri 2 Dembungan	a. Berkordinasi dengan kepala sekolah terkait syarat-syarat penyusunan PKL di sekolah. b. Memperoleh contact person kepala sekolah SDN 2 Dembungan		
21.	Minggu, 21 Juli 2024	Observasi & survei ke lokasi masyarakat yaitu di Desa Dembungan, Kecamatan Banyudono.	a. Berkordinasi dengan kepala kawasan pemerintahan desa terkait syarat- syarat penyusunan b. Memperoleh contact person kepala kawasan pemerintahan desa		







No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
22.	Senin, 22 Juli 2024	Observasi ke TPA Kinong & Berkunjung ke rumah pengikat lingkungan yaitu Bu Ningrum	a. Mengetahui lokasi, kondisi & sarana masalah di TPA Kinong. b. Mengetahui lokasi rumah Bu Ningrum & produk olahan limbah yang dihasilkan		
23.	Selasa, 23 Juli 2024	Belajar serta membuat eco-enzyme bersama pengurus TPA Kinong	a. Mengetahui manfaat & kegunaan dasar pembuatan eco enzyme. b. Mengetahui cara & bahan yang digunakan dalam pembuatan eco enzyme.		
24.	Rabu, 24 Juli 2024	Membuat peta lokasi TPA Kinong melalui aegis.	a. Mengetahui letak fasilitas yang ada di TPA secara spasial. b. Belajar fitur-fitur di dalam aegis.		
25.	Kamis, 25 Juli 2024	Berkunjung ke rumah Bu Ningrum & tempat budidaya Maggot.	a. Mengetahui salah satu budidaya maggot di Kab. Bogor b. Mengetahui siklus hidup dari maggot c. Mengetahui produk turunan eco enzyme seperti sabun, deodoran, dll.		
26.	Jumat, 26 Juli 2024	Mengikuti kegiatan aksi peduli sungai memperingati hari sungai nasional	a. Mengetahui tata cara bersih sungai yang dilakukan di b. Mengetahui jenis-jumlah timbunan sampah di sungai.		
27.	Sabtu, 27 Juli 2024	Membuat PPT sebagai media intervensi di lokasi sepihan	a. PPT yang akan ditampilkan pada saat pelaksanaan intervensi di sepihan		







No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
28.	Minggu, 28 Juli 2024	Membuat PPT sebagai media intervensi di lokasi komunitas	a. PPT yang akan ditampilkan pada saat pelaksanaan intervensi di masyarakat		
29.	Senin, 29 Juli 2024	Melanjutkan peta lokasi fasilitas TPA Winong 2024 melalui arcgis.	a. Peta lokasi fasilitas TPA Winong 2024 untuk dicetak & dipajang di kantor UPT Pengelolaan Sampah		
30.	Selasa, 30 Juli 2024	Membuat postingan mengenai Percepatan Program 2024 untuk diposting di Instagram DLH Kab. Boyolali.	a. Postingan mengenai percepatan Percepatan Program 2024. b. Mengetahui cara membuat desain yang me- nerik & informatif melalui canva.		
31.	Rabu, 31 Juli 2024	Membantu dokumentasi kegiatan aksi peduli sungai Pepo & membuat leaflet tentang eco-enzyme.	a. Mengetahui tata cara berli- sungai yang diakutkan. b. Belajar man- buat desain leaf- let yang bagus & menarik melalui canva.		
32.	Kamis, 1 Agustus 2024	Ikut serta monitoring & evaluasi TPS 3R Tumang Cepogo	a. Mengetahui kendala / masalah		




No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
			Yang dihadapi di TPS 3R rumah b. Mengetahui sarana yang di- miliki TPS 3R rumah c. Mengetahui sarana yang diberi -kan oleh terkait termasukan tersebut.		
28.	Dumat, 2 Agustus 2024	Isit serta dalam kegiatan sosialisasi tentang zero waste & komposting di SMA N 1 Cepogo.	a. Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep zero waste & komposting pada siswa-siswa SMA N 1 Cepogo. b. Mengetahui tingkat pengetahuan para siswa sebelum & setelah dilakukan sosialisasi.		
34.	Sabtu, 3 Agustus 2024	Menyampaikan syarat-syarat perizinan PKL di lokasi peroleh	a. Dokumen berupa surat pengantar dari prodi dan proposal PKL		
36.	Minggu, 4 Agustus 2024	Menyampaikan syarat-syarat perizinan PKL di lokasi komunitas	a. Dokumen berupa surat pengantar dari prodi untuk diberikan pada kantor kecamatan		
36.	Senin, 5 Agustus 2024	Melanjutkan membuat leaflet & mengidentifikasi	a. Leaflet tentang eco-enzyme.		






No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
		Masalah yang ada di DLH Kab. Bogoroli.	Untuk Inkerenel di komunitas. b. Mengetahui rincian & besarnya masalah.		
37.	Selasa, 6 Agustus 2024	Menginput data retribusi kebersihan & realisasi retribusi serta menyusun laporan PKL.	a. Mengetahui jumlah & besarnya retribusi kebersihan. b. Analisis situasi & masalah yang ditemui di instansi.		
38.	Rabu, 7 Agustus 2024	Menginput data berita acara serah terima barang serta input data komposting di SIPSN.	a. Mengetahui harga sarana di DLH Kabupaten Bogoroli seperti tempat pilah sampah, roda s.d. b. Mengetahui jumlah pengurangan sampah dari kompos bag per bulan.		
39.	Kamis, 8 Agustus 2024	Menginput data bank sampah unit di neraca timbulan sampah berdasarkan komposisinya.	a. Mengetahui jumlah pengurangan sampah dari bank sampah unit. b. Mengetahui komposisi timbulan sampah terbanyak.		
40.	Jumat, 9 Agustus 2024	Melanjutkan menyusun laporan PKL	a. Mengetahui besarnya / ukuran masalah yang telah ditemui.		








No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
			b. Analisis situasi di lokasi komunitas		
41.	Sabtu, 10 Agustus 2024	Melakukan diskusi mengenai metode & media yang akan digunakan di lokasi sekolah.	a. Mendapatkan keputusan intervensi dengan menggunakan metode ceramah & permainan & metode bertahap		
42.	Minggu, 11 Agustus 2024	Melakukan diskusi mengenai metode & media yang akan digunakan di lokasi komunitas.	a. Mendapatkan keputusan intervensi dengan menggunakan metode ceramah & media leaflet.		
43.	Senin, 12 Agustus 2024	Mengurus dokumen IA & menginput titik koordinat fasilitas persampahan	a. lay out peta spasial fasilitas persampahan di Kab. Boyolali b. Dokumen IA untuk dimintai ttd kepala dinas lingkungan hidup Kab. Boyolali.		
44.	Selasa, 13 Agustus 2024	Membuat kuesioner hamon kuantitatif untuk mengetahui prioritas masalah di institusi	a. Mengetahui besaran, kesesuaian, efektifitas intervensi, & kelayakan tiap masalah. b. Mengetahui kriteria penilaian hamon kuantitatif		
45.	Rabu, 14 Agustus 2024	Melanjutkan membuat kuesioner hamon kuantitatif institusi	a. Kuesioner hamon institusi yang sudah siap untuk diisi.		










No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
46.	Kamis, 15 Agustus 2024	Mengikuti rapat persiapan lomba 17 Agustus yang di- sanggarkan oleh DLH Kab. Boyolali.	a. Mengetahui aturan & alur tiap jenis lomba yang diadakan.		
47.	Jumat, 16 Agustus 2024	Membantu acara lomba 17 Agustus di DLH Kab. Boyolali & mengedit video dokumentasi kegiatan melalui aplikasi Capcut.	a. Mengetahui kendala & tata cara tiap lomba. b. Video dokumentasi kegiatan lomba untuk di posting di Instagram DLH Kab Boyolali.		
48.	Sabtu, 17 Agustus 2024	Mengikuti upacara kemarda- -an RI ke-79 di DLH Kab Boyolali.			
49.	Minggu, 18 Agustus 2024	Menulis logbook selama 2 minggu ke belakang untuk laporan PKL SKM Penggerak.	a. Logbook yang sudah bisa ditanda- -tangani oleh pem- -bimbing lapangan		
50.	Senin, 19 Agustus 2024	Diskusi dan melanjutkan menyusun laporan PKL	a. Mengetahui penyebab masalah di DLH Kab. Boyolali b. Mengetahui prioritas penyebab masalah di DLH Kab. Boyolali.		
51.	Selasa, 20 Agustus 2024	Mencari juganган & kompos- -ting di sekitar kompleks Pentahoran dinas Kabupaten Boyolali	a. Mengetahui jumlah & ukuran junganган & kompos- -ting di kompleks Pentahoran dina-		







No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
			b. Mengetahui kapasitas sampah yang dikampung di dalam jugangan & komposting.		
52.	Rabu, 21 Agustus 2024	Konsultasi dengan PI tentang Kuesioner hanton kuantitatif serta mengurus perizinan PKL di lokasi komunikasi & sekolah.	a. Mengetahui kekurangan bagian masalah yang telah disusun. b. Surat balasan dari lokasi sekolah.		
53.	Kamis, 22 Agustus 2024	Melanjutkan mengurus perizinan di Kantor Kecamatan & sekolah serta observasi lingkungan SDN 2 Jemberan.	a. Surat izin PKL dari kantor kecamatan b. Mengetahui jenis sampah yang dikumpulkan di lokasi sekolah.		
54.	Jumat, 23 Agustus 2024	Konsultasi dengan perwakilan dari bidang RTN mengenai kuesioner hanton kuantitatif.	a. Mengetahui kekurangan bagian masalah yang telah disusun.		
55.	Sabtu, 24 Agustus 2024	Revisi Kuesioner hanton pada permasalahan sampah & lahan.	a. Kuesioner hanton yang telah direvisi.		
56.	Minggu, 25 Agustus 2024	Revisi Kuesioner hanton pada permasalahan sampah & lahan.	a. Kuesioner hanton yang telah direvisi.		
57.	Senin, 26 Agustus 2024	Membuat google form laporan pengelolaan bank sampah & TPS 3R	a. Google form yang berisi data pengelolaan sampah		










No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
			<p>a. melalui Bank Sampah</p> <p>b. Google Form yang berisi data pengeloban sampah melalui TPS 3R</p>		
56.	Selasa, 27 Agustus 2024	Berkunjung ke pameran Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2024	<p>a. Mendapatkan pengetahuan baru tentang flora & fauna di setiap daerah Indonesia.</p> <p>b. Mengetahui cara menjaga kelestarian flora & fauna di masing-masing daerah.</p>		
59.	Rabu, 28 Agustus 2024	Berkunjung ke pameran HKAN 2024	<p>a. Mengetahui kesenian khas di setiap daerah Indonesia.</p> <p>b. Mengetahui objek wisata di setiap daerah Indonesia.</p>		
60.	Kamis, 29 Agustus 2024	Berkunjung ke pameran HKAN 2024	<p>a. Mengetahui fasilitas yang dimiliki oleh setiap UPT konservasi alam</p> <p>b. Mengetahui jumlah populasi flora & fauna yang dilindungi</p>		

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
61.	Jumat, 30 Agustus 2024	Mengurus perizinan PKL di lokus komunitas & membuat quiz untuk anak sekolah.	a. Mendapatkan surat balasan dari lokus komunitas yaitu pihak Desa Jembungan b. Quiz tentang pengeolaan sampah melalui fehoot.		
62.	Sabtu, 31 Agustus 2024	Berkomunikasi dengan kepala urusan pemerintahan desa untuk mengadakan penemuan dengan para kader.	Tanggal pertemuan dengan para kader desa.		
63.	Minggu, 1 September 2024	Berkomunikasi dengan pembimbing lapangan di sekolah tentang program yang akan dilaksanakan.	Saran & masukan dari PL untuk program inisiasi		
64.	Senin, 2 September 2024	Membantu melengkapi data validasi SIPEN Tahun 2023	a. Data capaian pengelolaan sampah Kab. Boyolali Tahun 2023 yang diunggah dalam gdrive. b. Surat Ijin lingkungan TPA & uji air lindi yang diunggah di gdrive		
65.	Selasa, 3 September 2024	Membantu unggah bukti capaian penanganan & pe- ngurangan sampah Kab. Boyolali serta konsultasi dengan bidang PP terkait kuesioner hanton.	a. Bukti capaian penanganan & pengurangan sampah di dalam Gdrive. b. Saran Masukan besaran masalah		








No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
66.	Rabu, 4 September 2024	Membuat google form laporan pengurangan & penanganan sampah di sekolah serta membantu mengumpulkan data sampah masuk & penanganan di PDU.	a. Google formulir laporan pengurangan & penanganan sampah di sekolah. b. Mengetahui jenis sampah yang masuk ke volume yang ditangani di PDU.		
67.	Kamis, 5 September 2024	Melanjutkan membuat google form laporan pengurangan & penanganan di sekolah serta monitoring TPS 3R Kamugoso.	a. Google formulir laporan sampah di sekolah yang sudah direvisi. b. Mengetahui perkembangan kendala TPS 3R menurut Pirak Rosa & BEM.		
68.	Jumat, 6 September 2024	Membuat google form laporan WCO 2024 Kab. Boyolali.	Google formulir laporan WCO 2024 Kab. Boyolali serta dokumentasinya.		
69.	Sabtu, 7 September 2024	Koordinasi dengan lokasi komunitas terkait program yang akan dilaksanakan.	Saran masukan program dan lokasi komunitas.		
70.	Minggu, 8 September 2024	Menulis logbook selama 3 minggu ke berbagai lokasi laporan PKM Penggerak.	Logbook yang telah bisa ditandatangani oleh pembimbing.		
71.	Senin, 9 September 2024	Merevisi kuesioner harian pada permasalahan indeks kualitas udara.	Kuesioner harian yang telah direvisi.		
72.	Selasa, 10 September 2024	Membantu kegiatan sosialisasi & launching alat pirilis.	Mengetahui manfaat serta cara kerja dari alat pirilis dalam mengurangi timbunan sampah.		




No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
73.	Rabu, 11 September 2024	Membuat kuesioner pengelolaan Sampah dalam program Proklam.	Google form untuk pengelolaan sampah dalam Proklam.		
74.	Kamis, 12 September 2024	Membantu notulen data yang diminta ke sekolah serta membuat tabel timbulan & pengurangan sampah melalui kompos.	a. Lembar data yang diminta ke sekolah. b. Tabel timbulan & pengurangan sampah melalui kompos di sekolah		
75.	Jumat, 13 September 2024	Membantu dokumentasi kegiatan kunjungan SMP N 2 Mojorongo ke PDU & membuat postingan kegiatan tersebut.	Postingan kegiatan kunjungan SMP N 2 Mojorongo untuk diunggah ke ig.		
76.	Sabtu, 14 September 2024	Evaluasi kegiatan selama 2 bulan menjalankan PKL di lokasi institusi.	Hasil evaluasi kegiatan & apa saja yang perlu diperbaiki kedepannya.		
77.	Minggu, 15 September 2024	Konsultasi masalah & program kepada pembimbing akademik.	Salah & masukan program dari PA.		
78.	Senin, 16 September 2024	Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad	-		
79.	Selasa, 17 September 2024	Membuat publikasi untuk diposting di akun instagram DWH Kabupaten Boyolali	Postingan untuk diunggah ke akun DWH Kab Boyolali		
80.	Rabu, 18 September 2024	Membuat poster mengenai tambahan PKL SKM Penggerak	Poster mengenai tambahan PKL.		
81.	Kamis, 19 September 2024	Membuat twibbon untuk kegiatan World Clean Day (WCD) 2024	Twibbon WCD tahun 2024		
82.	Jumat, 20 September 2024	Menyebarkan kuesioner kuantitatif untuk menentukan	a. Mengetahui penilaian prioritas		

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
		Prioritas masalah pada per- wakilan setiap bidang di DLH Kabupaten Boyolali	masalah b. Pendapat tiap 3 perwakilan bidang terkait permasalahan tsb.		
83.	Sabtu, 21 September 2024	Mengedit video dokumentasi warisan wajib PKL SKM Penggerak	Draft dokumentasi di lokus institusi		
84.	Minggu, 22 September 2024	Menulis logbook selama 2 minggu ke berbagai untuk laporan PKL SKM Penggerak.	Logbook yang telah bisa dikandatangan oleh pembimbing.		
85.	Senin, 23 September 2024	Membuat & menyebarkan kuesioner penyebab masalah (PEARL) serta registrasi MBKM SKM Penggerak	a. Mengetahui Penilaian prioritas penyebab masalah di bidang persampahan b. Akun MBKM SKM Penggerak		
86.	Selasa, 24 September 2024	Menghadiri pertemuan para kader posdes Desa Jembungan serta memperkenalkan diri sebagai awalan sebelum terjun langsung ke lapangan	a. Mengetahui Permasalahan yang ada di Desa Jembungan b. Memperoleh contact person Bu Rofi sebagai Perwakilan kader PKK RW 3		
87.	Rabu, 25 September 2024	Membantu pemeraran materi sosialisasi pengelolaan sampah di SMK N 1 Musuk	a. Para siswa SMK N 1 Musuk menjadi lebih paham tentang pengelolaan & pemanfaatan sampah b. Mengetahui fasilitas pengelolaan sampah di SMK N Musuk		

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
88	Kamis, 26 September 2024	Membuat kuesioner hanlon kuantitatif untuk mengetahui prioritas masalah di komunitas	Kuesioner hanlon yang sudah siap untuk diisi		
89	Jumat, 27 September 2024	Memperiapkan pencabutan PKL di Institusi serta koordinasi dengan pihak desa terkait kuesioner hanlon	a. Selewarnya kegiatan PKL di institusi. b. Kuesioner hanlon yang telah direvisi.		
90	Sabtu, 28 September 2024	Menulis logbook selama 1 minggu ke belakang	Logbook yang telah bisa ditandatangani oleh PL.		
91	Minggu, 29 September 2024	Membuat poster pengelolaan sampah rumah tangga untuk media intervensi komunitas	Poster pengelolaan sampah rumah tangga yang sudah siap untuk disebar.		
92	Senin, 30 September 2024	Menyebarkan kuesioner hanlon kuantitatif untuk menentukan prioritas masalah pada perwakilan di desa	Mengetahui penilaian prioritas masalah & penyebab dari tiap perwakilan		
93	Selasa, 1 Oktober 2024	Membuat kuesioner penyebab masalah (PEARL) untuk menentukan prioritas penyebab di komunitas	Mengetahui penilaian prioritas penyebab masalah		
94	Rabu, 2 Oktober 2024	Konsultasi dengan pihak desa terkait kuesioner PEARL	Kuesioner PEARL yang telah direvisi		
95	Kamis, 3 Oktober 2024	Mengebarkan kuesioner PEARL pada perwakilan di desa	Mengetahui penilaian prioritas penyebab masalah		
96	Jumat, 4 Oktober 2024	Beremu dengan perwakilan kader dari PKK RW 03 untuk diskusi terkait program	Tanggal pelaksanaan program PKL di desa		
97	Sabtu, 5 Oktober 2024	Menyiapkan media intervensi (Mencetak KBFIK & poster)			

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
		serta membuat rundown untuk kegiatan intervensi di komunitas	a. Media leaflet & poster dalam bentuk cetak b. Rundown ke- giatan intervensi di desa Jembungan		Ⓝ
98.	Minggu, 6 Oktober 2024	Melakukan intervensi terkait pengelolaan sampah rumah tangga di PRC RW 3 Desa Jembungan dengan menyebarkan poster & leaflet	a. Memperoleh pengalaman me- lakukan intervensi di masyarakat b. Mengetahui keadaan situasi & antusias pada saat intervensi.		Ⓝ
99.	Senin, 7 Oktober 2024	Membuat kuesioner hauran kuantitatif untuk menentukan prioritas masalah & konsultasi dengan pihak sekolah terkait kuesioner tersebut	Kuesioner hauran yang sudah siap dilar & direvisi.		Ⓝ
100.	Selasa, 8 Oktober 2024	Menyebarkan kuesioner hauran serta membuat kuesioner PEARL untuk kemudian dikonsultasikan ke sekolah	a. Mengetahui penilaian prioritas masalah. b. kuesioner PEARL yang sudah di- revisi & siap diisi.		Ⓝ
101.	Rabu, 9 Oktober 2024	Bertemu dengan pihak sekolah untuk diskusi terkait kegiatan & menyebarkan kuesioner PEARL serta perkenalan ke siswa-siswi kelas 5 sebagai sasaran intervensi	a. Tanggal pe- laksanaan intervensi di sekolah b. Mengetahui penilaian prioritas penyebab masalah c. Mengetahui situasi kelas 5 SDN 2 Jembungan		Ⓝ

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
102.	Kamis, 10 Oktober 2024	Menyiapkan media intervensi terkait pentingnya pengelolaan sampah dengan media PPT. Serta memberi instruksi pada siswa kelas 5 untuk membawa tumbler & apa saja alat bahan yang dibawa saat intervensi	a. Media PPT yang siap di-tampilkan b. Rundown kegiatan intervensi di SDN 2 Jembungan		
103.	Jumat, 11 Oktober 2024	Melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah & dokumentasi bersama dengan membawa tumbler sebagai bentuk intervensi pengurangan sampah di sekolah	a. Memperoleh pengalaman intervensi sekolah b. Mengetahui situasi & antusias pada saat intervensi sekolah		
104.	Sabtu, 12 Oktober 2024	Membantu kegiatan poskes di RT 11 Desa Jembungan	Mengetahui proses pelaksanaan poskes di RT 11		
105.	Minggu, 13 Oktober 2024	Membantu kegiatan poskes di RT 12 Desa Jembungan	Mengetahui proses pelaksanaan poskes di RT 12		
106.	Senin, 14 Oktober 2024	Membantu kegiatan poskes di RT 13 Desa Jembungan	Mengetahui proses pelaksanaan poskes di RT 13		
107.	Selasa, 15 Oktober 2024	Membantu kegiatan poskes di RT 14 Desa Jembungan	Mengetahui proses pelaksanaan poskes di RT 14		
108.	Rabu, 16 Oktober 2024	Mendatangi lokasi sekolah untuk membuat video testimoni & advokasi dengan stakeholders	video testimoni yang siap di-gunakan untuk laporan PKL		

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Diperoleh	Kendala	Paraf Pembimbing Lapangan
109	Kamis, 17 Oktober 2024	Mendampingi lokus komunitas untuk membuat video testimoni & advokasi dengan stakeholders	Video testimoni yang siap digunakan untuk laporan PKL		
110	Jumat, 18 Oktober 2024	Mengupdate logbook & mengedit video dokumentasi PKL SKM Penggerak	a. logbook yang siap ditanda-tangani PL b. Video dokumentasi testimoni PKL SKM Penggerak		
111	Sabtu, 19 Oktober 2024	Melanjutkan membuat laporan akhir PKL SKM Penggerak & membuat luaran-luaran PKL	a. Laporan akhir PKL SKM penggerak b. luaran PKL SKM penggerak		
112	Minggu, 20 Oktober 2024	Menyeraikan seluruh laporan akhir PKL & menginput logbook di MBKM PKL SKM Penggerak	a. Laporan akhir PKL SKM Penggerak b. logbook yang tersisi di MBKM		